



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI

MEI 2026

Desa Penglipuran, Bangli



Laporan Perekonomian **PROVINSI BALI**



MEI 2026

*Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah & Provinsi
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali*

 Email: KPwBali-KPKWP@bi.go.id

VISI BANK INDONESIA

"Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju."

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

"Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi)"

VISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan berkontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional"

MISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang Rupiah dan keandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan"

...Memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat...

(Salah satu dari lima tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia dalam menyediakan informasi dan analisis terkini mengenai perkembangan ekonomi, sistem keuangan, serta sistem pembayaran di Provinsi Bali bagi seluruh pemangku kepentingan.

Bank Indonesia memandang bahwa perekonomian di daerah, utamanya Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia, perkembangan perekonomian Bali sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, serta aktivitas ekonomi pendukung lainnya. Mobilitas wisatawan baik domestik maupun mancanegara, serta dinamika sektor selain pariwisata yang memiliki daya ungkit tinggi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang tumbuh tinggi dan berkelanjutan.

Laporan Perekonomian Provinsi Bali memuat berbagai informasi mengenai perkembangan indikator utama perekonomian daerah, diantaranya sektor riil, sektor keuangan, serta dinamika stabilitas sektor keuangan, inflasi, maupun sistem pembayaran. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan serta mengambil langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Kami turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi, diantaranya Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, Badan Pusat Statistik, kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, akademisi, maupun pihak terkait lainnya. Kolaborasi dan sinergi sangat penting dalam penyusunan laporan ini secara komprehensif. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas laporan ini. Semoga Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang berguna bagi berbagai pihak dalam mendukung penguatan perekonomian daerah maupun nasional.

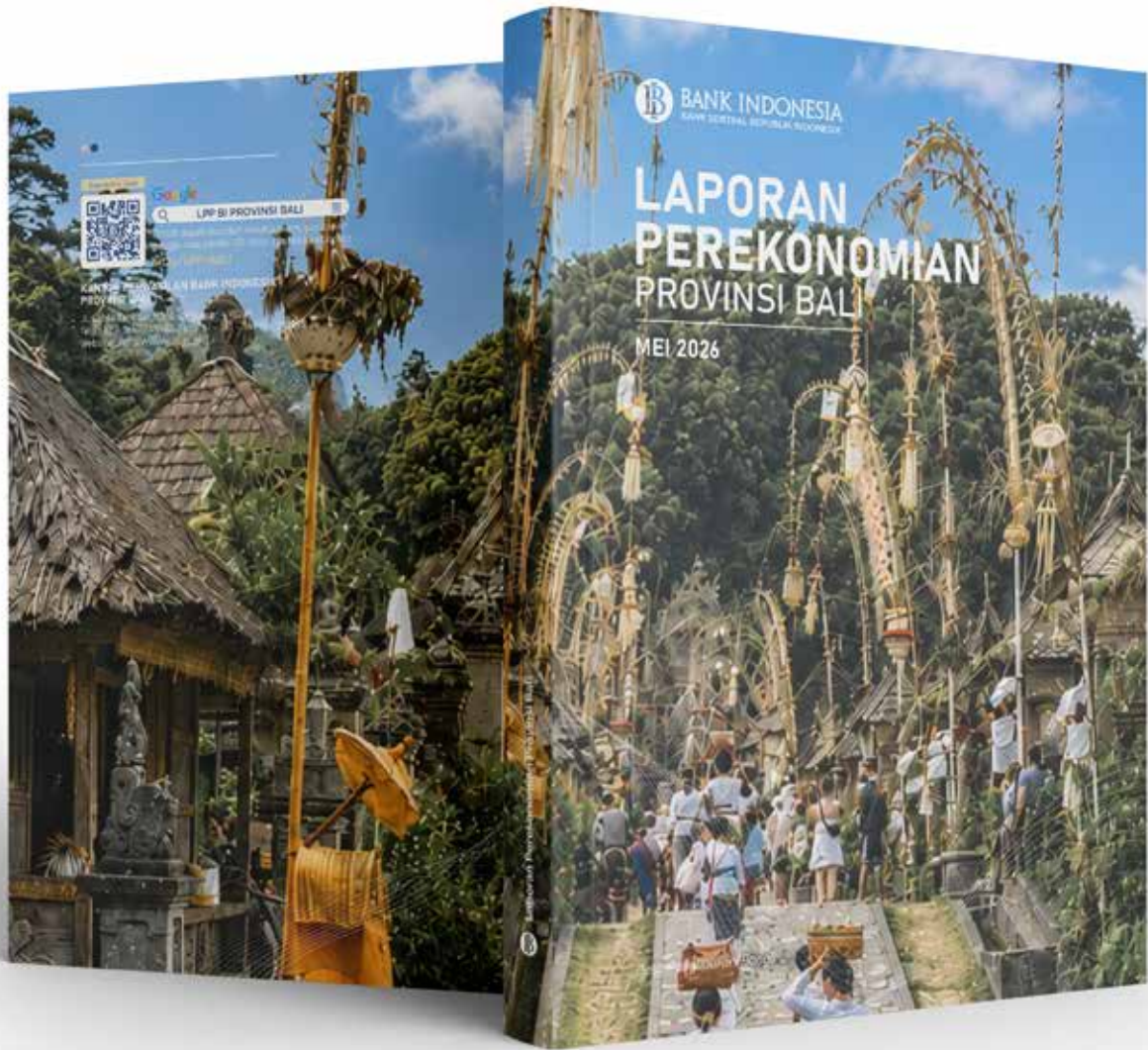
Denpasar, Juni 2026

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BALI

TTD

Achris Sarwani

Direktur



DAFTAR ISI

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH 1

1.1.	KINERJA PEREKONOMIAN BALI TRIWULAN I 2026	2
1.2.	PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI PENGELUARAN	3
1.2.1.	KONSUMSI	3
1.2.2.	PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	5
1.2.3.	EKSPOR DAN IMPOR	6
1.3.	PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI LAPANGAN USAHA	7
1.3.1.	PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM	7
1.3.2.	PERDAGANGAN	8
1.3.3.	TRANSPORTASI	8
1.3.4.	KONSTRUKSI	9
1.3.5.	PERTANIAN	10

BAB II PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 19

2.1.	PERKEMBANGAN INFLASI	18
2.2.	INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA	19
2.3.	INFLASI MENURUT KOTA	24
2.4.	KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI	27
2.5.	TRACKING INFLASI TRIWULAN II 2026	29

BAB III STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PERKEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 37

3.1.	KINERJA PERBANKAN	38
3.1.1.	DANA PIHAK KETIGA	38
3.1.2.	PENYALURAN KREDIT	40
3.1.3.	LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)	42
3.2.	KINERJA KEUANGAN KORPORASI	43
3.2.1.	SUMBER KERENTANAN KORPORASI	43
3.2.2.	KONDISI PERKEMBANGAN KORPORASI	43
3.2.3.	PENYALURAN KREDIT KORPORASI	44
3.3.	KINERJA KEUANGAN RUMAH TANGGA	45
3.3.1.	SUMBER KERENTANAN RUMAH TANGGA	45
3.3.2.	PERKEMBANGAN TINGKAT KEYAKINAN RUMAH TANGGA	45
3.3.3.	PENYALURAN KREDIT RUMAH TANGGA	46
3.3.3.1.	PENYALURAN KPR DAN KPA	46
3.3.3.2.	PENYALURAN KKB DAN KREDIT MULTIGUNA	47
3.4.	AKSES KEUANGAN DAN UMKM	48
3.4.1.	ASESMEN KREDIT UMKM	48
3.4.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM DAN EKONOMI SYARIAH	48

BAB IV **PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH**

53

4.1.	PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DI PROVINSI BALI	54
4.2.	PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DI PROVINSI BALI	55
4.2.1.	SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA	55
4.2.2.	SISTEM PEMBAYARAN RETAIL	56
4.3.	PERKEMBANGAN TRANSAKSI KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB) DI BALI	58
4.4.	UPAYA DALAM MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN	59
4.4.1.	SISTEM PEMBAYARAN TUNAI	59
4.4.2.	SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI	60

BAB V **KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN**

69

5.1.	KETENAGAKERJAAN	70
5.2.	KESEJAHTERAAN	73
5.2.1.	PERKEMBANGAN ANGKA KEMISKINAN	73
5.2.2.	KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN	73
5.2.3.	KETIMPANGAN PENDAPATAN PENDUDUK	75
5.2.4.	PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI	75
5.2.5.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	76

BAB VI **PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH**

79

6.1.	PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA DAN NASIONAL	80
6.1.1.	PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA 2026	80
6.1.2.	PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2026	81
6.2.	PRAKIRAAN DAN RISIKO PERTUMBUHAN EKONOMI BALI 2026	82
6.2.1.	PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI	82
6.2.2.	RISIKO PERTUMBUHAN EKONOMI	84
6.2.3.	PRAKIRAAN INFLASI	84



BOKS

BOKS 1 <u>PENGUATAN KETAHANAN PASOKAN PANGAN UNTUK MITIGASI RISIKO EL NINO</u>	12
BOKS 2 PROGRAM SINAR PANGAN TPID KABUPATEN KLUNGKUNG: SINERGI PENGENDALIAN INFLASI HARGA PANGAN MELALUI INTEGRASI EKOSISTEM HULU-HILIR	32
BOKS 3 POTENSI QRIS CROSS BORDER UNTUK MENINGKATKAN BELANJA WISMAN TIONGKOK	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perkembangan Ekonomi Bali dan Nasional	2
Grafik 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Indonesia Triwulan I 2026	2
Grafik 1.3.	Perkembangan Ekspektasi Konsumen di Provinsi Bali	4
Grafik 1.4.	Perkembangan Penyaluran Kredit RT di Provinsi Bali	4
Grafik 1.5.	Perkembangan Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali	4
Grafik 1.6.	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali	4
Grafik 1.7.	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Bali	4
Grafik 1.8.	Perkembangan Kredit Investasi Provinsi Bali	5
Grafik 1.9.	Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	5
Grafik 1.10.	Perkembangan Penanaman Dalam Negeri (PMDN)	5
Grafik 1.11.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali	6
Grafik 1.12.	Nilai Ekspor Barang Nonmigas Provinsi Bali	6
Grafik 1.13.	Perkembangan Nilai Impor Barang	7
Grafik 1.14.	Pertumbuhan Impor Barang Berdasarkan Klasifikasi <i>Broad Economic Categories</i> (BEC)	7
Grafik 1.15.	Perkembangan TPK Hotel Bintang di Bali	8
Grafik 1.16.	Perkembangan Omzet Survei Penjualan Eceran Provinsi Bali	8
Grafik 1.17.	Perkembangan Lalu Lintas Penumpang Pesawat ke Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai	9
Grafik 1.18.	Perkembangan Jumlah Keberangkatan Kargo domestik Melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai	9
Grafik 1.19.	Realisasi Pengadaan Semen di Bali	10
Grafik 1.20.	Perkembangan Kredit Konstruksi di Bali	10
Grafik 1.21.	Produksi Padi di Bali	10
Grafik 1.22.	Kredit Pertanian	10
Grafik 1.23.	Kredit Perikanan	10
Grafik B1.1.	Monitoring dan Prediksi ENSO	13
Grafik 2.1.	Inflasi Provinsi Bali* (%yoy)	18
Grafik 2.2.	Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali* (%yoy)	19
Grafik 2.3.	Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Provinsi Bali*	19
Grafik 2.4.	Perkembangan Harga Minyak Goreng (Rp/Liter)	19
Grafik 2.5.	Perkembangan Harga Beras (Rp/Kg)	19
Grafik 2.6.	Frekuensi Cuaca Ekstrim	20
Grafik 2.7.	Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Provinsi Bali* (%; avg-mtm)	20
Grafik 2.8.	Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Provinsi Bali* (%; yoy)	20
Grafik 2.9.	Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Provinsi Bali* (%; avg-mtm)	20
Grafik 2.10.	Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Provinsi Bali (%; yoy)	20
Grafik 2.11.	Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	21
Grafik 2.12.	Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali (%; yoy)	21
Grafik 2.13.	Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	21
Grafik 2.14.	Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali (%; yoy)	21
Grafik 2.15.	Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	22
Grafik 2.16.	Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali (%; yoy)	22
Grafik 2.17.	Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di	

Provinsi Bali (%; avg-mtm)	22
Grafik 2.18. Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%; yoy)	22
Grafik 2.19. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	23
Grafik 2.20. Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%; yoy)	23
Grafik 2.21. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	23
Grafik 2.22. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (%; yoy)	23
Grafik 2.23. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	24
Grafik 2.24. Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (%; yoy)	24
Grafik 2.25. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (%; avg-mtm)	24
Grafik 2.26. Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (%; yoy)	24
Grafik 2.27. Perkembangan Pertumbuhan Penjualan Eceran Konsumsi Rumah Tangga	29
Grafik 2.28. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen	29
Grafik B2.1. Alur Integrasi Ekosistem Hulu-Hilir Program SINAR PANGAN	34
Grafik 3.1. Perkembangan Aset Perbankan	38
Grafik 3.2. Perkembangan DPK Perbankan	39
Grafik 3.3. Pangsa Kepemilikan DPK	39
Grafik 3.4. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Kepemilikan	39
Grafik 3.5. Perkembangan DPK Perseorangan dan Indeks Penghasilan Saat Ini	39
Grafik 3.6. Perkembangan DPK Perseorangan dan Skala <i>Likert</i> Penjualan Domestik	39
Grafik 3.7. Total Nominal dan Pertumbuhan DPK Kabupaten/Kota	40
Grafik 3.8. Proporsi DPK Kabupaten/Kota Sentra Pariwisata dan Non-Pariwisata	40
Grafik 3.9. Perkembangan Kinerja Penyaluran Kredit Perbankan	40
Grafik 3.10. Perkembangan Skala <i>Likert</i> Persediaan, Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Konsumsi RT	40
Grafik 3.11. Pangsa masing-masing kategori kredit di Provinsi Bali	41
Grafik 3.12. Perkembangan Kredit Sektoral	41
Grafik 3.13. Perkembangan NPL Kredit	41
Grafik 3.14. Perkembangan Perbandingan NPL dan LAR Kredit	41
Grafik 3.15. Perkembangan LAR Kredit	41
Grafik 3.16. Total Nominal dan Pertumbuhan Kredit Kabupaten/Kota	42
Grafik 3.17. Proporsi Penyaluran Kredit Kabupaten/Kota Sentra Pariwisata dan Non-Pariwisata	42
Grafik 3.18. Perkembangan LDR	42
Grafik 3.19. Perkembangan Wisatawan Mancanegara ke Bali	43
Grafik 3.20. Perkembangan Skala <i>Likert</i> Penjualan Domestik dan Penjualan Ekspor	43
Grafik 3.21. Kondisi Rentabilitas Korporasi	44
Grafik 3.22. Kondisi Likuiditas Korporasi	44
Grafik 3.23. Kondisi Akses Kredit Korporasi	44
Grafik 3.24. Perkembangan Kredit Korporasi	44
Grafik 3.25. Perkembangan Kredit Korporasi Sektoral	44
Grafik 3.26. Perkembangan NPL Kredit Korporasi	45
Grafik 3.27. Pangsa Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Periode Februari 2025	45

Grafik 3.28. Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)	45
Grafik 3.29. Perkembangan Kredit RT	46
Grafik 3.30. Perkembangan NPL Kredit RT	46
Grafik 3.31. Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	48
Grafik 3.32. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral	48
Grafik 3.33. Perkembangan NPL Kredit UMKM Sektoral	48
Grafik 4.1. Aliran Uang Kartal di Provinsi Bali	54
Grafik 4.2. Pecahan Inflow & Outflow serta Temuan Uang Yang diragukan Keasliannya di Provinsi Bali	55
Grafik 4.3. Perkembangan Nominal Transaksi BI- FAST	55
Grafik 4.4. Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST	55
Grafik 4.5. Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Bali	55
Grafik 4.6. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Bali	56
Grafik 4.7. Perkembangan Vol. Transaksi SKNBI Bali	56
Grafik 4.8. Nilai Nominal Transaksi SKNBI di Bali	56
Grafik 4.9. Nilai Nominal Transaksi SKNBI di Bali	57
Grafik 4.10. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Bali	57
Grafik 4.11. Volume Transaksi Kartu ATM/debit Berdasarkan Jenis Transaksi	57
Grafik 4.12. Volume Transaksi Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi	57
Grafik 4.13. Perkembangan Nominal Transaksi UE Bali	57
Grafik 4.14. Perkembangan Transaksi UE di Bali	57
Grafik 4.15. Volume Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Jenis Transaksi	58
Grafik 4.16. Perkembangan Transaksi QRIS di Bali	58
Grafik 4.17. Perkembangan Jumlah Merchant dan Pengguna QRIS di Bali	58
Grafik 4.18. Nominal Transaksi QRIS CB	59
Grafik 4.19. Volume Transaksi QRIS CB	59
Grafik 4.20. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Bali	59
Grafik 4.21. Transaksi Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Triwulan 1 Tahun 2026 di Bali Berdasarkan Mata Uang	59
Grafik B3.1. Transaksi QRIS Cross Border Provinsi	65
Grafik B3.2. Sebaran asal negara Wisman Prov. Bali	65
Gambar B3.1. Upaya Perluasan QRIS Cross Border	66
Grafik 5.1. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama pada Februari 2026	72
Grafik 5.2. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal	72
Grafik 5.3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Penduduk di Provinsi Bali	74
Grafik 5.4. Perkembangan Rasio Gini Bali dan Nasional	75
Grafik 5.5. Distribusi Pendapatan per Kapita Penduduk	75
Grafik 5.6. Perkembangan NTP Bali dan Nasional	75
Grafik 5.7. Perkembangan NTP Bali	75
Grafik 5.8. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)	76
Grafik 5.9. Perbandingan IPM Bali dengan Nasional	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Pengeluaran (%. yoy)	3
Tabel 1.2.	Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I 2026 Sisi Lapangan Usaha (%. yoy)	7
Tabel B1.1.	Rencana Mitigasi Risiko El Nino	14
Tabel 2.1.	Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran	25
Tabel 2.2.	Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran	26
Tabel 2.3.	Perkembangan Inflasi Kabupaten Tabanan per Kelompok Pengeluaran	26
Tabel 2.4.	Perkembangan Inflasi Kabupaten Badung per Kelompok Pengeluaran	27
Tabel 2.5.	Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar di Provinsi Bali Periode Semester I 2026	28
Tabel B2.1.	Ringkasan Dukungan Program SINAR PANGAN dari Hulu Hingga Hilir untuk Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan	34
Tabel 3.1.	Perkembangan Kredit KPR+KPA	47
Tabel 3.2.	Perkembangan NPL Kredit KPR+KPA	47
Tabel 3.3.	Perkembangan Kredit KKB dan Kredit Multiguna	47
Tabel 3.4.	Perkembangan NPL Kredit KKB dan Kredit Multiguna	47
Tabel 5.1.	Tabel Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Bali	70
Tabel 5.2.	Penduduk Bali yang Bekerja Menurut LU (Ribu Orang)	71
Tabel 5.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali Menurut Pendidikan	71
Tabel 5.4.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan	71
Tabel 5.5.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (dalam %)	72
Tabel 5.6.	Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bali 2021 – 2025	74
Tabel 5.7.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	74
Tabel 6.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	81

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tumbuh kuat namun melambat dibanding triwulan sebelumnya yakni sebesar 5,58% (yoy).

Inflasi IHK di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 sebesar 2,81% (yoy) dan masih terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2026

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tumbuh kuat sebesar 5,58% (yoy). Meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,88%; yoy), capaian ini lebih rendah dibandingkan nasional. Dari sisi penawaran, sumber pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari Lapangan Usaha (LU) Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin), LU Administrasi Pemerintahan, dan LU Perdagangan Besar seiring seiring kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh positif, meningkatnya belanja pegawai dan belanja modal APBN maupun APBD, dan terjaganya daya beli masyarakat ditengah perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi Bali masih ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga (RT), Konsumsi Pemerintah, Ekspor Luar Negeri, dan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sejalan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi pada periode HBKN Nyepi, Idulfitri, dan Imlek.

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi IHK di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 sebesar 2,81% (yoy), menurun dari triwulan IV 2025 (2,91%; yoy), dan masih terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Tekanan inflasi pada triwulan I 2026 tersebut didorong oleh peningkatan permintaan menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri. Berdasarkan kelompok inflasi, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang inflasi tertinggi; diikuti oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara spasial, Singaraja mengalami inflasi tahunan (yoy) paling tinggi, sementara Kabupaten Badung mencatat inflasi tahunan (yoy) yang paling rendah.

Selanjutnya pada triwulan II 2026, Inflasi Bali diperkirakan meningkat dibandingkan realisasi triwulan I 2026, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar 2,5±1% (yoy). Peningkatan tersebut terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring faktor musiman berupa peralihan musim hujan ke musim kemarau hingga akhir triwulan II 2026 yang berpotensi menghambat produksi sejumlah hortikultura. Selain itu, tekanan inflasi juga bersumber dari meningkatnya permintaan canang sari dan bahan pangan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Lebih lanjut, sinergi TPID di Bali dalam mengimplementasikan kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tetap terjaga. Hal ini tercermin dari peningkatan penyaluran kredit, terutama pada sektor-sektor utama pendorong ekonomi Bali. Otoritas bersama perbankan di Bali terus berupaya menjaga momentum tersebut melalui optimalisasi fungsi intermediasi, dengan tetap memastikan risiko kredit tetap terkendali. Dengan kondisi tersebut, masih tersedia ruang yang cukup luas untuk mendorong penyaluran kredit di tengah risiko kredit yang relatif rendah, khususnya dalam rangka diversifikasi dan pemerataan pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan penyaluran jenis kredit, peningkatan pertumbuhan kredit tersebut utamanya didorong oleh akselerasi kredit investasi yang mencerminkan mulai meningkatnya aktivitas usaha dan ekspansi bisnis, di tengah prospek ekonomi yang tetap terjaga. Hal ini juga turut mengindikasikan peningkatan keyakinan pelaku usaha untuk melakukan pengembangan usaha dan penambahan kapasitas produksi.

Selanjutnya, kredit UMKM terus tumbuh dengan pangsa pembiayaan yang tetap tinggi. Peran UMKM menjadi krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga keberlanjutan kinerja perekonomian Bali secara keseluruhan. Ke depan, penguatan pembiayaan lintas sektor, khususnya pada sektor produktif di luar pariwisata, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan daerah sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian Bali secara berkelanjutan.

PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pada triwulan I 2026, aliran uang kartal perbankan di Provinsi Bali mencatat posisi net inflow sebesar Rp1,76 triliun. Berakhirnya momentum HBKN Nataru serta liburan awal tahun mendorong net inflow pasca tingginya transaksi masyarakat pada momen tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang secara keseluruhan melambat pada triwulan I 2026 juga sejalan dengan tingkat kebutuhan uang masyarakat yang relatif tidak setinggi triwulan sebelumnya. Kondisi ini juga sejalan dengan pola siklikal dimana pada triwulan I, kecenderungan aliran uang kartal perbankan mengalami outflow.

Kemudian, velositas pada sistem pembayaran nontunai terus mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Pada layanan

Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tetap terjaga dengan risiko kredit yang tetap terkendali. Ke depan, optimalisasi pembiayaan lintas sektor, khususnya pada sektor produktif di luar pariwisata, akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian Bali secara berkelanjutan.

Velositas sistem pembayaran Provinsi Bali tetap tumbuh pada triwulan I 2026.

BI-FAST, pertumbuhan nominal dan volume transaksi terus tumbuh menjadikan BI-Fast sebagai salah satu kanal yang paling diminati dalam transaksi digital. Sementara itu, transaksi pada SKNBI dan BI-RTGS mengalami perbaikan. Peningkatan velositas transaksi juga tercermin dari tumbuhnya transaksi ATM/debit, kartu kredit, serta Uang Elektronik (UE), disertai akselerasi penggunaan QRIS yang semakin meluas seiring meningkatnya adopsi digital di masyarakat.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali secara konsisten memperkuat perannya dalam menjaga keandalan sistem pembayaran, baik berbasis tunai maupun digital, guna menunjang aktivitas perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Dorongan terhadap peningkatan penggunaan transaksi nontunai terus diakselerasi melalui kerja sama erat dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat. Inisiatif ini melibatkan institusi keuangan, kalangan pendidikan, generasi muda, serta masyarakat luas, dengan harapan dapat menciptakan proses transaksi yang lebih praktis dan aman, sekaligus memperluas akses keuangan serta membangun ekosistem pembayaran yang semakin modern dan inklusif di Bali.

Selanjutnya, kredit UMKM terus mencatatkan pertumbuhan dengan pangsa pembiayaan yang tetap tinggi. Peran UMKM menjadi krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga keberlanjutan perekonomian Bali secara keseluruhan. Ke depan, penguatan pembiayaan lintas sektor, khususnya pada sektor produktif di luar pariwisata, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan daerah sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian Bali secara berkelanjutan.

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali terus menunjukkan level yang baik, didorong oleh pertumbuhan ekonomi Bali yang solid pada triwulan I 2026.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali berada pada level yang baik, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang solid pada triwulan I 2026. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten terjaga rendah. Tren ini didukung oleh terciptanya lapangan kerja baru di sejumlah lapangan usaha (LU), dengan pertumbuhan penambahan jumlah tenaga kerja terbesar tercatat pada LU Transportasi, Penyediaan Akmamin, Perdagangan, dan Konstruksi.

Lebih lanjut, secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di Bali lebih baik dibandingkan kondisi nasional, tecermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih rendah dibandingkan nasional, meski secara nilai meningkat dibandingkan indeks tahun sebelumnya. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan tidak hanya pada jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada ketimpangan dan intensitas kemiskinan itu sendiri. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada 2025 mencatat kenaikan dan tetap berada di atas rata-rata nasional yang mencerminkan kualitas hidup yang terus membaik.

PROSPEK PEREKONOMIAN BALI

Perekonomian Bali pada tahun 2026 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,4–5,9% (yoy) di tengah gejolak geopolitik global, yang lebih tinggi dibandingkan proyeksi PDB nasional pada rentang 4,9–5,7% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh menguatnya kinerja LU Pertanian, Konstruksi, Perdagangan, serta tetap solidnya kinerja LU Akomodasi, Makan dan Minum dan LU Transportasi dan Pergudangan. LU Pertanian diperkirakan tumbuh menguat utamanya sejalan dengan berlanjutnya program swasembada pangan dan semakin meluasnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih lanjut, Kinerja LU Konstruksi diperkirakan menguat seiring dengan tetap tingginya proyek konstruksi terkait sektor pariwisata, berlanjutnya proyek strategis multitalahun, dan dimulainya proyek strategis nasional yakni konstruksi Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PSN PPN) Pengambangan. Kinerja LU terkait pariwisata diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan kendati sedikit termoderasi akibat gejolak geopolitik global.

Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% di tengah Konflik Timur Tengah yang menyebabkan gejolak harga minyak dunia khususnya avtur global. Sinergi antara Pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha ke depannya terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama. Dengan kinerja sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya tahan, serta inflasi yang tetap terkendali, ekonomi Bali mampu berdaya tahan di tengah gejolak global.

Perekonomian Bali pada tahun 2026 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,4–5,9% (yoy).

Lebih lanjut, tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%.

PERTUMBUHAN EKONOMI (% , yoy)

INDIKATOR	2024				2024	2025				2025	2026
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (% , yoy)											
A. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	5.97	5.36	5.44	5.19	2.51	5.59	5.95	5.88	5.86	5.82	5.58
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.64	3.92	3.00	0.61	1.36	5.17	-0.30	1.97	0.25	1.70	2.36
Pertambangan dan Penggalian	0.50	1.53	2.42	0.95	5.19	0.81	1.26	0.12	0.66	0.71	3.01
Industri Pengolahan	-0.14	1.23	11.00	9.37	11.78	-0.06	3.28	4.72	7.71	3.94	8.93
Pengadaan Listrik dan Gas	11.46	11.34	15.23	9.50	1.25	8.59	1.97	5.12	3.93	4.88	0.22
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.65	0.17	-3.92	4.57	1.82	3.83	3.81	1.55	0.97	2.51	4.13
Konstruksi	1.64	1.31	0.02	4.24	3.95	3.09	6.28	4.12	2.84	4.06	4.87
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.32	3.75	2.67	5.01	5.99	5.38	8.43	6.83	5.97	6.65	7.25
Transportasi dan Pergudangan	7.33	6.74	3.82	6.30	11.90	6.78	7.30	6.26	5.53	6.46	5.56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.98	12.66	12.04	10.14	1.91	7.21	13.76	10.94	8.90	10.25	6.44
Informasi dan Komunikasi	1.21	1.40	2.51	2.50	15.06	2.67	4.22	5.64	5.99	4.65	3.98
Jasa Keuangan dan Asuransi	19.64	19.34	16.09	5.85	1.73	6.65	0.32	-5.09	6.70	1.98	-5.01
Real Estate	0.41	2.16	1.84	2.42	6.64	1.98	4.28	2.61	1.82	2.67	3.85
Jasa Perusahaan	5.77	6.37	6.92	7.43	7.29	5.94	7.89	9.74	7.61	7.84	4.95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18.60	2.97	3.75	6.61	1.40	20.26	3.62	9.37	12.14	10.99	16.67
Jasa Pendidikan	2.52	0.94	1.21	1.04	2.36	5.63	3.47	9.39	7.89	6.55	7.7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.60	1.97	2.24	2.66	6.16	4.71	4.61	6.97	8.51	6.21	6.98
Jasa lainnya	5.42	5.76	5.82	7.55	2.51	5.20	7.27	7.90	5.10	6.38	4.86
B. Berdasarkan Pengeluaran:	5.92	5.43	5.45	5.19	5.49	5.59	5.95	5.88	5.86	5.82	5.58
1. Pengeluaran Konsumsi	7.52	3.96	5.70	4.82	5.44	5.21	3.40	4.86	6.33	4.97	6.67
1 a. Konsumsi Rumah Tangga	4.33	4.09	5.46	4.73	4.65	5.31	5.54	5.20	5.85	5.47	5.02
1 b. Konsumsi LNPRT	80.93	10.67	14.53	10.44	27.04	-19.04	9.75	8.90	-6.99	-3.97	6.40
1 c. Konsumsi Pemerintah	19.68	2.41	5.66	4.36	6.37	13.47	-8.37	2.29	10.73	3.90	20.28
2. Investasi	8.58	9.12	0.44	4.74	5.54	3.57	6.55	7.54	5.95	6.13	7.67
2 a. PMTB	8.23	8.55	1.92	4.19	5.56	5.13	6.61	6.12	5.47	6.03	6.78
2 b. Perubahan Inventori	56.62	103.21	-267.28	-55.10	-4.53	-143.22	1.07	-148.33	-116.04	60.29	-197.83
3. Neraca Perdagangan Bersih											
3 a. Ekspor Luar Negeri	24.39	17.47	9.14	15.67	16.00	6.55	13.47	7.54	5.43	8.21	2.84
3 b. Impor Luar Negeri	16.94	6.50	10.01	18.61	12.93	0.93	8.46	9.81	6.13	6.28	15.14
3 c. Net Ekspor Antar Daerah	37.80	21.77	5.38	14.05	17.43	5.41	9.95	6.75	6.31	7.10	4.83
C. Ekspor											
Nilai Ekspor Barang Nonmigas (USD Juta)	163.15	150.57	155.22	150.19	619.12	154.36	124.51	126.56	151.11	556.55	138.98
Nilai Ekspor Barang Nonmigas (% , yoy)	-27.58	9.02	16.53	-2.30	-4.79	-5.39	-17.31	-18.46	0.61	-40.54	-9.97
D. Impor											
Nilai Impor Barang Nonmigas (USD Juta)	40.54	37.48	37.51	46.20	161.73	31.49	33.21	50.18	44.25	159.13	34.68
Nilai Impor Barang Nonmigas (% , yoy)	52.61	21.69	19.77	54.38	36.36	-22.33	-11.38	33.77	-4.21	-4.15	10.14
E. Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy)	3.67	2.71	2.67	2.35	2.35	1.89	2.94	2.51	2.91	2.91	2.99

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU/ ADHB (Rp miliar)

INDIKATOR	2024				2024	2025				2025	2026
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
EKONOMI MAKRO REGIONAL (ATAS DASAR HARGA BERLAKU)											
Produk Domestik Regional Bruto (Rp Miliar)											
A. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	69,613	74,756	75,722	78,348	298,440	75,494	81,371	82,235	85,048	324,149	82,213
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,365	10,118	10,002	10,585	40,070	10,277	10,528	10,647	11,077	42,529	10,961
Pertambangan dan Penggalian	610	631	653	656	2,550	633	661	680	678	2,652	672
Industri Pengolahan	4,536	4,637	4,714	4,778	18,665	4,700	4,984	5,117	5,384	20,185	5,337
Pengadaan Listrik dan Gas	177	177	173	191	717	191	182	184	203	761	197
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	111	112	116	119	459	119	120	121	124	483	128
Konstruksi	6,508	6,708	6,958	7,389	27,563	6,842	7,262	7,386	7,763	29,253	7,409
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,046	6,300	6,513	7,034	25,893	6,534	7,046	7,188	7,683	28,451	7,235
Transportasi dan Pergudangan	7,187	7,654	8,027	7,755	30,623	7,663	8,288	8,619	8,486	33,056	8,661
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,357	15,812	16,675	17,022	63,866	15,974	18,489	18,942	18,795	72,200	17,225
Informasi dan Komunikasi	3,919	3,972	4,076	4,134	16,101	4,061	4,164	4,297	4,385	16,908	4,237
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,753	3,927	4,065	3,711	15,455	4,088	4,020	3,937	4,060	16,105	3,985
Real Estate	2,682	2,837	2,903	3,028	11,449	2,808	3,063	3,075	3,166	12,113	3,004
Jasa Perusahaan	796	866	881	902	3,445	863	962	996	999	3,820	935
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,293	4,065	3,479	4,118	14,956	4,007	4,237	3,813	4,609	16,666	4,764
Jasa Pendidikan	3,350	3,766	3,421	3,707	14,244	3,600	3,938	3,857	4,114	15,509	4,057
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,700	1,837	1,727	1,821	7,086	1,819	1,955	1,891	2,018	7,683	1,995
Jasa lainnya	1,223	1,337	1,340	1,397	5,297	1,314	1,472	1,485	1,505	5,776	1,412
B. Berdasarkan Pengeluaran:	69,613	74,756	75,722	78,348	298,453	75,494	81,371	82,235	85,048	324,149	82,213
1. Pengeluaran Konsumsi	45,089	48,178	48,160	51,477	192,903	48,469	50,394	51,838	56,162	207,406	
1. a. Konsumsi Rumah Tangga	38,369	38,984	39,508	40,386	157,247	41,323	42,136	42,814	43,955	170,228	44,521
1. b. Konsumsi LNPRT	1,786	1,162	1,228	1,541	5,717	1,473	1,300	1,374	1,471	5,618	1,615
1. c. Konsumsi Pemerintah	4,934	8,032	7,424	9,550	29,939	5,677	7,499	7,650	10,735	31,560	6,897
2. Investasi	19,404	20,610	20,876	22,322	83,212	20,440	22,253	22,776	24,118	89,715	
2. a. PMTB	19,136	20,313	21,112	22,435	83,018	20,684	21,951	22,655	24,089	89,380	22,997
2. b. Perubahan Inventori	258	291	(244)	(113)	193	-115	302	121	29	336	124
3. Neraca Perdagangan Bersih	5,130	5,974	6,695	4,549	22,348	6,453	8,184	7,621	4,768	27,027	6,057
3. a. Total Ekspor	37,939	41,598	46,219	45,402	171,158	42,036	49,781	49,849	48,378	190,043	44,838
3. b. Total Impor	32,809	35,624	39,524	40,853	148,810	35,582	41,596	42,228	43,610	163,016	38,781

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA KONSTAN/ ADHK (Rp miliar)

INDIKATOR	2024				2024 I	2025				2025	2026 I
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
EKONOMI MAKRO REGIONAL (ATAS DASAR HARGA KONSTAN)											
Produk Domestik Regional Bruto (Rp Miliar)											
A. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	39.719	42.236	42.413	43.831	168,199	41.938	44.748	44.906	46.401	177,993	44,279
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.117	5.474	5.348	5.647	21,587	356	370	378	374	21,954	5,509
Pertambangan dan Penggalian	353	365	377	372	1,467	356	370	378	374	1,478	367
Industri Pengolahan	2.708	2.754	2.773	2.787	11,022	2.706	2.845	2.904	3.002	11,457	2,948
Pengadaan Listrik dan Gas	98	98	96	105	396	106	100	101	110	416	106
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	83	83	85	87	338	86	86	86	88	346	89
Konstruksi	4.009	4.120	4.266	4.491	16,885	4.132	4.379	4.441	4.618	17,571	4,334
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.818	3.946	4.078	4.364	16,205	4.023	4.279	4.356	4.624	17,282	4,315
Transportasi dan Pergudangan	2.540	2.689	2.781	2.707	10,718	2.712	2.885	2.956	2.857	11,410	2,863
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.270	7.900	8.256	8.341	31,767	7.794	8.987	9.160	9.084	35,024	8,296
Informasi dan Komunikasi	3.210	3.242	3.298	3.354	13,104	3.296	3.379	3.484	3.555	13,714	3,427
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.157	2.236	2.305	2.106	8,804	2.300	2.244	2.187	2.247	8,978	2,185
Real Estate	1.869	1.963	1.993	2.065	7,890	1.906	2.047	2.045	2.102	8,101	1,980
Jasa Perusahaan	484	522	531	539	2,076	513	563	582	580	2,239	538
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.024	2.473	2.140	2.535	9,171	2.434	2.562	2.340	2.843	10,179	2,840
Jasa Pendidikan	2.157	2.406	2.188	2.350	9,102	2.279	2.490	2.393	2.536	9,698	2,454
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.090	1.170	1.103	1.155	4,518	1.142	1.224	1.179	1.253	4,798	1,221
Jasa lainnya	732	796	796	825	3,149	770	853	859	867	3,349	808
B. Berdasarkan Pengeluaran:	39.719	42.236	42.413	43.831	168,199	41.937,95	44.748,20	44.905,64	46.401,16	177,993	44,279
1. Pengeluaran Konsumsi	26.887	28.485	28.551	30.211	114,134	28.288	29.453	29.939	32.123	119,803	30,200
1. a. Konsumsi Rumah Tangga	23.076	23.226	23.635	24.005	93,942	24.300	24.513	24.863	25.409	99,085	25,520
1. b. Konsumsi LNPRT	1.041	671	710	886	3,308	843	737	773	824	3,176	896
1. c. Konsumsi Pemerintah	2.770	4.588	4.206	5.319	16,884	3.146	4.204	4.302	5.890	17,542	3,783
2. Investasi	11.720	12.332	12.452	13.298	49,801	12.214	13.139	13.412	14.089	52,853	13,150
2. a. PMTB	11.597	12.194	12.566	13.350	49,708	12.267	13.000	13.357	14.080	52,704	13,098
2. b. Perubahan Inventori	123	137	-114	-52	93	-53	139	55	8	149	52
3. Neraca Perdagangan Bersih	1,113	1,419	1,410	322	4,264	1,436	2,156	1,554	190	5,337	929
3. a. Total Ekspor	22.059	24.015	26.483	25.768	98,326	23.500	27.455	27.419	26.344	104,718	24,159
3. b. Total Impor	20.946	22.596	25.074	25.446	94,062	22.064	25.298	25.865	26.154	99,381	23,229

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA (% yoy)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA (%YOY)														
Jembrana (% yoy)	6.11	5.69	6.05	6.19	5.96	5.28	5.59	5.56	-4.98	-0.65	2.98	3.66	4.98	5.26
Tabanan (% yoy)	6.12	6.45	6.53	6.19	6.14	5.37	5.71	5.58	-6.17	-1.97	2.94	3.56	4.94	5.45
Badung (% yoy)	7.64	6.82	6.98	6.24	6.81	6.08	6.73	5.81	-16.55	-6.74	9.97	11.29	5.94	6.26
Gianyar (% yoy)	7.08	6.82	6.80	6.30	6.31	5.46	6.01	5.62	-8.40	-1.07	4.04	5.06	5.47	5.89
Klungkung (% yoy)	6.25	6.05	5.98	6.11	6.28	5.32	5.48	5.42	-6.38	-0.23	3.12	4.70	5.08	5.67
Bangli (% yoy)	6.20	5.94	5.83	6.16	6.24	5.31	5.48	5.45	-4.10	-0.33	2.79	3.50	4.54	5.31
Karangasem (% yoy)	5.93	6.16	6.01	6.00	5.92	5.06	5.44	5.50	-4.49	-0.56	2.58	3.10	4.33	5.25
Buleleng (% yoy)	6.78	7.15	6.96	6.07	6.02	5.38	5.60	5.51	-5.80	-1.22	3.11	3.64	5.04	5.54
Denpasar (% yoy)	7.51	6.96	7.00	6.14	6.51	6.05	6.42	5.82	-9.43	-0.91	5.02	5.69	5.55	6.11

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU/ ADHB (Rp miliar)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EKONOMI REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA (ATAS DASAR HARGA BERLAKU)														
Jembrana	6.973	7.770	9.020	10.198	11.168	12.116	13.137	14.137	13.439	13.510	14.532	15.612	16.845	18.236
Tabanan	11.470	12.967	15.066	16.996	18.630	20.377	22.128	23.796	22.258	22.010	23.681	25.530	27.649	29.983
Badung	27.201	31.790	37.273	42.429	47.208	52.344	57.791	62.836	49.014	44.804	55.290	68.397	75.098	81.663
Gianyar	13.605	15.368	17.909	20.140	22.113	24.224	26.460	28.520	25.865	25.836	27.944	30.529	33.046	36.116
Klungkung	4.398	4.900	5.676	6.426	7.112	7.785	8.459	9.100	8.451	8.529	9.210	10.080	11.015	12.003
Bangli	3.363	3.779	4.382	4.946	5.457	5.977	6.490	6.994	6.716	6.799	7.338	7.908	8.465	9.155
Karangasem	8.232	9.293	10.785	12.233	13.411	14.598	15.886	17.087	16.408	16.488	17.669	18.974	20.120	21.084
Buleleng	16.927	19.144	22.355	25.170	27.690	30.319	32.927	35.362	33.306	33.337	35.805	38.351	41.387	45.120
Denpasar	25.819	29.389	34.210	38.424	42.384	46.836	51.375	55.456	49.559	49.588	54.650	60.100	65.300	71.099

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA KONSTAN/ ADHK (Rp miliar)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EKONOMI REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA (ATAS DASAR HARGA KONSTAN)														
Jembrana	6.366	6.728	7.135	7.576	8.028	8.452	8.924	9.420	8.951	8.893	9.158	9.492	9.965	10.488
Tabanan	10.500	11.178	11.908	12.645	13.421	14.142	14.949	15.783	14.809	14.517	14.942	15.472	16.236	17.121
Badung	24.028	25.667	27.458	29.170	31.157	33.052	35.275	37.326	31.148	29.050	31.947	35.554	37.667	40.025
Gianyar	12.509	13.361	14.269	15.169	16.125	17.005	18.027	19.041	17.442	17.255	17.957	18.865	19.896	21.067
Klungkung	4.036	4.280	4.536	4.813	5.116	5.388	5.683	5.991	5.609	5.596	5.770	6.041	6.348	6.708
Bangli	3.097	3.281	3.472	3.686	3.916	4.124	4.350	4.587	4.399	4.385	4.507	4.665	4.876	5.135
Karangasem	7.538	8.002	8.483	8.992	9.524	10.006	10.550	11.130	10.630	10.571	10.843	11.179	11.663	12.275
Buleleng	15.480	16.587	17.742	18.819	19.951	21.024	22.201	23.425	22.066	21.798	22.463	23.281	24.453	25.807
Denpasar	23.397	25.026	26.779	28.423	30.273	32.105	34.166	36.154	32.745	32.447	34.083	36.004	38.001	40.322

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PANGSA PDRB KABUPATEN KOTA TERHADAP PROVINSI (%)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PANGSA EKONOMI KABUPATEN/KOTA TERHADAP EKONOMI BALI														
Jembrana (%)	5,91	5,78	5,76	5,76	5,72	5,65	5,60	5,58	5,97	6,12	5,90	5,69	5,64	5,62
Tabanan (%)	9,72	9,65	9,62	9,60	9,55	9,50	9,43	9,39	9,89	9,96	9,62	9,31	9,25	9,24
Badung (%)	23,05	23,65	23,79	23,98	24,19	24,39	24,63	24,81	21,78	20,28	22,46	24,93	25,12	25,17
Gianyar (%)	11,53	11,43	11,43	11,38	11,33	11,29	11,28	11,26	11,49	11,70	11,35	11,13	11,05	11,13
Klungkung (%)	3,73	3,65	3,62	3,63	3,64	3,63	3,61	3,59	3,76	3,86	3,74	3,67	3,68	3,70
Bangli (%)	2,85	2,81	2,80	2,79	2,80	2,79	2,77	2,76	2,98	3,08	2,98	2,88	2,83	2,82
Karangasem (%)	6,98	6,91	6,88	6,91	6,87	6,80	6,77	6,75	7,29	7,46	7,18	6,92	6,73	6,50
Buleleng (%)	14,35	14,24	14,27	14,22	14,19	14,13	14,03	13,96	14,80	15,09	14,55	13,98	13,85	13,91
Denpasar (%)	21,88	21,87	21,83	21,71	21,72	21,83	21,89	21,89	22,02	22,45	22,20	21,91	21,84	21,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

KREDIT RUMAH TANGGA BERDASARKAN LOKASI PROYEK (Rp triliun)

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit RT. Total (Rp Triliun)	33,27	33,08	33,55	34,28	34,55	35,08	36,07	37,22	37,76	38,58	39,83	40,82	41,13	41,69	42,22	42,89	42,82
Kredit RT. Total (% yoy)	-4,24	-3,03	-1,32	2,73	3,86	6,05	7,52	8,74	9,26	9,97	10,42	9,68	8,94	8,06	5,99	5,08	4,12
KPR (Rp Triliun)	10,92	10,19	10,75	10,55	10,61	10,84	11,63	11,86	10,54	12,09	12,30	12,52	12,62	12,67	12,77	12,82	12,71
RT. KPR < 21	0,63	0,44	0,43	0,43	0,53	0,73	0,7	0,68	0,31	0,58	0,56	0,54	0,53	0,52	0,5	0,50	0,47
RT. KPR 21 sd 70	6,13	6,18	6,21	6,34	6,51	6,33	6,53	6,66	5,64	6,83	6,94	7,04	7,11	7,11	7,17	7,20	7,11
RT. KPR > 70	4,16	3,57	3,71	3,78	3,57	3,78	4,39	4,52	4,59	4,68	4,79	4,94	4,98	5,04	5,08	5,12	5,09
KPA (Rp Triliun)	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11
RT. KPA sd 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RT. KPA sd 70	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
RT. KPA 70+	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
K RT. Ruko (Rp Triliun)	0,41	0,41	0,39	0,35	0,34	0,32	0,36	0,34	1,81	0,47	0,46	0,45	0,48	0,48	0,51	0,52	0,52
KKB (Rp Triliun)	1,26	1,26	1,33	1,53	1,69	1,92	2,12	2,35	2,60	2,67	2,92	3,06	3,12	3,13	0,04	2,96	2,91
RT. KKB Roda 4	1,15	1,16	1,22	1,43	1,58	1,82	2,02	2,25	2,48	2,55	2,78	2,91	2,97	2,98	2,89	2,80	2,75
RT. KKB Roda 2	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0	0,11	0,11
RT. KKB Roda 6	0,01	0,01	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0	0,02	0,01
RT. KKB Lainnya	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0	0,04	0,03
RT. Multiguna (Rp Triliun)	18,13	18,48	18,50	18,62	18,59	18,48	18,19	18,15	18,32	18,54	18,99	19,14	19,09	19,39	19,7	20,04	20,14
NPL Kredit RT (Gross %)	1,75	1,67	1,63	1,47	1,52	1,56	1,47	1,33	1,30	1,40	1,36	1,32	1,46	1,55	1,42	1,31	1,28

Sumber: LBU, Bank Indonesia

KREDIT RUMAH TANGGA BERDASARKAN LOKASI PROYEK (Rp triliun)

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit Korporasi (Rp Triliun)	32,03	32,86	31,56	32,9	30,79	31,26	32,46	31,58	34,01	34,95	34,90	36,40	36,17	36,72	38,99	40,16	40,01
Kredit Korporasi (% yoy)	4,53	6,48	-0,94	5,43	-3,86	-4,89	2,87	-4,01	10,45	11,8	7,51	13,65	5,63	3,67	10,71	10,31	10,63
Modal Kerja (Rp Triliun)	9,21	9,31	9,96	10,39	9,77	11,16	11,67	11,54	11,91	12,23	12,43	13,18	13,02	13,12	13,74	14,06	13,46
Modal Kerja (% yoy)	8	8,14	-6,04	17,41	6,12	19,87	17,12	11,06	21,9	9,58	6,50	12,79	7,76	4,78	8,83	6,72	3,39
Investasi (Rp Triliun)	22,79	23,52	21,57	21,86	21,01	20,07	20,19	20,33	22,20	22,88	22,57	23,20	23,12	23,57	25,22	26,07	26,53
Investasi (% yoy)	3,16	5,99	1,99	-1,99	-7,79	14,64	-6,37	-6,99	7,80	13,96	11,78	14,14	4,43	3,02	11,74	12,35	14,72
NPL (Gross,%)	7,62	6,98	7,71	7,95	7,66	4,35	3,89	2,82	2,56	2,67	2,34	1,50	1,23	1,18	1,12	1,21	1,74

Sumber: LBU, Bank Indonesia

INDIKATOR PERBANKAN - BANK UMUM BERDASARKAN LOKASI PROYEK (Rp triliun)

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Asset (Rp Triliun)	134.16	139.71	150.16	160.25	161.55	170.97	183.42	184.09	191.58	200.61	210.31	208.49	209.55	219.91	230.31	222.95	223.08
Total Asset (% yoy)	3.61	5.1	13.33	17.47	20.41	39.67	41.19	33.75	18.6	17.34	14.66	13.25	9.37	9.62	9.51	6.94	6.46
DPK (Rp Triliun) - DPK KCKCP	105.58	110.48	119.68	126.48	131.57	138.88	148.2	150.62	157.99	165.67	172.26	172.93	175.66	182.99	190.57	186.08	188.10
Giro (Rp Triliun)	16.35	17.59	20.39	21.03	22.65	23.41	27.27	25.38	28.68	29.7	33.20	30.27	28.93	31.88	35.08	33.50	33.26
Tabungan (Rp Triliun)	55.16	59	64.88	70.6	74.47	79.2	82.86	86.88	88.92	94.43	96.02	99.13	100.45	104.21	105.74	106.44	107.87
Deposito (Rp Triliun)	3.407	33.9	34.42	34.85	34.46	36.27	38.06	38.36	40.4	41.53	43.05	43.53	46.28	46.90	49.75	46.15	46.97
DPK (% yoy)	7.15	10.66	19.78	21.69	24.75	25.77	23.82	19.09	20.08	19.28	16.24	14.81	11.18	10.46	10.63	7.60	7.08
Giro% yoy)	23.94	34.52	46.26	37.81	38.56	33.13	33.78	20.7	26.6	26.88	21.71	19.25	0.90	7.34	5.69	10.67	14.95
Tabungan(% yoy)	14.52	19.26	27.59	30.72	35.23	34.34	27.73	23.06	19.41	19.23	15.87	14.10	12.96	10.35	10.13	7.37	7.39
Deposito (% yoy)	-8.36	-9.11	-2.04	0.52	1.17	7.04	10.58	10.06	17.25	14.5	13.10	13.49	14.56	12.93	15.58	6.01	1.49
Kredit (Rp Triliun) - Lokasi Pro	105.56	107.11	106.77	108.08	107.63	109.72	112.19	114.68	117.36	120.85	122.97	124.91	124.28	126.06	130.88	134.00	135.53
Modal Kerja	35	35.69	36.6	36.51	36.11	37.64	38.11	38.23	37.93	38.42	38.43	37.98	37.02	37.69	38.25	38.25	36.94
Investasi	37.24	38.28	36.56	37.29	36.91	36.95	37.96	39.19	41.63	43.8	44.66	46.07	46.09	46.63	50.38	52.82	55.72
Konsumsi	33.32	33.13	33.6	34.28	34.61	35.14	36.12	37.26	37.8	38.63	39.88	40.86	41.17	41.74	42.26	42.93	42.87
Q Umum (% yoy)	1.24	2.97	1.69	4.12	1.96	2.44	5.08	6.11	9.04	10.14	9.61	8.91	5.89	4.31	6.44	7.28	9.05
Modal Kerja (% yoy)	2.37	4.51	1.17	6.57	3.19	5.46	4.11	4.72	5.03	2.07	0.83	-0.67	-2.40	-1.91	-0.47	0.71	-0.19
Investasi (% yoy)	5.44	7.24	5.07	3.26	-0.9	-3.49	3.82	5.09	12.79	18.55	17.66	17.55	10.71	6.46	12.79	14.66	20.89
Konsumsi (% yoy)	-4.15	-3.03	-1.22	2.55	3.87	6.04	7.5	8.68	9.22	9.94	10.41	9.66	8.92	8.06	5.97	5.08	4.11
Loan to Deposit Ratio (%)	80.56	77.62	72.27	69.17	81.80	79.00	75.70	76.14	74.28	72.95	71.39	72.23	70.75	68.89	68.68	72.01	72.05
NPL Gross (%)	4.18	4.07	4.14	4.03	3.83	2.49	2.36	1.91	1.88	1.94	1.80	1.38	1.38	1.42	1.31	1.19	1.38

Sumber: LBU, Bank Indonesia

DANA PERBANKAN BANK UMUM (Rp triliun)

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total DPK (Rp Triliun)	105.58	110.48	119.68	126.48	131.57	138.88	148.2	150.62	157.99	165.67	172.26	172.93	175.66	182.99	190.57	186.08	188.10
Giro (Rp Triliun)	16.35	17.59	20.39	21.03	22.65	23.41	27.27	25.38	28.68	29.70	33.20	30.27	28.93	31.88	35.08	33.50	33.26
Tabungan (Rp Triliun)	55.16	59.00	64.88	70.60	74.47	79.20	82.86	86.88	88.92	94.43	96.02	99.13	100.45	104.21	105.74	106.44	107.87
Deposito (Rp Triliun)	34.07	33.90	34.42	34.85	34.46	36.27	38.5	38.36	40.40	41.53	43.05	43.53	46.28	46.90	49.75	46.15	46.97

Sumber: LBU, Bank Indonesia

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN LOKASI BANK UMUM (Rp triliun)

KABUPATEN/ KOTA	INDIKATOR	2022				2023				2024				2025				2026
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
JEMBRANA	Kredit (Rp Triliun)	3,28	3,34	3,35	3,41	3,44	3,51	4,74	4,86	4,88	4,92	5,02	5,04	5,04	5,06	5,08	5,15	5,18
	DPK (Rp Triliun)	2,35	2,44	2,47	2,54	1,93	1,98	2,79	2,9	2,97	3,13	3,21	3,27	3,40	3,40	3,52	3,53	3,63
TABANAN	Kredit (Rp Triliun)	5,28	5,38	5,45	5,55	5,61	5,76	9,09	8,91	9,06	9,29	9,53	9,69	9,80	9,86	10,01	10,12	10,17
	DPK (Rp Triliun)	5,36	5,66	6,01	6,22	4,57	4,83	7,53	7,82	8,32	8,88	9,20	9,30	9,44	9,59	9,60	9,50	9,59
BADUNG	Kredit (Rp Triliun)	10,78	10,8	10,94	11,06	11,37	11,72	24,36	24,48	26,45	27,08	28,05	28,96	28,89	29,25	32,38	32,53	33,37
	DPK (Rp Triliun)	22,01	24,31	28,48	31,37	30,42	32,89	40,35	39,97	42,73	44,4	46,69	46,72	47,32	49,81	54,09	51,83	52,93
GIANYAR	Kredit (Rp Triliun)	4,54	4,61	4,68	4,77	4,79	4,93	9,7	10,23	10,34	10,83	11,02	11,14	11,20	11,23	11,48	11,63	11,62
	DPK (Rp Triliun)	7,75	8,31	8,28	10,12	5,73	6,32	13,46	13,78	14,43	15,49	16,32	16,34	16,39	17,02	17,75	16,93	16,91
KLUNGKUNG	Kredit (Rp Triliun)	2,88	2,91	2,93	2,99	2,98	3,03	3,34	3,36	3,37	3,44	3,56	3,54	3,55	3,59	3,63	3,88	3,98
	DPK (Rp Triliun)	2,44	2,65	2,69	2,77	2,61	2,76	3,26	3,35	3,51	3,65	3,88	3,87	3,96	4,02	4,18	4,15	4,11
BANGLI	Kredit (Rp Triliun)	2,22	2,23	2,25	2,25	2,26	2,38	3,16	3,24	3,32	3,41	3,50	3,52	3,56	3,58	3,67	3,70	3,75
	DPK (Rp Triliun)	1,59	1,69	1,84	1,75	1,6	1,7	2,11	2,12	2,32	2,4	2,51	2,46	2,48	2,56	2,68	2,59	2,70
KARANGASEM	Kredit (Rp Triliun)	3,11	3,19	3,25	3,3	3,34	3,46	4,51	4,58	4,68	4,82	4,97	5,01	5,01	5,07	5,14	5,28	5,37
	DPK (Rp Triliun)	2,99	3,14	3,27	3,27	2,92	3,16	3,91	3,97	4,23	4,5	4,64	4,60	4,72	4,911	4,99	5,03	5,02
BULELENG	Kredit (Rp Triliun)	7,31	7,47	7,56	7,54	7,6	7,72	10,67	10,86	10,96	11,26	11,54	11,55	11,97	12,32	12,57	12,76	12,81
	DPK (Rp Triliun)	5,12	5,26	5,52	5,38	6,1	6,49	6,44	6,65	6,95	7,25	7,39	7,59	7,92	7,97	8,22	8,05	8,37
DENPASAR	Kredit (Rp Triliun)	45,56	45,79	46,06	46,62	46,58	46,73	42,81	44,11	44,25	45,79	45,78	46,45	45,25	46,04	47,02	48,95	49,28
	DPK (Rp Triliun)	55,85	56,96	60,12	63,09	75,66	78,71	68,34	70,02	72,59	75,94	78,41	78,78	80,03	83,67	85,53	84,48	84,83

Sumber: LBU, Bank Indonesia

KREDIT UMKM BERDASARKAN LOKASI PROYEK (Rp triliun)

KREDIT UMKM	2022				2023				2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit UMKM (Rp Triliun)	44,43	45,4	45,61	46	46,33	47,55	48,59	50,23	52,48	52,64	54,31	53,86	54,21	54,27	55,79	56,63	57,00
Kredit UMKM (%.yoy)	11,27	11,57	9,88	5,63	4,29	4,73	6,54	9,2	13,27	10,71	11,77	7,21	3,29	3,10	2,74	5,15	5,15
NPL (%)	3,46	3,65	2,99	2,5	2,54	2,49	2,34	1,9	1,82	2,05	1,92	1,45	1,53	1,66	1,52	1,26	1,40

Sumber: LBU, Bank Indonesia

SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DAN NONTUNAI (Rp triliun)

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Transaksi Tunai																	
Inflow (Rp Triliun)	3,54	1,93	1,92	1,57	4,06	2,55	2,86	1,65	4,62	3,66	1,64	2,09	3,55	3,22	1,52	2,03	5,14
Outflow (Rp Triliun)	1,52	4,24	2,82	4,21	2,26	4,48	2,31	4,69	2,90	4,70	2,91	3,81	3,92	2,44	3,02	5,24	3,39
Kliring																	
Nom. Kliring (Rp Triliun)	7,67	7,91	8,34	8,83	7,81	7,44	7,81	9,52	8,12	8,27	9,13	9,25	7,56	7,37	8,12	8,37	6,98
Vol. Kliring (ribu lembar)	195	205	222	238	190	191	179	214	169	180	190	195	150	148	163	167	131
RTGS																	
Nom. RTGS (Rp Triliun)	29,65	28,85	32,07	34,27	44,23	47,47	53,27	53,52	54,74	56,33	54,99	60,92	53,19	53,24	52,88	45,19	39,25
Vol. RTGS (ribu lembar)	17,77	19,94	22,29	23,86	23,82	23,45	26,84	27,48	24,72	25,60	28,02	28,34	23,82	22,97	25,40	24,82	21,08

Sumber: Bank Indonesia





EKONOMI MAKRO REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tumbuh kuat sebesar 5,58% (yoy), utamanya bersumber dari pertumbuhan LU Akmamin, LU Administrasi Pemerintahan, dan LU Perdagangan Besar seiring tumbuh positifnya kunjungan wisatawan, meningkatnya belanja APBN maupun APBD, dan terjaganya daya beli Masyarakat. Sementara itu dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali terutama bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah.



Pertumbuhan Ekonomi

Tw I 2026 **5,58%** (YOY)

Tw IV 2025 **5,86%** (YOY)



Konsumsi Rumah Tangga

Tw I 2026 **5,02%** (YOY)

Tw IV 2025 **5,85%** (YOY)



Konsumsi Pemerintah

Tw I 2026 **20,28%** (YOY)

Tw IV 2025 **10,73%** (YOY)



Investasi (PMTB)

Tw I 2026 **6,78%** (YOY)

Tw IV 2025 **5,47%** (YOY)



Ekspor Luar Negeri

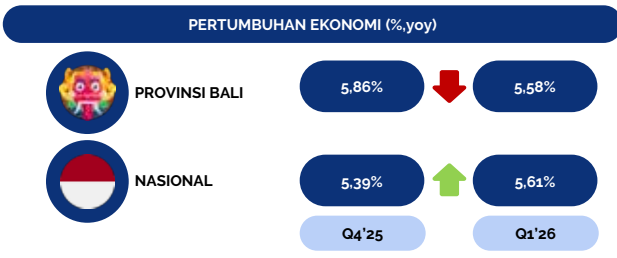
Tw I 2026 **2,84%** (YOY)

Tw IV 2025 **5,43%** (YOY)

GAMBARAN UMUM

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tumbuh kuat sebesar 5,58% (yoy), di tengah gejolak geopolitik global. Meski tumbuh kuat, capaian ini melambat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya (5,86% yoy) dan sedikit di bawah nasional (5,61% yoy). Melambatnya ekonomi Bali pada triwulan I 2026 sejalan dengan pola low season pariwisata dan eskalasi konflik di Timur Tengah yang turut menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan ke Bali. Dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi Bali masih ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga (RT), Konsumsi Pemerintah, Ekspor Luar Negeri, dan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sejalan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi pada periode HBKN Nyepi, Idulfitri, dan Imlek. Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari Lapangan Usaha (LU) Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin), LU Administrasi Pemerintahan, dan LU Perdagangan Besar dan Eceran seiring kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh positif, meningkatnya belanja pegawai dan belanja modal APBN maupun APBD, dan terjaganya daya beli masyarakat ditengah perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

1.1. KINERJA PEREKONOMIAN BALI TRIWULAN I 2026

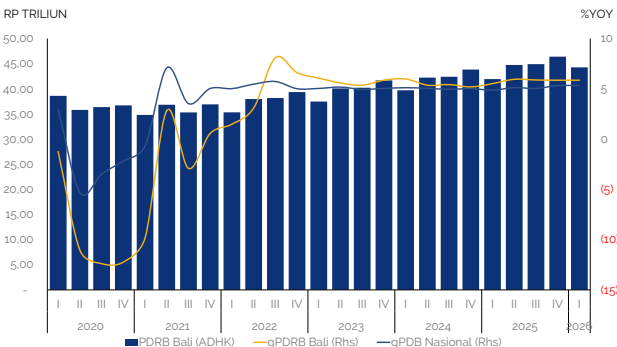


Kinerja perekonomian Bali tetap kuat pada triwulan I 2026, meskipun sedikit di bawah nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada triwulan I 2026 sebesar Rp44,28 triliun atau tumbuh 5,58% (yoy), tetap kuat meskipun melambat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 5,86% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali sedikit di bawah Nasional yang tumbuh 5,61% (yoy). Dibandingkan provinsi lainnya, Bali menempati peringkat ke-16 pertumbuhan ekonomi tertinggi. Secara umum, pertumbuhan terutama

ditopang oleh kinerja LU Penyediaan Akmamin, LU Administrasi Pemerintahan, dan LU Perdagangan. Hal ini sejalan dengan kunjungan wisman yang tetap tumbuh positif meskipun melambat di tengah gejolak geopolitik global, meningkatnya realisasi belanja pegawai baik yang bersumber dari APBN dan APBD, serta peningkatan permintaan kebutuhan pokok khususnya pada periode HBKN Nyepi, Idul Fitri, dan Imlek.

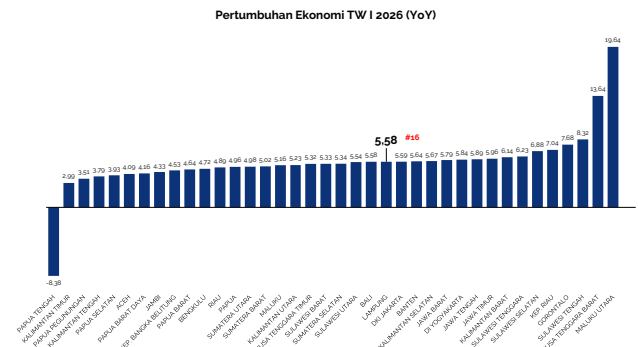
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Bali ditopang oleh Konsumsi RT, Konsumsi Pemerintah, Ekspor LN dan PMTB. Konsumsi RT didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi sejalan dengan momentum perayaan HBKN Nyepi, Idul Fitri, dan Imlek, aktivitas pariwisata domestik. Konsumsi Pemerintah didorong peningkatan realisasi belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD, khususnya belanja pegawai seiring pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan, serta belanja modal. Kuatnya Ekspor Luar Negeri didorong

Grafik 1.1. Perkembangan Ekonomi Bali dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Indonesia Triwulan I 2026

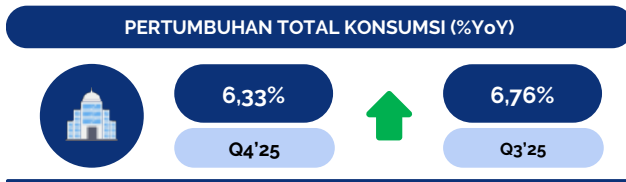


Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

oleh meningkatnya wisatawan mancanegara, utamanya pada periode *summer holiday* Australia. Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didorong oleh aktivitas konstruksi, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI PENGELUARAN

1.2.1. Konsumsi



Pertumbuhan total konsumsi pada triwulan I 2026 meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 didorong oleh Konsumsi Pemerintah. Total konsumsi tercatat tumbuh 6,76% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,33% (yoy). Peningkatan kinerja Total Konsumsi tersebut utamanya didorong oleh peningkatan Konsumsi Pemerintah seiring peningkatan realisasi belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD dibandingkan triwulan sebelumnya terutama dengan adanya pencairan THR bagi ASN, TNI/Polri, dan Pensiunan setelah pengangkatan PPPK di pertengahan sampai dengan akhir tahun 2025. Di sisi lain, Konsumsi RT mengalami perlambatan setelah pada triwulan sebelumnya terdapat perayaan Galungan-Kuningan. Namun demikian, pertumbuhan tetap tinggi didukung momen perayaan HBKN Nyepi, Idul Fitri, dan Imlek. Lebih lanjut, Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) mengalami peningkatan sejalan

dengan meningkatnya aktivitas lembaga non profit pada kegiatan keagamaan khususnya pada rangkaian persiapan HBKN Nyepi dan HBKN Idul Fitri yang berdekatan.

KONSUMSI SWASTA : RUMAH TANGGA (RT) DAN LEMBAGA NONPROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (LNPR)

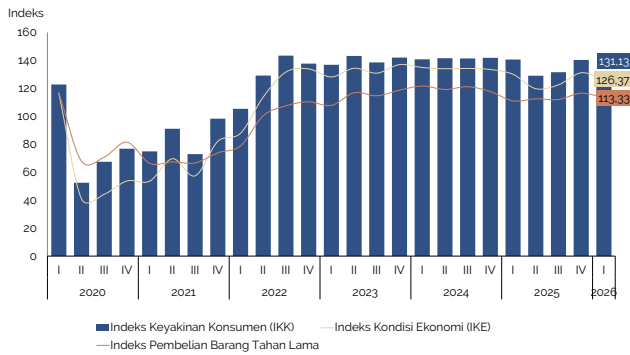
Kinerja konsumsi swasta melambat pada triwulan I 2026 seiring dengan Konsumsi RT yang melambat.

Konsumsi RT tumbuh 5,02% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,85% (yoy). Perlambatan Kinerja konsumsi RT seiring dengan daya dorong konsumsi RT pada triwulan sebelumnya yang lebih tinggi seiring adanya perayaan HBKN Galungan Kuningan. Optimisme konsumen juga mengalami penurunan yang tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama pada triwulan I 2026 dengan rata-rata sebesar 135,87 dan 113,33 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dengan rata-rata sebesar 140,29 dan 116,50. Meskipun melambat, Konsumsi RT masih tumbuh kuat didorong oleh pengeluaran Akmamin sejalan dengan aktivitas pariwisata yang masih tinggi pada periode libur panjang HBKN Nyepi, Idulfitri, dan Imlek didukung tambahan pendapatan dari pencairan THR ASN/POLRI dan pensiunan. Sementara itu, konsumsi LNPR pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 6,40% (yoy), setelah pada triwulan IV 2025 terkontraksi sebesar -6,99%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas lembaga nonprofit pada berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam merayakan HBKN

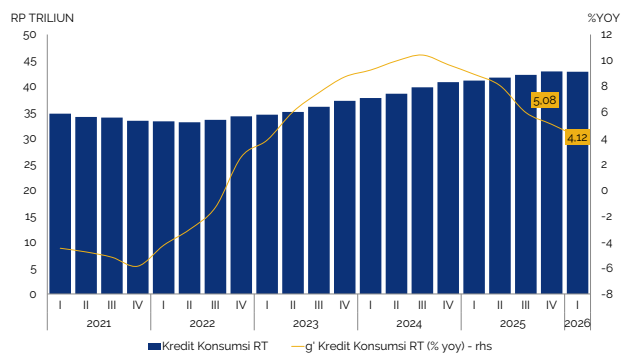
Tabel 1.1. Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Pengeluaran (% ,yoy)

Komponen	2023				2023	2024				2024	2025				2025	2026
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Konsumsi	6,66	6,72	4,08	3,14	5,07	7,52	3,96	5,70	4,82	5,44	5,21	3,40	4,86	6,33	4,97	6,67
Kons.RT	6,92	5,39	6,08	3,98	5,57	4,33	4,09	5,46	4,73	4,65	5,31	5,54	5,20	5,85	5,47	5,02
Kons.LNPR	9,09	5,86	6,05	32,85	13,77	80,93	10,67	14,53	10,44	27,04	-19,04	9,75	8,90	-6,99	-3,97	6,40
Kons. Pemerintah	3,64	14,00	-6,15	-3,76	-0,77	19,68	2,41	5,66	4,36	6,37	13,47	-8,37	2,29	10,73	3,90	20,28
Investasi	-0,45	0,44	2,72	7,25	2,58	8,58	9,12	0,44	4,74	5,54	3,57	6,55	7,54	5,95	6,13	7,67
PMTB	-0,49	0,47	2,77	8,89	3,01	8,23	8,55	1,92	4,39	5,56	5,13	6,61	6,12	5,47	6,03	6,78
Perubahan Inventori	4,68	-5,69	-4,85	-265,41	-66,27	56,62	103,21	-267,28	-55,10	-4,53	-143,22	1,07	-148,33	-116,04	60,29	-197,83
Ekspor LN	562,00	206,35	60,14	30,59	103,15	24,39	17,47	9,14	15,67	16,00	6,55	13,47	7,54	5,43	8,21	2,84
Impor LN	1.069,96	153,37	47,04	18,49	108,82	16,94	6,50	10,01	18,61	12,93	0,93	8,46	9,81	6,13	6,28	15,14
Net Ekspor antar daerah	1.310,81	291,18	55,71	25,81	98,05	37,99	21,76	5,22	14,08	17,42	29,08	51,92	10,22	-41,07	7,20	8,21
PDRB	6,07	5,58	5,36	5,86	5,71	5,98	5,36	5,43	5,19	5,48	5,52	5,90	5,88	5,86	5,82	5,58

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik 1.3. Perkembangan Ekspektasi Konsumen di Provinsi Bali

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah BI

Grafik 1.4. Perkembangan Penyaluran Kredit RT di Provinsi Bali

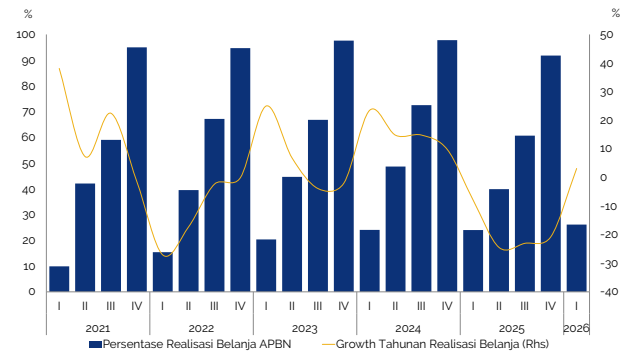
Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), diolah

Nyepi dan Idulfitri yang pelaksanaannya berdekatan.

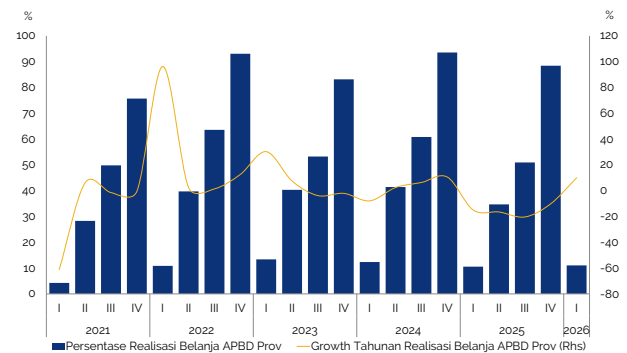
Kinerja konsumsi swasta yang melambat juga tercermin dari pertumbuhan kredit yang mengalami perlambatan dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit konsumsi pada triwulan I 2026 tumbuh melambat sebesar 4,12% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,08% (yoy). Berdasarkan jenisnya, kredit konsumsi khususnya kredit KPR & KPA, kredit KKB, dan kredit peralatan RT mengalami perlambatan atau penurunan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,66% (yoy), -6,75% (yoy), dan 36,15% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 2,90% (yoy), -3,14% (yoy), dan 51,31% (yoy) sedangkan kredit multiguna mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 5,48% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,69% (yoy).

KONSUMSI PEMERINTAH

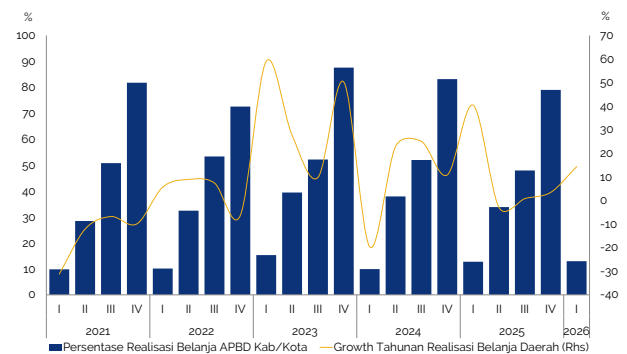
Konsumsi pemerintah tumbuh meningkat pada triwulan I 2026, didorong peningkatan belanja pusat

Grafik 1.5. Perkembangan Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali

Sumber: DJPB Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.6. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali

Sumber: BPKAD Provinsi, diolah BI

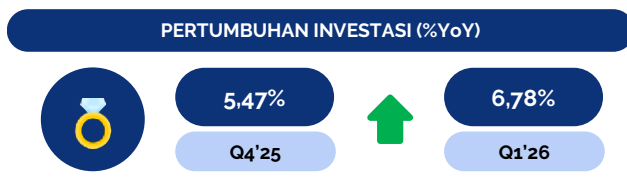
Grafik 1.7. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Bali

Sumber: BPKAD Provinsi, diolah BI

dan daerah. Pada triwulan I 2026, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 20,28% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 10,73% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong peningkatan realisasi belanja pegawai dengan adanya pengangkatan PPPK di pertengahan sampai dengan akhir tahun 2025 serta pemberian Tunjangan Hari Raya kepada ASN, TNI/Polri, dan pensiunan pada periode Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Berdasarkan pembagian administratif, meningkatnya konsumsi pemerintah pada triwulan I 2026 didorong oleh

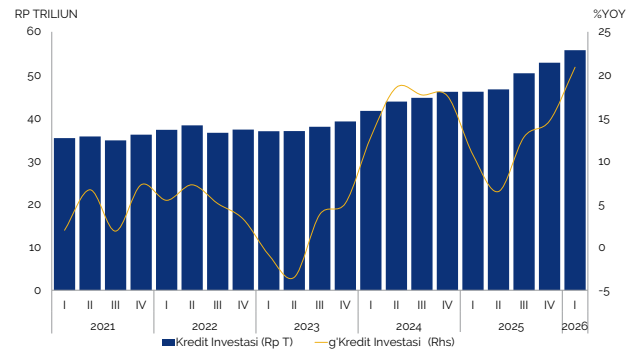
realisasi baik pada APBD Provinsi, APBD Kota/Kabupaten, maupun APBN yang tumbuh sebesar 9,98% (yoy), 14,39% (yoy), dan 3,14% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang masing-masing tumbuh sebesar -10,12% (yoy), 3,49% (yoy) dan -9,80% (yoy). Secara lebih detail, peningkatan belanja terutama terjadi pada belanja pegawai yang tumbuh sebesar 53,97% (yoy), 21,57% (yoy), dan 15,12% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,33% (yoy), 14,80% (yoy), dan 8,36% (yoy). Selanjutnya belanja modal juga mengalami kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 720,7% (yoy), 1.233,1% (yoy), dan 151,20% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,87% (yoy), 23,75% (yoy), dan -60,92% (yoy).

1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)



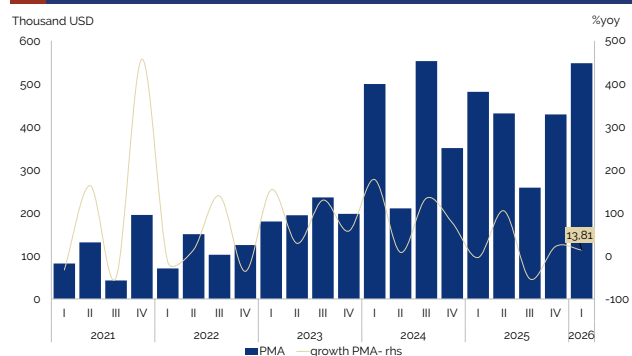
Kinerja investasi Bali meningkat pada triwulan I 2026 utamanya didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) di Bali tumbuh lebih tinggi dari 5,47% (yoy) pada triwulan IV 2025, menjadi 6,78% (yoy) pada triwulan I 2026. Meningkatnya investasi utamanya didorong oleh investasi pemerintah yang tercermin dari kenaikan realisasi belanja modal baik APBN maupun APBD di atas 100 % (yoy). Beberapa proyek pemerintah daerah yang mendorong investasi diantaranya lanjutan pembangunan Turyapada Tower, penataan area parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem, pembangunan jembatan akses kawasan Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar, dan perbaikan jalan. Di sisi lain, investasi swasta mengalami perlambatan, dengan total Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh sebesar 8,61% (yoy). Lebih detail, PMA tumbuh sebesar 13,81% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 22,81% (yoy) sedangkan PMDN tercatat mengalami kontraksi sebesar -6,20% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang

Grafik 1.8. Perkembangan Kredit Investasi Provinsi Bali



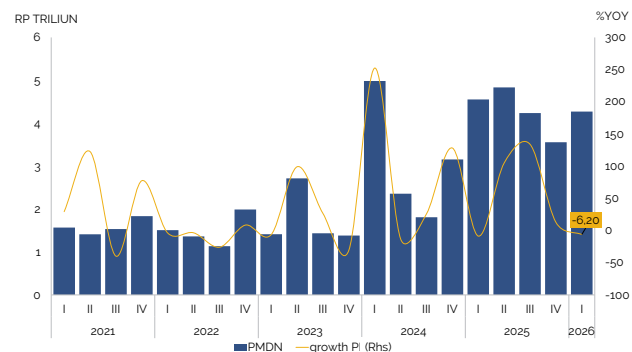
Sumber: LBU, diolah

Grafik 1.9. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)



Sumber: BKPM, diolah BI

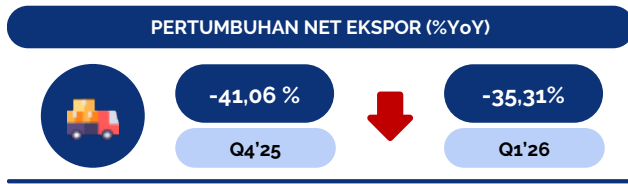
Grafik 1.10. Perkembangan Penanaman Dalam Negeri (PMDN)



Sumber: BKPM, diolah BI

tumbuh sebesar 12,68% (yoy). Sejalan dengan realisasi investasi swasta yang menurun, realisasi pengadaan semen juga mengalami penurunan yang pada triwulan I tumbuh terkontraksi sebesar -3,71% (yoy), berbeda arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,65% (yoy). Namun demikian, optimisme investasi masih terjaga tercermin dari kredit investasi yang meningkat dengan pertumbuhan sebesar 20,89% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,66% (yoy).

1.2.3. Ekspor dan Impor



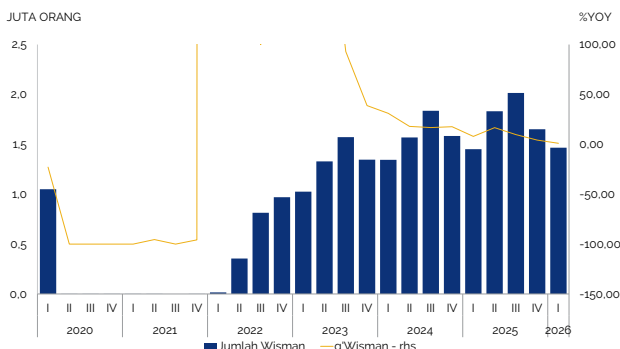
Kinerja neraca perdagangan pada triwulan I 2026 masih terkontraksi, meskipun membaik terutama disebabkan melambatnya pertumbuhan ekspor luar negeri dan peningkatan impor luar negeri. Neraca perdagangan gabungan (luar negeri dan antardaerah) terkontraksi sebesar -35,31% (yoy) pada triwulan I 2026, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -41,06% (yoy). Berdasarkan nilai nominal, neraca perdagangan Bali pada triwulan I 2026 masih mengalami surplus sebesar Rp929,19 miliar (ADHK) atau sebesar Rp6.057,43 miliar (ADHB) dengan kontribusi terbesar berasal dari ekspor luar negeri.

Kinerja Ekspor Luar Negeri di Bali melambat sejalan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik yang mengalami perlambatan. Pada triwulan I 2026, kinerja Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 5,43% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,44% (yoy). Melambatnya kinerja ekspor luar negeri utamanya dipengaruhi oleh kinerja ekspor jasa yang bersumber dari lebih rendahnya pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan triwulan sebelumnya di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik yang menyebabkan *appetite* berwisata tertahan.

Kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 1,04% (yoy) dengan total 1,46 juta kunjungan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,23% (yoy) dengan total 1,65 juta kunjungan. Melambatnya kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan berjalan melambat terutama dari beberapa negara kantong utama seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Malaysia dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 20,22% (yoy), -13,32 dan -20,91% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang masing-masing tumbuh sebesar 22,43% (yoy), 0,82% (yoy) dan -1,45% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, kinerja ekspor barang nonmigas Provinsi Bali juga tumbuh terkontraksi sebesar -9,97% (yoy) pada triwulan I 2026 berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 0,61% (yoy). Lebih lanjut kinerja net ekspor antardaerah di Bali pada triwulan I 2026, mengalami defisit sebesar Rp -12.593 miliar (ADHK) lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang defisit sebesar Rp -15.682 Milliar (ADHK). Membaiknya net ekspor antardaerah utamanya didorong oleh peningkatan ekspor produk pertanian seiring produksi yang meningkat dan memasukinya periode panen raya beberapa komoditas.

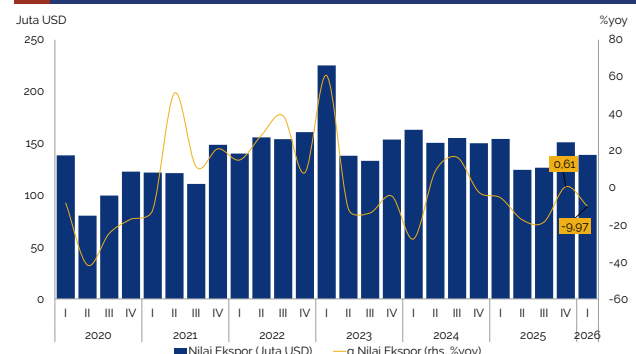
Kinerja neraca perdagangan yang masih terkontraksi juga disebabkan oleh kinerja impor luar negeri yang juga tumbuh meningkat pada triwulan I 2026. Impor Luar Negeri tumbuh 15,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,13% (yoy). Hal ini utamanya didorong oleh kinerja impor barang nonmigas Provinsi Bali yang tumbuh sebesar 10,14% (yoy) pada triwulan I 2026, berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh terkontraksi sebesar

Grafik 1.11. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali



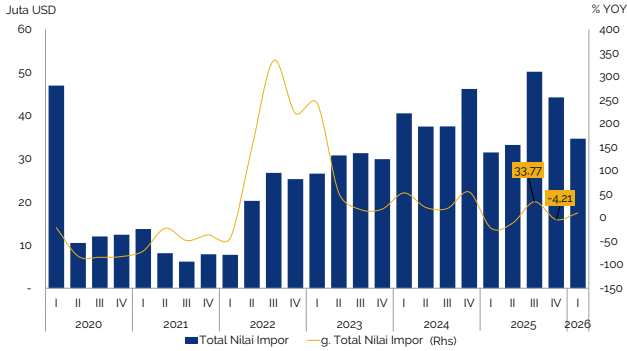
Sumber: BPS, diolah BI

Grafik 1.12. Nilai Ekspor Barang Nonmigas Provinsi Bali



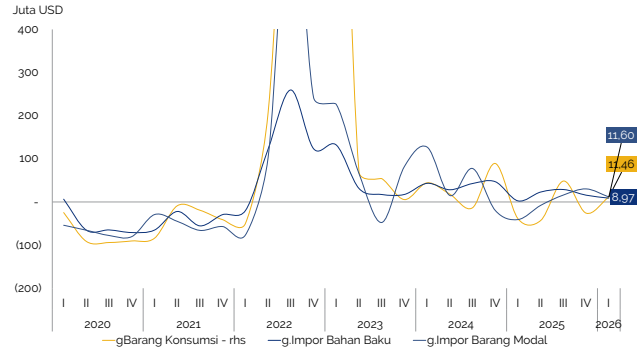
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.13. Perkembangan Nilai Impor Barang



Sumber: Bank Indonesia, diolah BI

Grafik 1.14. Pertumbuhan Impor Barang Berdasarkan Klasifikasi Broad Economic Categories (BEC)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 1.2. Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I 2026 Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

Lapangan Usaha	2023				2023	2024				2024	2025				2025	2026
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,60	-2,43	-4,72	6,04	-0,47	2,64	3,92	3,00	0,61	2,51	5,17	-0,30	1,97	0,25	1,70	2,36
Pertambangan dan Penggalian	5,06	2,10	0,00	-0,88	1,48	0,50	1,53	2,42	0,95	1,36	0,81	1,26	0,12	0,66	0,71	3,01
Industri Pengolahan	0,75	0,68	7,01	1,44	2,33	-0,14	1,23	11,00	9,37	5,19	-0,06	3,28	4,72	7,71	3,94	8,93
Pengadaan Listrik, Gas	28,81	14,91	4,05	10,22	13,84	11,46	11,34	15,23	9,50	11,78	8,59	1,97	5,12	3,93	4,88	0,22
Pengadaan Air	1,29	1,88	0,43	11,07	3,48	4,05	0,17	-3,92	4,57	1,25	3,83	3,81	1,55	0,97	2,51	4,13
Konstruksi	-0,53	1,14	0,06	2,86	0,89	1,64	1,31	0,02	4,24	1,82	3,09	6,28	4,12	2,84	4,06	4,87
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,39	3,53	5,73	7,27	5,27	4,32	3,75	2,67	5,01	3,95	5,38	8,43	6,83	5,97	6,65	7,25
Transportasi dan Pergudangan	36,16	26,89	28,37	12,65	25,28	7,33	6,74	3,82	6,30	5,99	6,78	7,30	6,26	5,53	6,46	5,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,97	16,13	16,16	13,86	16,15	12,98	12,66	12,04	10,14	11,90	7,21	13,76	10,94	8,90	10,25	6,44
Informasi dan Komunikasi	0,11	0,94	2,60	3,29	1,73	1,21	1,40	2,51	2,50	1,91	2,67	4,22	5,64	5,99	4,65	3,98
Jasa Keuangan	11,34	10,59	15,65	15,66	13,35	19,64	19,34	16,09	5,85	15,06	6,65	0,32	-5,09	6,70	1,98	-5,01
Real Estate	0,37	0,96	1,72	-0,93	0,51	0,41	2,16	1,84	2,42	1,73	1,98	4,28	2,61	1,82	2,67	3,85
Jasa Perusahaan	6,08	8,76	8,32	3,87	6,72	5,77	6,37	6,92	7,43	6,64	5,94	7,89	9,74	7,61	7,84	4,95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,92	0,18	-4,93	0,08	-0,98	18,60	2,97	3,75	6,61	7,29	20,26	3,62	9,37	12,14	10,99	16,67
Jasa Pendidikan	1,62	6,37	-3,54	-4,52	-0,15	2,52	0,94	1,21	1,04	1,40	5,63	3,47	9,39	7,89	6,55	7,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,84	4,24	0,59	2,45	2,30	2,60	1,97	2,24	2,66	2,36	4,71	4,61	6,97	8,51	6,21	6,98
Jasa lainnya	7,23	9,97	9,83	5,18	8,01	5,42	5,76	5,82	7,55	6,16	5,20	7,27	7,90	5,10	6,38	4,86
PDRB	6,09	5,58	5,38	5,87	5,72	5,97	5,36	5,44	5,19	5,48	5,59	5,95	5,88	5,86	5,82	5,58

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)

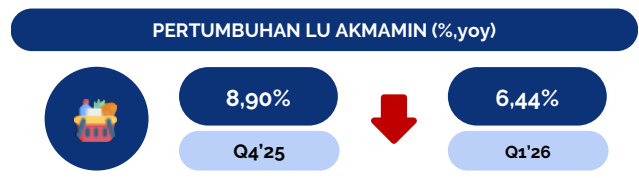
-4,21% (yoy). Peningkatan total impor barang Provinsi Bali disebabkan oleh peningkatan impor barang konsumsi yang tumbuh sebesar 11,46% (yoy) pada triwulan I 2026, berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -25,92% (yoy).

1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI LAPANGAN USAHA

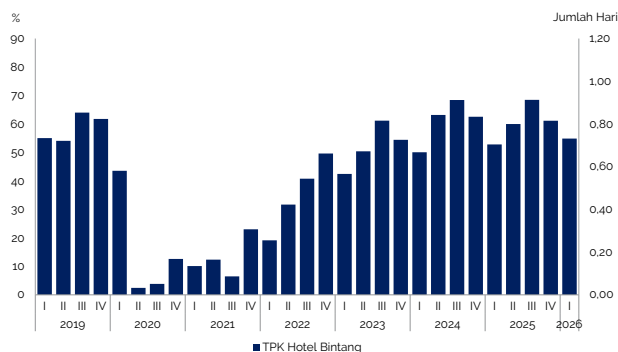
Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2026 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, sesuai dengan pola musiman diakibatkan *low season* sektor pariwisata, di tengah ketidakpastian geopolitik. Hal ini tecermin dari perlambatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (Akmamin). Kendati demikian, ekonomi Bali pada triwulan I masih tumbuh kuat didorong oleh peningkatan beberapa LU utama

diantaranya kinerja LU Pertanian, LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud), LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE), serta LU Konstruksi. Perlambatan pada LU Akmamin disebabkan melambatnya pertumbuhan total wisatawan yang mempengaruhi kinerja perhotelan dan restoran. Sementara itu LU utama lainnya mengalami peningkatan didorong oleh peningkatan permintaan kebutuhan pokok khususnya pada periode HBKN Nyepi, Idul Fitri, dan Imlek serta meningkatnya realisasi proyek pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD.

1.3.1. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

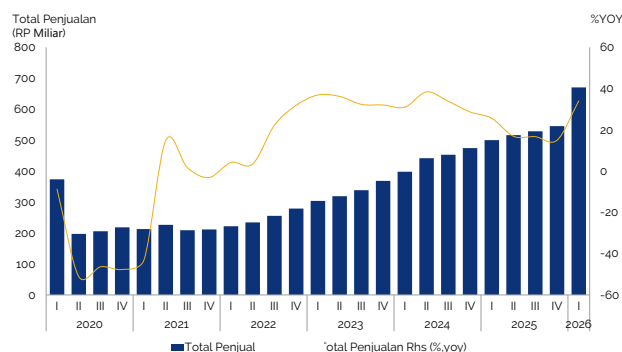


Grafik 1.15. Perkembangan TPK Hotel Bintang di Bali



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI

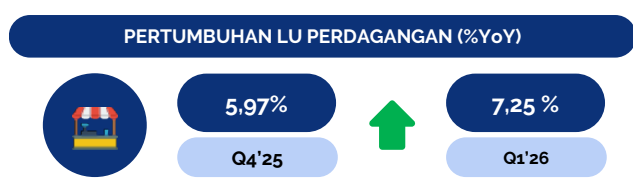
Grafik 1.16. Perkembangan Omzet Survei Penjualan Eceran Provinsi Bali



Sumber: SPE BI, diolah

LU Akmamin tumbuh melambat pada triwulan I 2026 disebabkan oleh perlambatan kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Kinerja LU Akmamin tumbuh 6,44% (yoy) pada triwulan I 2026 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,90% (yoy). Melambatnya LU Akmamin sejalan dengan pola musiman pada triwulan I yang merupakan periode *low season* pariwisata dan penutupan sementara beberapa rute penerbangan Timur Tengah sehubungan eskalasi perang AS-Israel-Iran. Hal ini tecermin dari melambatnya kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh sebesar 1,04% (yoy) dengan total 1,47 juta kunjungan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,23 % (yoy) dengan total 1,65 juta kunjungan. Kunjungan Kunjungan wisatawan nusantara berdasarkan data Badan Pusat Statistik tercatat mengalami kontraksi sebesar -0,33% (yoy) yakni dengan total kunjungan 6,46 juta kunjungan wisatawan nusantara (intra dan inter provinsi). Lebih lanjut, tingkat hunian hotel bintang pada triwulan I 2026 sebesar 54,88%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 61,14%.

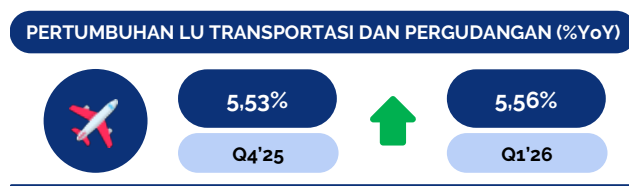
1.3.2. Perdagangan



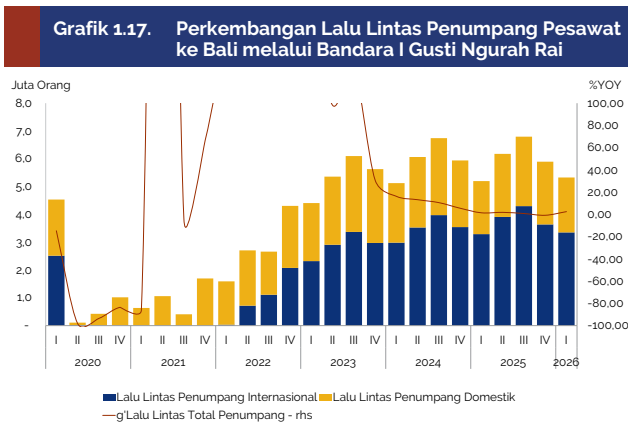
LU Perdagangan tumbuh meningkat pada triwulan I 2026 seiring dengan permintaan kebutuhan pada

periode HBKN Nyepi, Idulfitri, dan Imlek di tengah meningkatnya produksi pertanian dan peningkatan kebutuhan untuk MBG. LU Perdagangan pada triwulan I 2026 tumbuh 7,25% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,97% (yoy). Meningkatnya kinerja LU Perdagangan tecermin dari omzet penjualan pelaku usaha Survey Penjualan Eceran yang tumbuh meningkat sebesar 34,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 14,99% (yoy) didorong oleh meningkatnya omzet pelaku usaha pedagang perlengkapan rumah tangga, pedagang makanan, minuman, dan tembakau, serta pedagang bahan konstruksi. Kinerja perdagangan kendaraan juga mengalami peningkatan yang tecermin dari penjualan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tumbuh masing-masing sebesar -6,80% (yoy) dan 1,93% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar -24,37% (yoy) dan -30,79% (yoy). Dari sisi kredit, kredit perdagangan mengalami perlambatan pertumbuhan dengan kredit yang tumbuh sebesar 1,09% (yoy) lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1,44% (yoy).

1.3.3. Transportasi



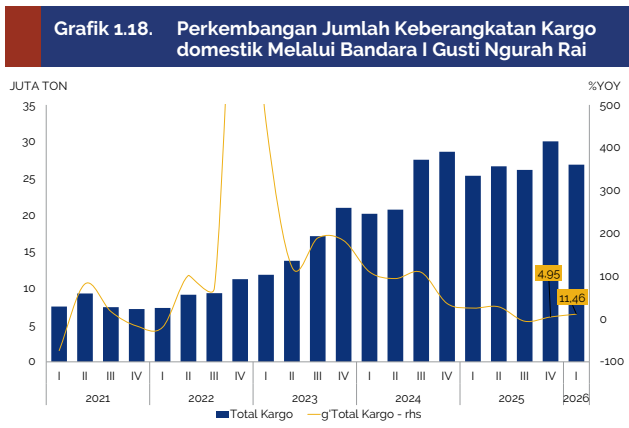
Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring



Sumber: Angkasa Pura I, (diolah BI)

dengan meningkatnya aktivitas **Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP)** dan angkutan udara utamanya pada periode mendekati **HBKN Nyepi dan Idulfitri**. Pada triwulan I 2026, kinerja LU Transportasi tumbuh sebesar 5,56% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,53% (yoy). Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya aktivitas ASDP di pelabuhan ASDP Gilimanuk dan Pelabuhan Induk Nusa Penida dengan pertumbuhan lalu lintas penumpang masing-masing sebesar 7,53% (yoy) dan 3,45% (yoy), berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -2,95% (yoy) dan -4,31% (yoy). Dari sisi lalu lintas angkutan udara, penumpang pesawat udara pada triwulan I 2026 tumbuh meningkat sebesar 2,48% (yoy) berbeda arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -0,79% (yoy). Meningkatnya penumpang angkutan udara terutama didorong oleh jumlah lalu lintas penumpang domestik yang tumbuh meningkat sebesar 3,42% (yoy) berbeda arah dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh terkontraksi sebesar -5,99%. Di sisi lain, lalu lintas penumpang internasional tumbuh melambat sebesar -1,94% (yoy) lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,73% (yoy). Adapun lalu lintas penumpang angkutan laut mengalami penurunan dengan pertumbuhan yang terkontraksi sebesar -5,65% (yoy) berbeda arah dibandingkan Triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 41,71% (yoy).

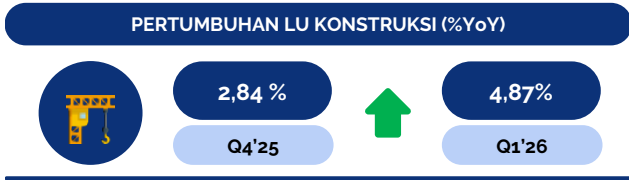
Selanjutnya kedatangan kargo angkutan udara tumbuh meningkat sebesar 30,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,39% (yoy) sedangkan keberangkatan kargo angkutan udara



Sumber: Angkasa Pura I, (diolah BI)

mengalami penurunan menjadi -7,21% (yoy) berbeda arah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,98% (yoy). Dari sisi lalu lintas barang angkutan laut, jumlah lalu lintas angkutan laut tumbuh terkontraksi sebesar 25,97% (yoy) berbeda arah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,91% (yoy). Kinerja transgud yang meningkat didukung ketersediaan konektivitas udara dari dan menuju Bali terus meningkat, baik dari sisi rute maupun pilihan maskapai. Hingga triwulan I 2026, jumlah rute dari/ke Bali mencapai 68 rute penerbangan (domestik dan internasional) yang dioperasikan oleh 55 maskapai.

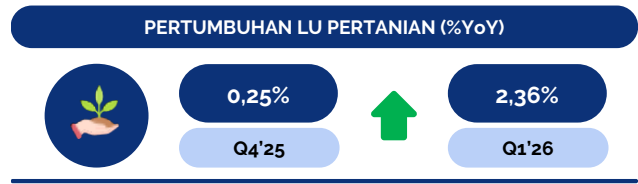
1.3.4. **Konstruksi**



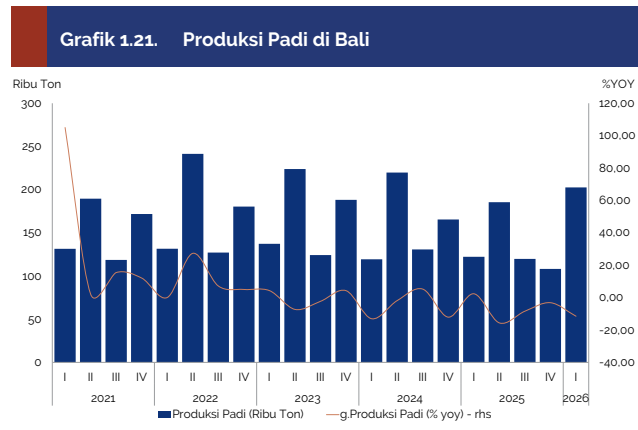
Kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2026 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2026, LU Konstruksi tumbuh 4,87% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,84% (yoy). Meningkatnya kinerja LU Konstruksi utamanya didorong oleh realisasi belanja modal APBN maupun APBD dengan total peningkatan belanja modal sebesar 741% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh terkontraksi sebesar -10,28% (yoy). Beberapa proyek konstruksi pemerintah daerah yang mendorong peningkatan belanja modal diantaranya lanjutan pembangunan Turyapada Tower, penataan area

parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem, pembangunan jembatan akses kawasan Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar, dan perbaikan jalan. Peningkatan kinerja LU Konstruksi juga tercermin dari pembiayaan pada LU Konstruksi yang meningkat dengan pertumbuhan kredit konstruksi sebesar 11,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,95% (yoy). Di sisi lain, kinerja LU Konstruksi lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja PMA dan PMDN yang tumbuh sebesar 8,61% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 23,77% (yoy). Perlambatan dengan kontribusi terbesar terjadi pada sektor hotel dan restoran, serta sektor sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Lebih rendahnya proyek swasta juga tercermin dari realisasi pengadaan semen yang tumbuh terkontraksi sebesar -3,71% (yoy) berbeda arah dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 8,65% (yoy).

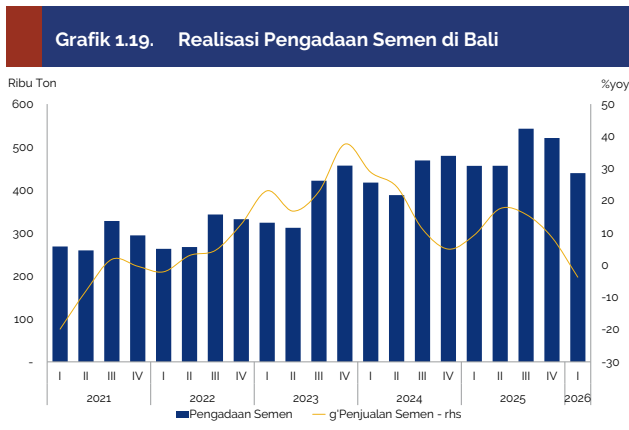
1.3.5. Pertanian



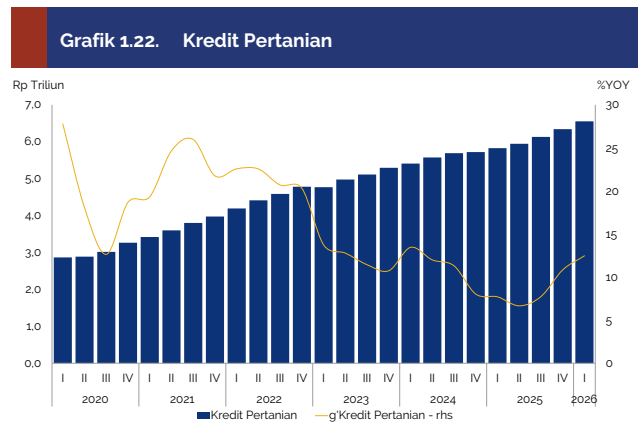
Kinerja LU Pertanian tumbuh meningkat pada triwulan I 2026 seiring peningkatan produksi peternakan dan perkebunan. Pada triwulan I 2026 LU Pertanian tumbuh



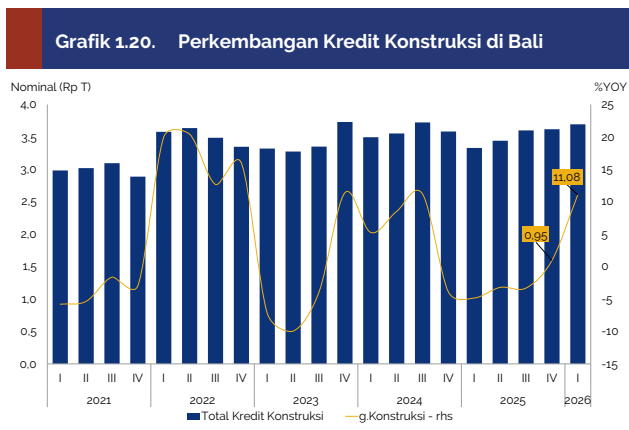
Sumber: Bank Indonesia, diolah



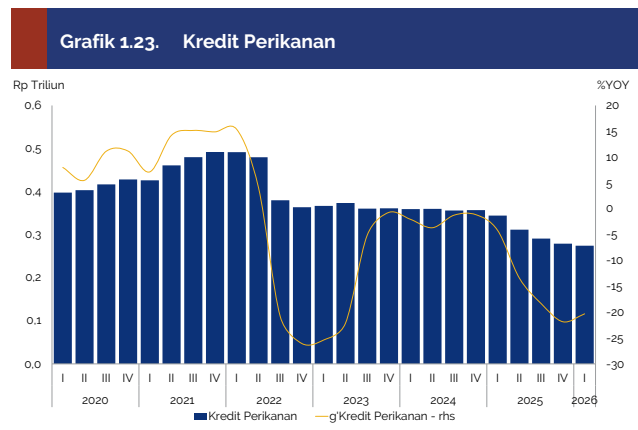
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah BI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

meningkat sebesar 2,36% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,25% (yoy). Meningkatnya kinerja LU Pertanian utamanya bersumber dari subsektor peternakan khususnya daging ayam dan telur ayam serta perkebunan khususnya kakao. Pada triwulan I 2026, terjadi peningkatan produksi telur ayam sebesar 29,26% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,97% (yoy). Di sisi lain, produksi padi pada triwulan I 2026 mengalami penurunan sebesar -11,48% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang juga tumbuh berkontraksi sebesar -3,14% (yoy). Produksi perikanan berdasarkan data Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) juga mengalami penurunan sebesar -24,38% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -3,00% (yoy), salah satunya akibat gelombang tinggi. Dari sisi pembiayaan, kinerja penyaluran kredit pertanian mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 12,47% (yoy) meningkat dari triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 10,84% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, kredit perikanan juga mengalami perbaikan dengan pertumbuhan yang berkontraksi sebesar -20,31% (yoy) membaik dibandingkan triwulan IV 2025 yang berkontraksi sebesar -21,84% (yoy).



BOKS 1



PENGUATAN KETAHANAN PASOKAN PANGAN UNTUK MITIGASI RISIKO EL NINO



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tantular
No. 4, Denpasar



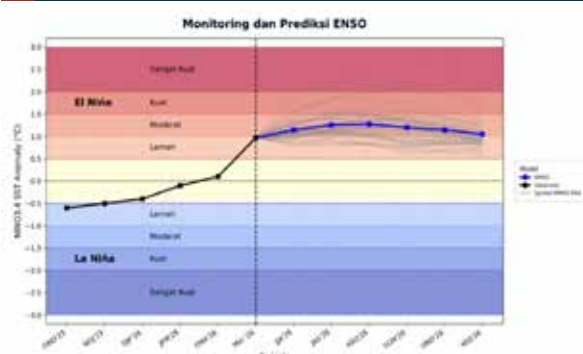
Risiko El Nino menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan Provinsi Bali memasuki triwulan II 2026 hingga akhir tahun 2026. Memasuki periode musim kemarau, kondisi iklim global dan domestik menunjukkan peningkatan risiko cuaca kering yang dapat memengaruhi aktivitas produksi pertanian. BMKG mencatat La Niña lemah yang berlangsung sejak Oktober 2025 telah berakhir pada Februari 2026, sementara sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan memasuki musim kemarau pada April–Juni 2026. Perkembangan indikator ENSO juga

menunjukkan adanya *El Niño Condition*, dengan potensi kejadian EL-Nino pada periode Mei–Juni–Juli 2026. Kondisi tersebut meningkatkan urgensi langkah antisipatif, terutama pada wilayah dan komoditas pangan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ketersediaan air.

Perkembangan indikator ENSO menunjukkan pergeseran menuju EL-Nino lemah pada periode prakiraan, sehingga langkah antisipatif terhadap potensi gangguan pasokan pangan perlu diperkuat.

Bagi Provinsi Bali, risiko EL Nino perlu dicermati karena dapat memengaruhi ketersediaan air pertanian, pola tanam, produktivitas, serta kesinambungan pasokan komoditas pangan strategis. Cuaca kering berpotensi menekan produksi, khususnya pada komoditas yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ketersediaan air dan rentan terhadap perubahan cuaca. Dalam konteks pengendalian inflasi daerah, gangguan produksi pangan dapat meningkatkan volatilitas harga kelompok *volatile food*, terutama pada komoditas dengan bobot konsumsi dan sensitivitas harga yang relatif tinggi seperti beras, cabai rawit, dan bawang

Grafik B1.1. Monitoring dan Prediksi ENSO



Sumber: BMKG, diolah

Tabel B1.1. Rencana Mitigasi Risiko El Nino

Komoditas	Lokasi	Bentuk Intervensi	Tujuan
Cabai rawit	Denpasar	Greenhouse	Menjaga kontinuitas produksi dan mengurangi risiko gagal panen
Padi	Jembrana	Sumur bor	Mendukung ketersediaan air pertanian pada periode kemarau
Bawang merah	Bangli	Pipanisasi	Memperkuat distribusi air dan menjaga produktivitas lahan budidaya

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, diolah

merah. Data Survei Pemantauan Harga (SPH) juga menunjukkan bahwa beras, bawang merah, dan cabai rawit termasuk komoditas yang perlu dicermati dalam pengendalian inflasi pangan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, penguatan ketahanan pasokan pangan menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi daerah. Mitigasi risiko El-Nino tidak hanya diarahkan untuk menjaga produksi pertanian, tetapi juga untuk memperkuat keterjangkauan harga dan menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Upaya tersebut semakin relevan mengingat komoditas pangan strategis seperti beras, cabai rawit, dan bawang merah merupakan bagian dari komoditas pangan yang dipantau secara intensif dalam sistem pemantauan harga pangan nasional, mengingat komoditas tersebut memiliki bobot yang relatif besar terhadap inflasi, dan tingkat sensitivitas produksi yang tinggi terhadap perubahan kondisi cuaca.

Dalam rangka memitigasi dampak risiko El-Nino, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Daerah dan TPID mendorong penguatan kapasitas produksi pangan melalui dukungan sarana prasarana yang berorientasi pada ketahanan air dan perlindungan budidaya. Beberapa rencana intervensi yang akan dilakukan antara lain pengembangan *greenhouse* untuk komoditas cabai rawit di Kota Denpasar, pembangunan sumur bor untuk mendukung produksi padi di Kabupaten Jembrana, serta pipanisasi untuk komoditas bawang merah di Kabupaten Bangli. Rincian rencana penyaluran sarana dan prasarana tersebut disajikan pada Tabel B1.1.

Ketiga program tersebut diarahkan untuk mengurangi kerentanan produksi terhadap cuaca kering, menjaga kesinambungan pasokan komoditas pangan strategis, serta memperkuat efektivitas pengendalian inflasi pangan di Provinsi Bali.





PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi IHK di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 sebesar 2,81% (yoy), menurun dari triwulan IV 2025 (2,91%; yoy), dan masih terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Berdasarkan kelompok inflasi, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang inflasi tertinggi; diikuti oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara spasial, Singaraja mengalami inflasi tahunan (yoy) paling tinggi, sementara Kabupaten Badung mencatat inflasi tahunan (yoy) yang paling rendah.



Inflasi Bulanan Bali

0,56%

Maret 2026, mtm



Inflasi Tahunan Bali

2,81%

Maret 2026, yoy



Rerata 3 Tahun Bali

2,85%

Maret 2026, yoy



Inflasi Tahun Kalender Bali

0,91%

Maret 2026, ytd

Inflasi IHK di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 sebesar 2,81% (yoy), menurun dari triwulan IV 2025 (2,91%; yoy), dan masih terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Tekanan inflasi pada triwulan I 2026 tersebut didorong oleh peningkatan permintaan menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri. Berdasarkan kelompok inflasi, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang inflasi tertinggi; diikuti oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara spasial, Singaraja mengalami inflasi tahunan (yoy) paling tinggi, sementara Kabupaten Badung mencatat inflasi tahunan (yoy) yang paling rendah.

Selanjutnya pada triwulan II 2026, Inflasi Bali diperkirakan meningkat dibandingkan realisasi triwulan I 2026, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar 2,5±1% (yoy). Peningkatan tersebut terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring faktor musiman berupa peralihan musim hujan ke musim kemarau hingga akhir triwulan II 2026 yang berpotensi menghambat produksi sejumlah hortikultura. Selain itu, tekanan inflasi juga bersumber dari meningkatnya permintaan canang sari dan bahan pangan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Lebih lanjut, sinergi TPID di Bali dalam mengimplementasikan kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.1. PERKEMBANGAN INFLASI

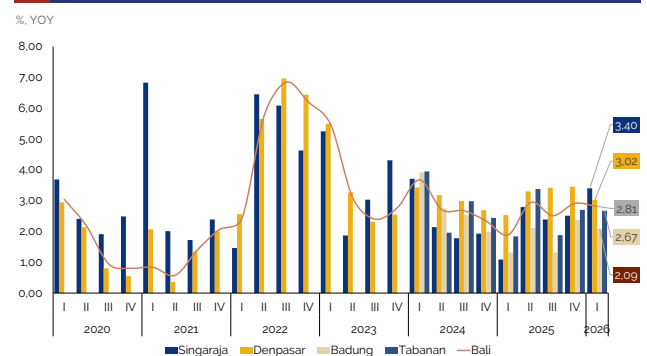
Provinsi Bali pada triwulan I 2026 (Maret 2026) mengalami inflasi sebesar 2,81% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 2,91% (yoy). Hal ini

terutama didorong oleh peningkatan permintaan pada Hari Raya Nyepi dan Idulfitri. Tekanan inflasi pada triwulan I 2026 bersumber dari sepuluh kelompok komoditas yang mengalami inflasi tahunan, yakni Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; Kelompok Kesehatan; Kelompok Transportasi; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; Kelompok Pendidikan; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Di sisi lain, satu kelompok tercatat menunjukkan deflasi tahunan, yaitu Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga memberikan andil inflasi tahunan tertinggi dibandingkan sumbangan kelompok lain. Hal ini terutama disumbang oleh tarif listrik, sewa rumah, tarif air minum pam, iuran pembuangan sampah, kontrak rumah, pasir, tukang bukan mandor, dan semen. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau menyumbang andil inflasi

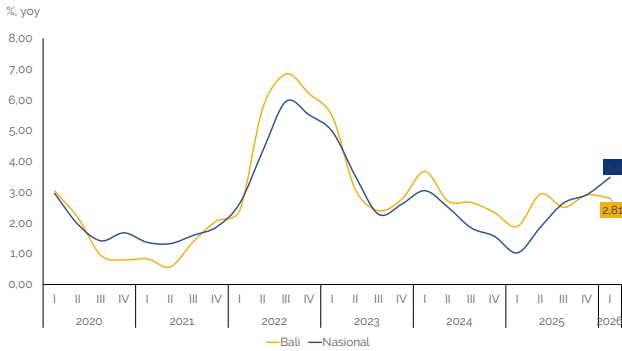
tertinggi kedua. Komoditas utama penyumbang inflasi kelompok ini antara lain daging ayam ras, beras, Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Mesin (SKM), bawang merah, tongkol diawetkan, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, Sigaret Kretek Tangan (SKT), kue basah, ikan teri, nangka muda, taugé/kecambah, buncis, telur ayam ras, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, pepaya, jeruk, kopi bubuk, tomat, kol putih/kubis. Sementara itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi tertinggi ketiga bersumber dari komoditas emas perhiasan, pasta gigi, sabun mandi, canang sari, bedak, popok bayi sekali pakai/diapers, hand body lotion, conditioner, krim wajah, sabun wajah, biaya foto copy, parfum, pembersih/penyegar, dan minyak rambut.

Grafik 2.1. Inflasi Provinsi Bali* (%yoy)



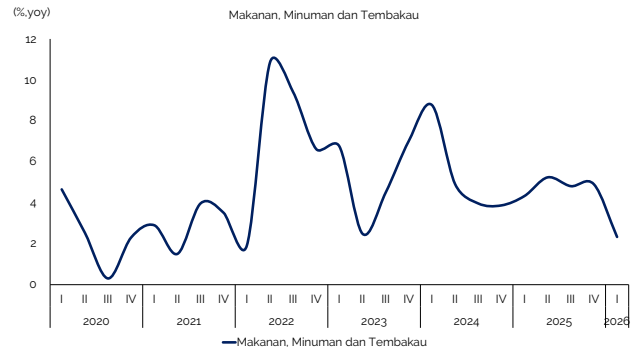
Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, inflasi Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali* (%yoy)

Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.3. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Provinsi Bali*

Sumber : BPS, diolah BI

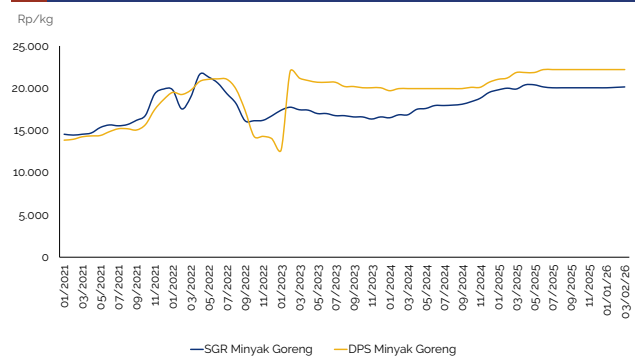
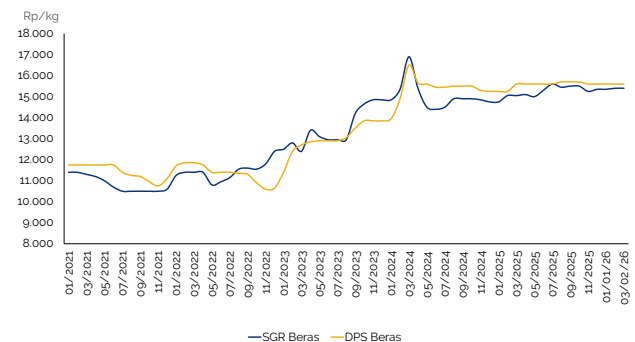
Secara spasial pada triwulan I 2026, secara tahunan seluruh kota/kabupaten IHK di Bali mengalami inflasi.

Inflasi tahunan tertinggi di Bali terjadi di Singaraja sebesar 3,40% (yoy), diikuti oleh Kota Denpasar sebesar 3,02% (yoy), kemudian Kota Tabanan sebesar 2,67% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Badung mencatat inflasi tahunan yang paling rendah di Bali sebesar 2,09% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, tarif listrik, daging ayam ras, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM), merupakan komoditas penyumbang utama inflasi secara tahunan di seluruh kota/kabupaten IHK. Inflasi yang lebih tinggi di mayoritas kota/kabupaten tertahan oleh penurunan harga cabai merah, daging babi, dan cabai rawit yang menyumbang deflasi tahunan terdalam di seluruh kota/kabupaten IHK.

2.2. INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

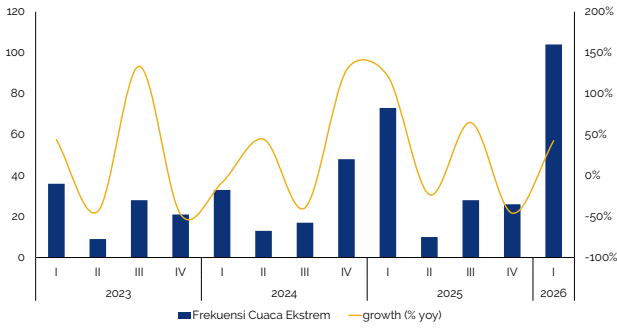
KELOMPOK MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi 2,33% (yoy) pada triwulan I 2026, menurun dibandingkan inflasi triwulan IV 2025 yang sebesar 4,90% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh normalisasi permintaan dan tekanan harga berbagai komoditas pangan strategis pasca periode *high season* dan libur Natal-Tahun Baru. Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan I 2026 didorong oleh daging ayam ras, beras, Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Mesin (SKM), bawang merah, tongkol diawetkan, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, Sigaret Kretek Tangan (SKT), kue basah, dan ikan teri. Kenaikan harga bahan makanan dipicu

Grafik 2.4. Perkembangan Harga Minyak Goreng (Rp/Liter)Sumber : www.bi.go.id/hargapangan, diolah**Grafik 2.5. Perkembangan Harga Beras (Rp/Kg)**Sumber : www.bi.go.id/hargapangan, diolah BI

peningkatan permintaan pada HBKN Nyepi dan Idulfitri, sementara naiknya harga sigaret dipengaruhi kebijakan peningkatan harga dari produsen. Kenaikan harga sigaret oleh produsen merupakan dampak kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10% pada 2023 dan 2024 serta kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2025. Inflasi yang lebih tinggi pada kelompok ini tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas terutama cabai merah dan cabai rawit, yang memberikan andil deflasi didukung terjaganya ketersediaan pasokan.

Grafik 2.6. Frekuensi Cuaca Ekstrem



Sumber : BMKG, diolah

KELOMPOK PAKAIAN DAN ALAS KAKI

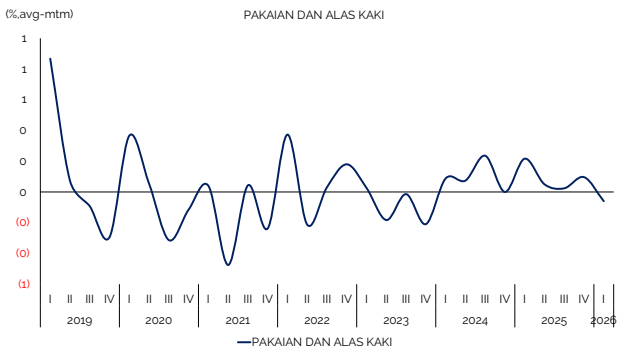
Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami inflasi **0,34% (yoy)** pada triwulan I 2026, menurun dibandingkan inflasi triwulan IV 2025 yang sebesar **1,16% (yoy)**. Penurunan inflasi kelompok ini dipicu berkurangnya permintaan seiring berakhirnya periode libur sekolah dan aktivitas pariwisata pada pascaperiode *high season* libur Natal dan Tahun Baru. Di sisi kelompok Pakaian dan Alas kaki, tekanan inflasi didorong oleh komoditas ongkos

binatu/*laundry* dan baju kaos tanpa kerah/*t-shirt* pria, dan seragam sekolah anak. Di sisi lain, beberapa komoditas masih menyumbang deflasi tahunan pada kelompok ini dan menahan peningkatan inflasi lebih tinggi, yakni baju kebaya dan celana pendek pria.

KELOMPOK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA

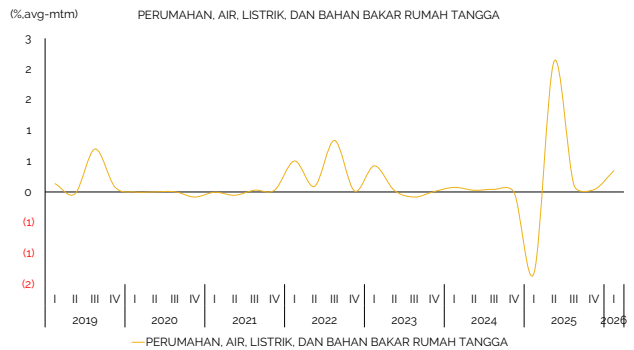
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga mengalami inflasi **7,99% (yoy)** pada triwulan I 2026, meningkat dibandingkan inflasi triwulan IV 2025 sebesar **1,60% (yoy)**. Tekanan inflasi yang meningkat bersumber dari kenaikan tarif listrik, sewa rumah, tarif air minum PAM, iuran pembuangan sampah, dan kontrak rumah. Peningkatan inflasi listrik disebabkan *base effect* diskon tarif listrik yang berlaku pada tahun 2025. Peningkatan tarif sewa rumah dan kontrak rumah didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap properti sewa di Bali. Selain itu, kenaikan tarif air minum PAM seiring kebijakan kenaikan tarif PDAM Tirta Hita Buleleng yang dituangkan dalam Keputusan Bupati

Grafik 2.7. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Provinsi Bali* (%; avg-mtm)



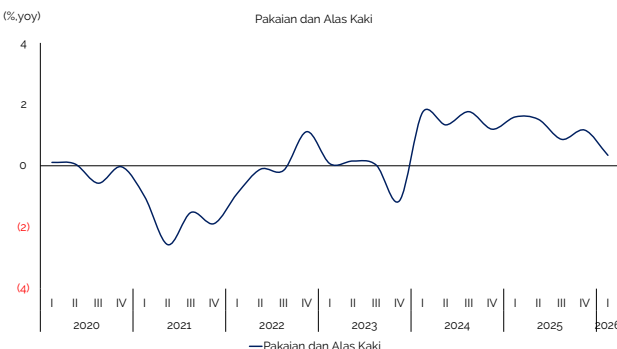
Sumber : BPS, diolah BI *sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.9. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Provinsi Bali* (%; avg-mtm)



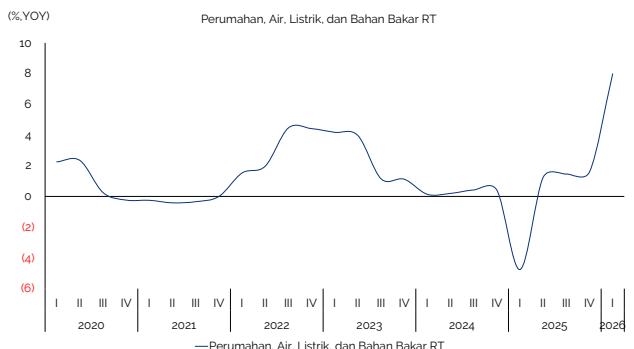
Sumber : BPS, diolah BI

Grafik 2.8. Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Provinsi Bali* (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI *sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.10. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Provinsi Bali* (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI *sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Buleleng Nomor 100.3.3.2/72/HK/2026. Disamping itu, iuran pembuangan sampah turut memberikan andil inflasi seiring dengan peningkatan biaya operasional pengelolaan sampah daerah, penyesuaian biaya pengangkutan dan implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik yang meningkatkan kebutuhan sarana pengolahan. Sementara itu, peningkatan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga keramik, daun pintu, dan kayu lapis seiring permintaan yang terjaga.

KELOMPOK PERLENGKAPAN, PERALATAN, DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA (RT)

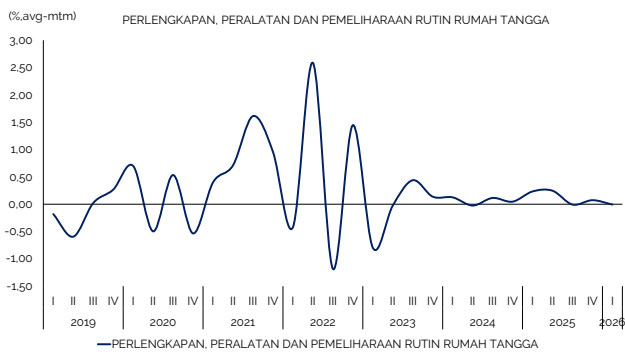
Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT mengalami inflasi 0,92% (yoy) pada triwulan I 2026, menurun dibandingkan inflasi triwulan IV 2025 yang sebesar 1,64% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini dipengaruhi oleh upah asisten rumah tangga dan harga service AC. Peningkatan UMR di berbagai daerah di Bali pada tahun 2026 berdampak terhadap kenaikan upah asisten rumah tangga. Sementara itu, kenaikan harga service AC sejalan dengan meningkatnya permintaan di

tengah kebutuhan konsumen menjelang HBKN Nyepi dan Idulfitri. Sementara itu, tekanan deflasi kelompok ini terutama bersumber dari pembasmi nyamuk spray dan piring didorong kenaikan harga dari produsen.

KELOMPOK KESEHATAN

Kelompok kesehatan mengalami inflasi 1,44% (yoy) pada triwulan I 2026, menurun dibandingkan inflasi triwulan IV 2025 sebesar 3,25% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan harga subkelompok obat-obatan dan jasa layanan kesehatan, terutama vitamin, tarif dokter spesialis, dan obat dengan resep. Peningkatan harga vitamin dan obat dengan resep dipengaruhi oleh harga bahan baku farmasi global, serta penyesuaian harga oleh distributor dan apotek. Selain itu, inflasi kelompok ini turut dipengaruhi oleh kenaikan harga subkelompok jasa rawat jalan terutama tarif dokter spesialis,. Peningkatan tarif tersebut sejalan dengan penyesuaian tarif layanan medis, pelayanan penunjang nonmedis, farmasi, dan pelayanan kesehatan dengan teknologi tertentu yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

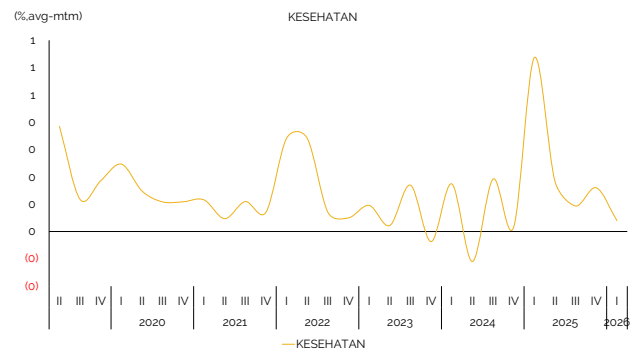
Grafik 2.11. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

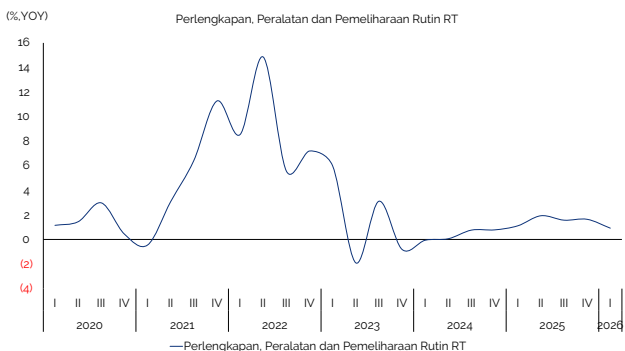
Grafik 2.13. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

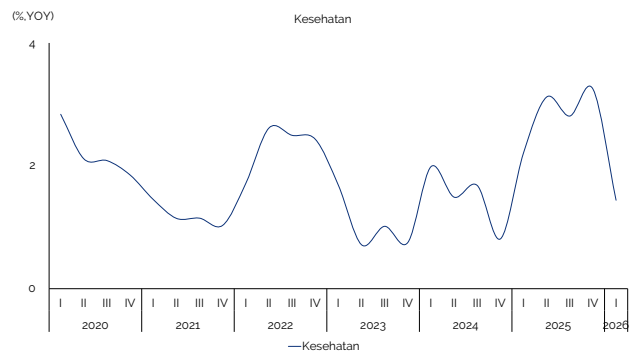
Grafik 2.12. Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.14. Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

54 Tahun 2024 untuk Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit.

KELOMPOK TRANSPORTASI

Inflasi tahunan Kelompok Transportasi menurun dari 1,83% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 1,74% (yoy) pada triwulan I 2026. Secara tahunan, tekanan inflasi kelompok ini disumbang terutama oleh subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan, yaitu pemeliharaan/*service*; tarif parkir; mobil, angkutan udara, cuci kendaraan, angkutan antar kota, dan sepeda motor. Kenaikan biaya pemeliharaan/*service* kendaraan sejalan dengan peningkatan biaya tenaga kerja teknis dan harga suku cadang. Sementara itu, peningkatan tarif parkir sejalan dengan penyesuaian tarif parkir terbaru di Kabupaten Badung melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bagi kendaraan roda dua hingga roda empat sejak Januari 2026. Selain

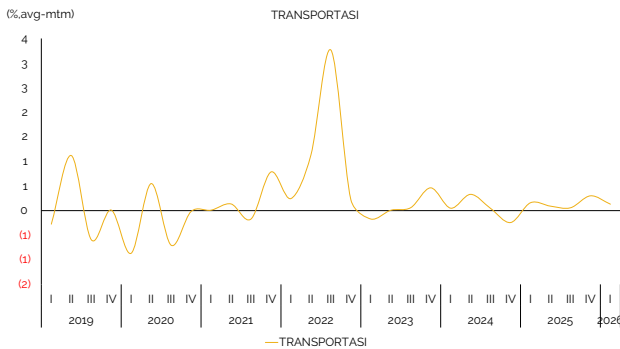
itu, harga mobil, sepeda motor, angkutan udara, dan angkutan antar kotamasih mencatat kenaikan tahunan yang didorong oleh penyesuaian harga suku cadang dan peningkatan permintaan kendaraan pribadi sejalan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat. Biaya cuci kendaraan turut menyumbang inflasi sebagai dampak dari penyesuaian tarif jasa pencucian pada sebagian besar penyedia layanan, mengikuti kenaikan biaya operasional seperti listrik, air, dan tenaga kerja. Lebih lanjut,

Inflasi yang lebih tinggi pada kelompok ini tertahan oleh penurunan harga bensin sejalan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi yaitu Bensin Pertamina dan Pertamina Turbo serta Solar Dexlite dan Pertamina Dex per 1 Februari 2026.

KELOMPOK INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN

Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami inflasi tahunan pada triwulan I 2026 sebesar 0,24% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang

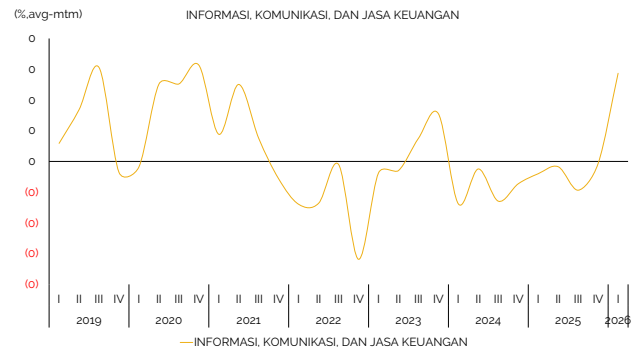
Grafik 2.15. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

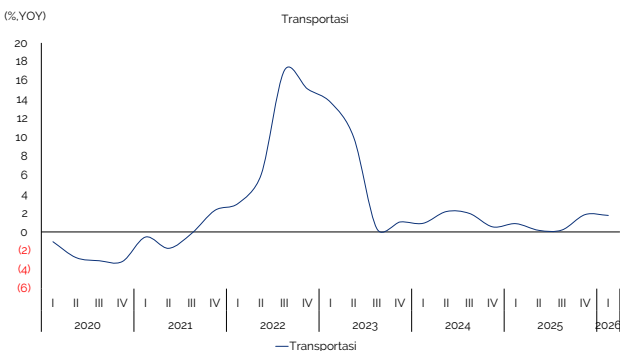
Grafik 2.17. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

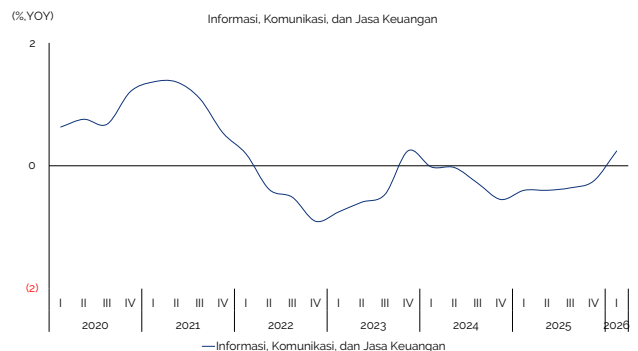
Grafik 2.16. Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.18. Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

sebesar **-0,25% (yoy)**. Inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari subkelompok peralatan informasi dan komunikasi, komoditas yang dominan memberikan inflasi, yaitu laptop/notebook dan *power bank* seiring kebijakan kenaikan harga tahunan di tingkat produsen yang berkaitan dengan strategi penjualan. Sementara itu, aksesoris hp, telepon seluler, dan televisi berwarna, menahan deflasi yang lebih dalam pada kelompok ini dipengaruhi persaingan pasar dan promosi awal tahun. Lebih lanjut, komoditas lain pada kelompok ini seperti tarif telepon, biaya langganan internet, biaya administrasi kartu ATM, dan biaya administrasi transfer uang tidak mengalami perubahan harga.

KELOMPOK REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA

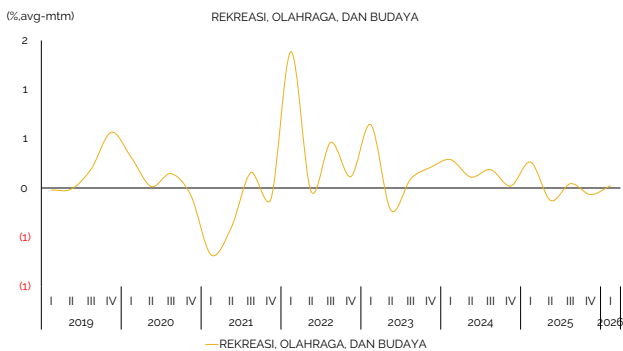
Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya mengalami deflasi -0,38% (yoy) pada triwulan I 2026, turun dibandingkan inflasi triwulan IV 2025 yang sebesar 0,34% (yoy). Penurunan tekanan inflasi pada triwulan ini didorong oleh subkelompok barang rekreasi lainnya

dan olahraga seiring dengan normalisasi permintaan perlengkapan sekolah pasca libur akhir tahun dan berakhirnya masa awal tahun ajaran baru. Penurunan harga terjadi pada beberapa komoditas antara lain buku tulis bergaris dan mainan anak.

KELOMPOK PENDIDIKAN

Inflasi Kelompok Pendidikan pada triwulan I 2026 sebesar 3,09% (yoy), relatif stabil jika dibandingkan capaian pada triwulan IV 2025 sebesar 3,14% (yoy). Terjaganya tekanan inflasi kelompok ini dikontribusi oleh biaya Sekolah Menengah Atas, bimbingan belajar, biaya Sekolah Dasar, biaya Akademi/Perguruan Tinggi, serta biaya Sekolah Menengah Pertama. Hal ini sejalan dengan belum dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, yang umumnya disertai dengan penyesuaian tarif pendidikan, baik dari sisi biaya administrasi, sumbangan pendidikan, maupun layanan penunjang seperti bimbingan belajar atau kursus tambahan.

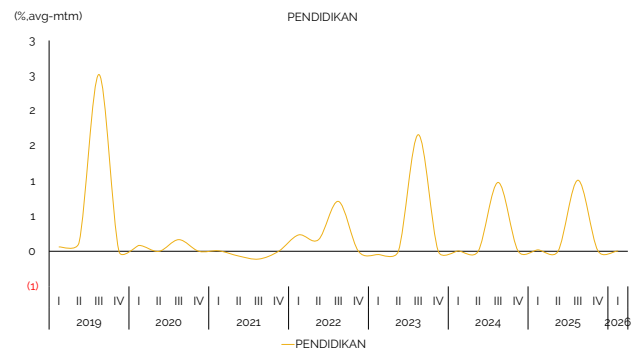
Grafik 2.19. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

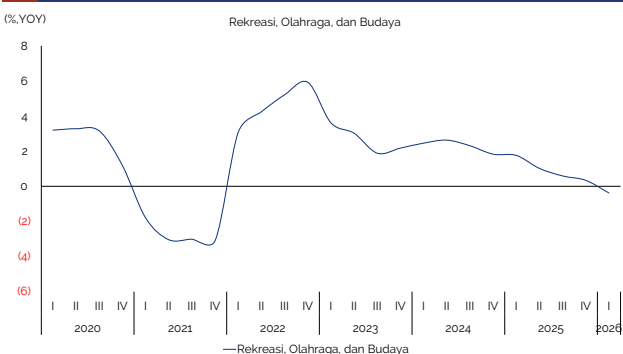
Grafik 2.21. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

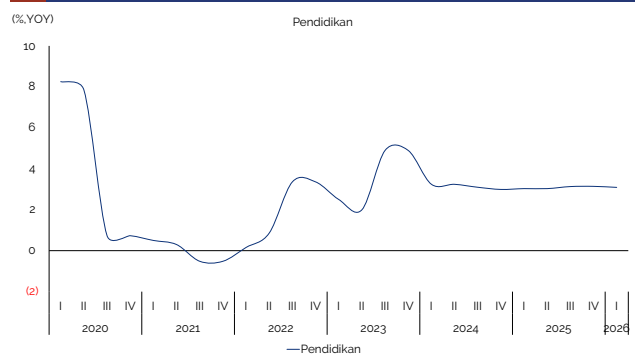
Grafik 2.20. Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.22. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

KELOMPOK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN

Tekanan inflasi pada Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran menurun dari 1,95% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 1,59% (yoy) pada triwulan I 2026. Komoditas yang menyumbang penurunan inflasi antara lain es, ayam goreng, pepes, martabak, soto, sate, mie, dan rujak. Penurunan tekanan inflasi kelompok ini disebabkan oleh penurunan harga beberapa bahan baku makanan jadi di tengah normalisasi permintaan pasca Nataru.

KELOMPOK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi 4,05% (yoy) pada triwulan I 2026, meningkat dari 3,78% (yoy) pada triwulan IV 2025. Meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan ini dipicu kenaikan harga emas perhiasan, pasta gigi, sabun mandi, canang sari, bedak, dan popok bayi sekali pakai/*diapers*. Kenaikan harga emas perhiasan dipicu peningkatan

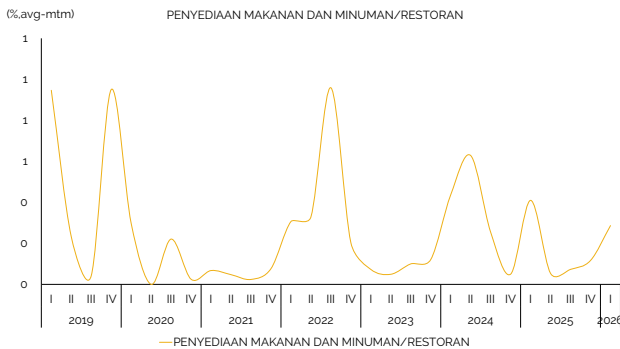
harga emas global sebagai aset *safe haven* di tengah tingginya ketidakpastian global. Sementara itu kenaikan harga pasta gigi, sabun mandi, bedak, dan popok bayi sekali pakai/*diapers*, dipengaruhi kenaikan harga dari distributor. Lebih lanjut kenaikan harga canang sari didorong oleh peningkatan permintaan menjelang HBKN Nyepi.

2.3. Inflasi Menurut Kota

Secara spasial pada triwulan I 2026, tekanan inflasi secara tahunan di mayoritas kota/kabupaten IHK di Bali menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya.

Kabupaten Badung mengalami inflasi tahunan (yoy) paling rendah di Bali, sementara Kota Singaraja mencatat inflasi tahunan (yoy) yang paling tinggi di Bali. Berdasarkan komoditasnya, tarif listrik, daging ayam ras, dan emas perhiasan merupakan komoditas pangan penyumbang utama (10 andil tertinggi) inflasi tahunan di seluruh kota/kabupaten IHK. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi di keempat kota/kabupaten IHK tertahan oleh penurunan harga cabai rawit, daging babi, dan bawang putih yang

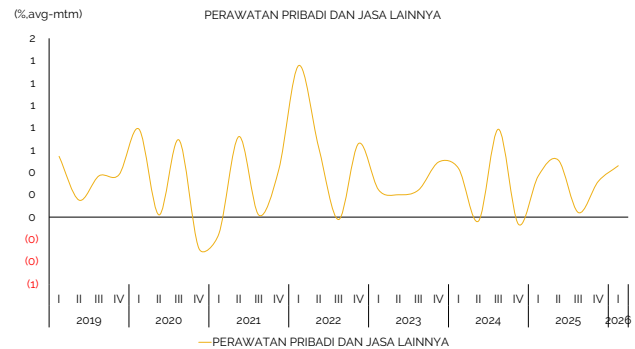
Grafik 2.23. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

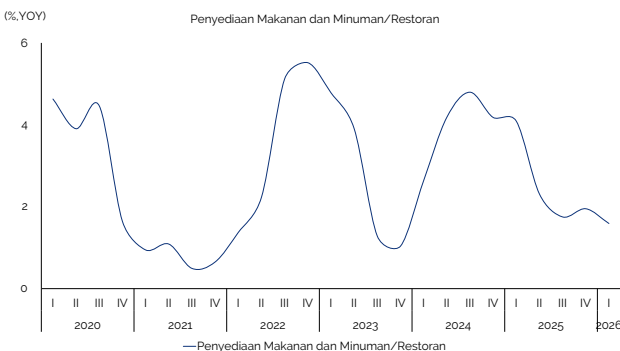
Grafik 2.25. Rata-rata Inflasi Bulanan per Triwulan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (%; avg-mtm)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.24. Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

Grafik 2.26. Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (%; yoy)



Sumber : BPS, diolah BI

*sebelum 2024, Gabungan 2 Kota IHK di Bali

masuk menjadi 10 penyumbang deflasi tahunan terdalam di seluruh kota/kabupaten IHK.

KOTA DENPASAR

Pada triwulan I 2026, inflasi Denpasar sebesar 3,02% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi 3,45% (yoy).

Penurunan inflasi tahunan tersebut terutama bersumber dari delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu makanan, minuman dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga, dan budaya; serta penyediaan makanan dan minuman/restoran. Sementara itu, komoditas di kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan harga, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; pendidikan; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi tahunan tertinggi di Denpasar antara lain tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, sewa rumah, biaya pendidikan SMA, Sigaret Putih Mesin (SPM), biaya bimbingan belajar, kontrak rumah, upah asisten rumah tangga, tongkol diawetkan, pembelian mobil, angkutan udara, kue basah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), pepaya, ikan kembung, pepes, cuci kendaraan, beras, dan canang sari. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi yoy, antara lain: cabai rawit, bensin, cabai merah, bawang putih, wortel, bayam, daging babi, baju kebaya, pembalut

wanita, pisang, pembelian telepon seluler, minyak goreng, celana pendek pria, mainan anak, tomat, tisu basah, baju kaos tanpa kerah anak, baju muslim anak, kemeja panjang katun pria, dan pembersih lantai.

KOTA SINGARAJA

Singaraja mengalami inflasi tahunan sebesar 3,40% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada triwulan IV 2025 sebesar 2,51% (yoy). Dari 11 kelompok pengeluaran, 8 kelompok

menyumbang kenaikan tekanan inflasi, yakni kelompok pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga, dan budaya; pendidikan; penyediaan makanan dan minuman/restoran; perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan tekanan inflasi, yaitu makanan, minuman dan tembakau; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; rekreasi, olahraga, dan budaya. Berdasarkan komoditas, inflasi tahunan di Singaraja disumbang terutama oleh tarif listrik, tarif air minum pam, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, mobil, sigaret kretek tangan (SKT), sigaret putih mesin (SPM), laptop/notebook, sigaret kretek mesin (SKM), pemeliharaan/service, jeruk, sate, tomat, kue basah, es, tongkol diawetkan, bayam, popok bayi sekali pakai/diapers, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Tabel 2.1. Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2023				2024				2025				2026
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy
UMUM	5.50	3.27	2.31	2.54	3.43	3.18	2.99	2.69	2.53	3.30	3.42	3.45	3.02
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	6.85	3.15	4.31	6.36	7.53	4.42	2.79	2.40	4.07	4.51	6.56	5.50	2.78
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	(0.12)	(0.09)	(0.21)	(1.61)	(0.47)	(0.22)	0.73	1.05	1.47	1.42	0.30	0.41	(1.02)
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	4.02	3.82	0.94	0.93	0.10	0.02	0.56	0.55	(3.82)	2.17	1.99	2.28	7.61
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	6.83	(1.12)	3.64	(0.46)	0.89	0.99	2.06	1.68	1.77	2.84	2.28	2.64	1.64
KESEHATAN	1.89	0.72	1.12	0.82	0.21	(1.39)	(0.97)	(0.72)	3.16	5.40	4.95	5.28	1.57
TRANSPORTASI	13.58	9.70	0.14	1.07	1.15	3.90	3.51	2.11	1.96	0.06	0.14	1.41	0.80
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	(0.86)	(0.67)	(0.55)	0.23	0.24	0.14	(0.37)	(0.88)	(0.85)	(0.76)	(0.44)	(0.10)	(0.39)
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	3.02	2.31	1.40	1.91	1.74	2.51	3.05	1.81	1.74	0.29	(0.25)	0.60	(0.31)
PENDIDIKAN	2.71	2.16	5.27	5.27	6.12	6.12	4.03	4.03	4.00	4.00	4.31	4.31	4.32
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	5.01	4.22	1.36	1.07	3.85	7.29	8.68	8.33	7.58	4.15	2.94	3.08	1.52
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	4.37	2.92	3.81	3.35	3.69	2.72	4.39	4.73	4.32	7.63	5.23	5.44	6.30

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 2.2. Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2023				2024				2025				2026
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy
UMUM	5.25	1.87	3.03	4.31	3.71	2.14	1.78	1.93	1.09	2.79	2.39	2.51	3.40
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	6.28	(0.49)	5.38	10.12	10.38	5.33	3.74	4.93	3.34	5.79	5.07	4.70	3.00
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	1.03	1.41	1.18	1.25	1.10	0.56	0.53	0.91	0.99	1.32	1.78	1.27	1.28
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	5.37	5.04	2.71	2.58	0.06	0.19	0.12	0.31	(5.49)	0.14	0.09	(0.05)	8.76
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0.27	(7.24)	(0.55)	(3.28)	(1.92)	(1.59)	(0.23)	(0.34)	0.43	0.70	0.20	1.03	0.33
KESEHATAN	0.56	0.67	0.47	0.41	1.87	2.64	3.36	4.06	2.47	3.10	2.26	2.92	3.06
TRANSPORTASI	14.65	12.16	1.72	0.84	0.16	(0.37)	(0.79)	(1.20)	0.07	0.67	0.81	1.38	1.56
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0.09	0.00	0.18	0.27	(0.76)	(0.60)	(0.96)	(1.02)	(0.31)	(0.11)	(0.34)	(0.35)	0.95
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	7.65	7.87	5.06	3.89	2.00	1.73	1.89	3.01	2.88	1.82	1.43	0.14	(0.02)
PENDIDIKAN	(0.19)	(0.19)	(0.20)	(0.20)	(0.18)	(0.18)	1.30	1.42	1.42	1.42	1.46	1.34	1.34
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	2.61	0.92	0.59	0.66	1.04	1.88	1.88	1.58	1.57	0.33	0.38	0.27	2.32
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	6.12	5.76	6.05	5.22	2.76	2.70	3.82	4.05	4.27	5.15	3.70	5.71	6.24

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 2.3. Perkembangan Inflasi Kabupaten Tabanan per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2024				2025				2026
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy
UMUM	3.95	1.96	2.98	2.44	1.84	3.38	1.88	2.70	2.67
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	7.86	3.90	6.15	5.17	5.28	6.52	2.79	4.53	2.28
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	6.58	2.80	1.29	0.64	1.88	2.38	1.96	1.72	0.52
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	(0.74)	(0.66)	(0.56)	0.71	(7.73)	0.82	2.04	2.09	11.73
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	(2.01)	(1.23)	(1.76)	(0.71)	0.95	1.44	1.71	(0.57)	(0.67)
KESEHATAN	2.57	2.84	2.51	2.21	1.92	1.34	1.34	1.02	(0.06)
TRANSPORTASI	1.49	1.48	1.40	(0.45)	0.65	(0.18)	0.23	1.04	0.68
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	(0.37)	(0.37)	(0.27)	(0.06)	(0.15)	(0.70)	(0.90)	(0.95)	1.52
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	4.98	4.98	2.56	3.04	2.50	2.14	1.37	0.46	(0.89)
PENDIDIKAN	0.59	0.59	2.25	2.25	2.72	2.72	4.13	4.21	3.73
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	3.71	2.89	3.04	0.75	1.72	1.62	1.50	2.44	1.71
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	3.27	(0.31)	2.10	2.02	2.12	4.19	0.58	1.51	0.52

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI

KABUPATEN TABANAN¹

Pada triwulan I 2026, inflasi Kabupaten Tabanan tercatat sebesar 2,67% (yoy) atau lebih rendah dari inflasi triwulan IV 2025 yang sebesar 2,70% (yoy).

Tekanan inflasi di Kabupaten Tabanan bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Sementara itu, kelompok kesehatan tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi tahunan.

Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi tahunan tertinggi di Kabupaten Tabanan antara lain komoditas tarif listrik, beras, daging ayam ras, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bahan bakar rumah tangga, tongkol diawetkan, angka muda, emas perhiasan, es, Sigaret Putih Mesin (SPM), biaya pendidikan Sekolah Menengah Atas, pemeliharaan/service, tomat, telur ayam ras, iuran pembuangan sampah, laptop/notebook, biaya pendidikan Sekolah Dasar, tukang bukan mandor, dan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Sementara, komoditas yang mengalami deflasi tahunan terdalam antara lain cabai rawit, daging babi, canang sari, bawang putih, sabun cair/cuci piring, cabai merah, kangkung, bayam, bensin, jeruk, tempe, sawi putih/pecay/pitsai, terong, masker, sawi hijau, ikan teri, wortel, buku tulis bergaris, susu bubuk, dan makanan hewan peliharaan.

1. Dalam perhitungan inflasi, Kabupaten Tabanan baru masuk menjadi kota IHK pada tahun 2024.

Tabel 2.4. Perkembangan Inflasi Kabupaten Badung per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2024				2025				2026
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy	yoy
UMUM	3,92	2,75	2,53	1,98	1,32	2,11	1,32	2,37	2,09
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	10,11	6,07	4,39	5,06	4,79	5,04	3,41	4,42	1,22
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	3,87	4,59	5,87	2,27	2,14	1,19	0,49	2,34	2,67
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,76	0,99	0,94	0,04	(4,37)	0,65	1,15	1,32	6,21
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0,34	-0	0,01	0,51	0,30	1,20	1,07	0,99	0,55
KESEHATAN	5,04	5,05	4,80	0,12	0,53	0,33	0,45	1,49	0,97
TRANSPORTASI	0,56	0,54	0,83	(1,21)	(0,97)	0,15	(0,20)	3,77	4,96
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0,35	0,35	0,35	0,07	0,07	0,07	0,05	(0,02)	(0,02)
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	2,56	1,92	0,92	0,11	0,38	1,17	1,21	(0,16)	(0,42)
PENDIDIKAN	0,80	0,80	2,49	2,01	2,01	2,01	1,00	1,03	1,03
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	0,59	0,48	0,54	0,22	0,40	0,31	0,35	0,35	1,17
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	1,19	1,85	3,24	1,65	1,33	0,51	(1,36)	1,05	0,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI

KABUPATEN BADUNG²

Pada triwulan I 2026, inflasi Kabupaten Badung tercatat sebesar 2,09% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 2,37% (yoy). Tekanan inflasi di Kabupaten Badung bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, kelompok yang mengalami deflasi yaitu: kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar. Sementara itu, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak memberikan andil/ sumbangan yang signifikan terhadap inflasi tahunan Kabupaten Badung. Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi tahunan tertinggi di Kabupaten Badung antara lain komoditas cabai rawit, bensin, iuran pembuangan sampah, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, buncis, minyak goreng, daging babi, pasta gigi, cabai merah, sawi hijau, kol putih/kubis, canang sari, sabun mandi, bedak, bayam, jeruk, *hand body lotion*, jagung manis, ayam bakar, tongkol diawetkan, ikan layang, baju kaos tanpa kerah, pidang asin, sabun mandi cair, dan seragam sekolah anak. Sementara itu, komoditas yang mengalami deflasi tahunan terdalam antara lain bawang merah, bawang putih, angkutan udara, *deodorant*,

pembersih lantai, pembalut wanita, sabun detergen bubuk, wortel, sikat gigi, dan tomat.

2.4. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat Provinsi Bali serta Kabupaten/Kota se-Bali konsisten berkolaborasi dalam upaya pengendalian inflasi.

Upaya ini dituangkan dalam program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang saat ini disempurnakan menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS). Sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan berlandaskan pada prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Pelaksanaan strategi 4K tersebut oleh TPID se- Bali adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga
 - a. Intensifikasi pelaksanaan operasi pasar murah dan pemantauan harga di seluruh wilayah Bali, terutama menjelang periode HBKN, pada komoditas strategis seperti beras, cabai rawit, cabai merah, telur, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan LPG.
 - b. Monitoring penyaluran beras SPHP melalui koordinasi dengan Bulog, sekaligus mendorong pemanfaatan kios sebagai agen penyaluran SPHP di Bali.

Kegiatan operasi pasar dan pemantauan harga dilaksanakan sebagaimana pada Tabel 3.5

2. Dalam perhitungan inflasi, Kabupaten Badung baru menjadi kota IHK pada tahun 2024.

Tabel 2.5. Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar di Provinsi Bali Periode Semester I 2026

Keterangan		Jumlah
Frekuensi Operasi Pasar/ Pasar Murah		153
Komoditas		Volume
Beras (kg)		267.380
Cabai Merah (kg)		2.419
Cabai Rawit (kg)		6.059
Bawang Merah (kg)		1.547

Sumber: Pemerintah daerah, Bulog, dan Bank Indonesia, diolah BI

2. Ketersediaan Pasokan
 - a. Penyaluran vaksin oleh Distanpangan Kabupaten/ Kota dan Provinsi Bali dalam rangka mencegah penyebaran penyakit menular pada ternak, termasuk upaya mitigasi penyakit LSD melalui penyediaan vaksin, uji sampel ternak, serta imbauan penerapan *biosecurity* kepada peternak. Selain itu, dilakukan distribusi ribuan dosis vaksin LSD di beberapa wilayah sentra ternak serta pengusulan bantuan vaksin ASF kepada pemerintah pusat seiring tingginya populasi babi di Bali.
 - b. Pemberian bantuan teknis dan saran produksi kepada petani padi untuk meningkatkan produktivitas, antara lain memalui pengembangan varietas padi lokal, penyaluran pupu, serta sosialisasi penggunaan pupuk organik berbasis teknologi.
 - c. Tim Penggerak (TP) PKK bersama pemerintah daerah mendorong pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan secara mandiri. TP PKK Badung bersama Ibu Rumah Tangga (IRT) se-Badung melakukan kampanye pemanfaatan lahan rumah dan hidroponik. Selain itu Disdikpora Provinsi Bali mendorong sekolah untuk melaksanakan Gerakan Tanaman Pangan di Sekolah (GTPS) untuk menanam tanaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah.
 - d. Pemberian insentif sektor pertanian, seperti pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) untuk lahan sawah dan tegalan serta penyediaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
 - e. Peningkatan kuota pengiriman sapi Bali guna mendukung ketersediaan pasokan.
 - f. Pelaksanaan panen jagung serentak di Gianyar sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan aparat setempat.
3. Kelancaran Distribusi
 - a. Penguatan kerja sama antarwilayah melalui penandatanganan Kerjasama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) dengan salah satu fokus program prioritas adalah penguatan perdagangan dan ekspor antar provinsi.
 - b. Penguatan kemitraan BUMD melalui penandatanganan MoU antara Perumda Mangu Giri Sedana Badung dengan PT Food Station terkait penyediaan beras, pemanfaatan sarana produksi, serta pengembangan bisnis pangan.
 - c. Optimalisasi peran BUMD dalam distribusi pangan, antara lain Perumda Swatantra Buleleng dan Perumda Sanjyaning Singasana Tabanan sebagai penyalur bahan baku dan pasokan ke SPPG di wilayah masing-masing.
 - d. Penyediaan subsidi distribusi oleh Pemkab Klungkung berupa subsidi ongkos angkut ke Nusa Penida untuk komoditas strategis seperti beras, bawang putih, dan minyak goreng.
 - e. Pelaksanaan KAD antara TPID Kabupaten Badung dan TPID Kabupaten Buleleng untuk komoditas cabai dan sayuran.
 - f. Perluasan kerja sama pasokan pangan antara PHRI dan perumda di Bali guna memperkuat ketersediaan pasokan.
4. Komunikasi Efektif
 - a. Pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin dengan TPID dan TPIP dalam rangka penyusunan program dan implementasi strategi pengendalian inflasi tahun 2026.
 - b. Penguatan digitalisasi informasi pangan, antara lain melalui pemanfaatan *running text* di pasar dan penyebarluasan informasi operasi pasar murah melalui media sosial dan radio, termasuk imbauan untuk belanja bijak dan diversifikasi konsumsi.

- c. Penguatan koordinasi pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan HLM TPID-TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait strategi stabilitas harga dan kelancaran pasokan menjelang HBKN Nyepi dan Idulfitri 2026.
- d. Koordinasi dan monitoring distribusi beras SPHP di seluruh wilayah Bali.
- e. Publikasi kegiatan TPID serta informasi harga dan ketersediaan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk melalui *website* resmi.
- f. Pemanfaatan SIGAPURA (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis) Provinsi Bali dalam memantau perkembangan harga dan neraca pangan.

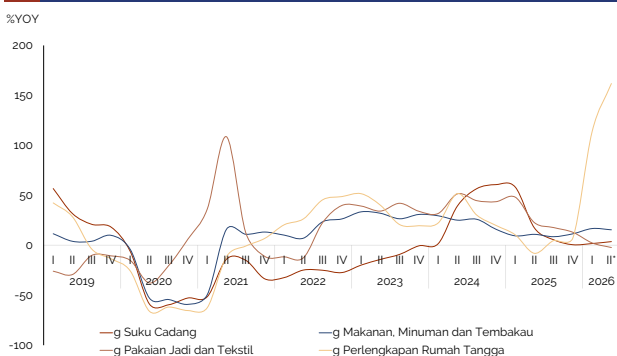
2.5. TRACKING INFLASI TRIWULAN II 2026

Inflasi Bali pada triwulan II 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan realisasi triwulan I 2026, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar 2,5±1% (yoy). Peningkatan tersebut terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Perkembangan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, yakni (i) faktor musiman berupa peralihan musim hujan ke musim kemarau hingga akhir triwulan II 2026 yang berpotensi menghambat produksi sejumlah hortikultura, dan (ii) meningkatnya permintaan canang sari dan bahan pangan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Meski demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi diperkirakan tertahan oleh berkurangnya dampak *base effect* dari program diskon tarif listrik sebesar 50% pada Januari–Februari tahun sebelumnya.

Pada komoditas-komoditas pangan berkejang, tekanan inflasi meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya seiring ketidakpastian cuaca yang berpotensi mengganggu produksi hortikultura dan penurunan produksi bawang merah. Keterbatasan pasokan yang terjadi di tengah peningkatan permintaan, termasuk untuk kebutuhan hari raya, turut mendorong kenaikan harga. Meski demikian, tekanan harga lebih lanjut diperkirakan tertahan oleh peningkatan produksi padi dan aneka cabai pada triwulan II 2026 dibandingkan produksi triwulan sebelumnya, penyaluran beras SPHP oleh Bulog, serta pelaksanaan Gerakan pangan murah TPID di berbagai kabupaten/kota.

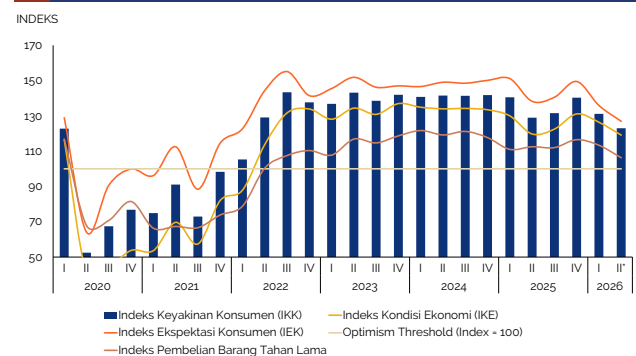
Pada komoditas-komoditas inflasi inti, tekanan meningkat didorong oleh kenaikan permintaan canang sari dan makanan jadi menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan seiring dengan peningkatan aktivitas keagamaan. Selain itu, tren kenaikan harga global, seperti emas akibat meningkatnya permintaan *safe-haven* dan kopi arabika akibat terbatasnya pasokan dari Brasil dan Vietnam dampak anomali cuaca, turut mendorong inflasi. Peningkatan tekanan harga tersebut juga tercermin dalam hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia yang menunjukkan prakiraan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada triwulan II 2026 cenderung meningkat pada sejumlah kelompok komoditas (Grafik 3.28). Selain itu, kenaikan tekanan inflasi turut didukung oleh ekspektasi konsumsi masyarakat yang masih kuat. Hal ini selaras dengan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan nilai Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Ekspektasi Konsumen, dan Indeks Kondisi Ekonomi tetap berada di atas ambang optimis (Grafik 2.28).

Grafik 2.27. Perkembangan Pertumbuhan Penjualan Eceran Konsumsi Rumah Tangga



Sumber : Bank Indonesia, diolah BI

Grafik 2.28. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber : Bank Indonesia, diolah BI

Pada komoditas-komoditas yang harganya diatur pemerintah, melandainya inflasi pada triwulan II 2026 dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sejalan dengan berkurangnya dampak *base effect* dari program diskon tarif listrik sebesar 50% pada Januari–Februari tahun sebelumnya. Meski demikian, terdapat risiko kenaikan harga dari penyesuaian harga LPG nonsubsidi, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi sebagai dampak dari ketidakpastian geopolitik global, serta kebijakan pengenaan *fuel surcharge* 10-100% untuk tiket penerbangan domestik.





BOKS 2



PROGRAM SINAR PANGAN TPID KABUPATEN KLUNGKUNG:

SINERGI PENGENDALIAN INFLASI HARGA PANGAN MELALUI INTEGRASI EKOSISTEM HULU-HILIR



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tantular
No. 4, Denpasar



Kabupaten Klungkung menghadapi tantangan stabilitas harga dan pasokan pangan akibat karakteristik wilayah daratan dan kepulauan yang menimbulkan disparitas biaya distribusi. Perbedaan harga antar wilayah dapat meningkatkan tekanan inflasi daerah, khususnya pada beras sebagai pangan pokok. Petani lokal masih menghadapi fluktuasi harga dan ketidakpastian penyerapan hasil panen, sehingga posisi tawar mereka melemah. Untuk mengatasi hal ini, program **SINAR PANGAN (Sinergi Pengendalian Inflasi Harga Pangan)** dirancang sebagai intervensi terintegrasi yang memperkuat rantai nilai hulu-hilir, didukung APBD, untuk menjamin stabilitas pasokan, harga kompetitif, dan perlindungan bagi petani. Program SINAR PANGAN memiliki tujuan utama: **menstabilkan harga dan pasokan pangan pokok, mengurangi disparitas harga antar wilayah melalui intervensi logistik, memberikan kepastian penyerapan hasil panen bagi petani, dan memperkuat kemandirian pangan daerah** dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai *off-taker* utama beras lokal untuk menekan inflasi.

Pelaksanaan program dilakukan melalui integrasi operasional Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) sebagai penyedia pupuk organik, Bima Juara (penyerapan gabah), dan subsidi transportasi laut antar wilayah untuk membentuk satu ekosistem hulu-hilir yang efisien. ASN dilibatkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) untuk menjamin pasar yang pasti bagi beras lokal, didukung oleh penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Klungkung dan 3 KUD mitra utama. Teknologi juga dimanfaatkan, termasuk pengolahan limbah menjadi pupuk di TOSS Center, penggunaan dryer gabah, *Rice Milling Unit* (RMU) untuk giling, monitoring stok digital di KUD, pembayaran QRIS ASN, serta pemantauan harga melalui WhatsApp dan website Sigapura. Serapan gabah KUD per bulan mencapai 225 Ton (Panca Satya), 100 Ton (Jaya Werdhi), dan 50 Ton (Artha Wiguna), dengan distribusi beras ke ASN sebanyak 622.770 kg.

BOKS 2

Tabel B2.1. Ringkasan Dukungan Program SINAR PANGAN dari Hulu Hingga Hilir untuk Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan

Pilar / Komponen	Kegiatan	Volume / Realisasi
Hulu	TOSS Center: penyedia pupuk organik untuk mendukung produksi petani	113.700 Ton pupuk
Tengah	Bima Juara: penyerapan gabah petani dengan harga layak	3.733.600 kg gabah
Hilir	Subsidi Transportasi Laut untuk distribusi antar wilayah	112 kali realisasi
Penyerapan gabah oleh KUD Panca Satya	Pembelian gabah petani	225 Ton/bulan
Penyerapan gabah oleh KUD Jaya Werdhi	Pembelian gabah petani	100 Ton/bulan
Penyerapan gabah oleh KUD Artha Wiguna	Pembelian gabah petani	50 Ton/bulan

Sumber: TPID Kabupaten Klungkung, diolah

Grafik B2.1. Alur Integrasi Ekosistem Hulu-Hilir Program SINAR PANGAN



Sumber: TPID Kabupaten Klungkung, diolah

Sumber: TPID Kabupaten Klungkung, diolah

Program SINAR PANGAN mengintegrasikan dukungan produksi, penyerapan gabah, distribusi beras, serta pembentukan permintaan melalui ASN untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Klungkung.

Program berhasil menjaga harga beras di tingkat konsumen dan harga gabah di tingkat petani, menciptakan kemandirian stok pangan desa melalui KUD, memastikan ASN sebagai off-taker, menurunkan disparitas harga antar wilayah, dan menjaga inflasi Klungkung tetap terkendali. Kesejahteraan petani meningkat, dan Kabupaten Klungkung memperoleh predikat "Sangat Inovatif" pada *Innovative Government Award 2025*. **Evaluasi menunjukkan sinergi dengan Korpri efektif menciptakan permintaan stabil bagi hasil panen petani lokal.** Pengembangan selanjutnya fokus pada perluasan kapasitas giling (RMU) pada KUD mitra agar dapat melayani pasar lebih luas. Tantangan yang masih dihadapi meliputi risiko alih fungsi lahan bagi bahan baku gabah jangka panjang dan kondisi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu kelancaran distribusi antarpulau.





BAB III

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tetap terjaga. Hal ini tercermin dari peningkatan penyaluran kredit, terutama pada sektor-sektor utama pendorong ekonomi Bali. Otoritas bersama perbankan di Bali terus berupaya menjaga momentum tersebut melalui optimalisasi fungsi intermediasi, dengan tetap memastikan risiko kredit tetap terkendali.


Pertumbuhan Kredit*

*Lokasi Proyek

 Tw I 2026, yoy **9,05%**

 Tw IV 2025, yoy **7,28%**

**Pertumbuhan Dana Pihak
Ketiga****

*Lokasi Proyek

 Tw I 2026, yoy **7,08%**

 Tw IV 2025, yoy **7,60%**

Pertumbuhan UMKM*

*Lokasi Proyek

 Tw I 2026, yoy **5,15%**

 Tw IV 2025, yoy **5,15%**

Investasi

 Tw I 2026, yoy **20,89%**

 Tw IV 2025, yoy **14,66%**

Non-Performing Loan*

*Lokasi Proyek

 Tw I 2026, yoy **1,38%**

 Tw IV 2025, yoy **1,19%**

Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tetap terjaga. Hal ini tecermin dari peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit, utamanya pada sektor-sektor utama pendorong ekonomi Bali. Otoritas bersama perbankan di Bali terus berupaya menjaga momentum tersebut melalui optimalisasi fungsi intermediasi, dengan tetap memastikan risiko kredit tetap terkendali. Dengan kondisi tersebut, masih tersedia ruang untuk mendorong penyaluran kredit, di tengah risiko kredit yang relatif rendah, khususnya dalam rangka diversifikasi dan pemerataan pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan penyaluran jenis kredit, peningkatan pertumbuhan kredit tersebut utamanya didorong oleh akselerasi kredit investasi yang mencerminkan mulai meningkatnya aktivitas usaha dan ekspansi bisnis, di tengah prospek ekonomi yang tetap terjaga. Hal ini juga turut mengindikasikan peningkatan keyakinan pelaku usaha untuk melakukan pengembangan usaha dan penambahan kapasitas produksi. Kredit modal kerja juga masih tumbuh positif meskipun relatif terbatas, sejalan dengan kebutuhan operasional usaha yang masih berlangsung stabil.

Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi kembali melambat dari triwulan sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan perlambatan konsumsi rumah tangga pasca normalisasi permintaan setelah periode HBKN Galungan dan Kuningan. Selain itu, hal ini juga terkait dengan adanya kecenderungan preferensi yang lebih selektif dalam melakukan pengeluaran. Meskipun demikian, dari sisi komposisi, penyaluran kredit di Bali relatif seimbang antara kredit konsumsi, modal kerja, dan investasi, yang menunjukkan distribusi pembiayaan yang proporsional untuk mendukung aktivitas ekonomi baik pada sektor rumah tangga maupun korporasi.

Selanjutnya, kredit UMKM terus tumbuh dengan pangsa pembiayaan yang tetap tinggi. Peran UMKM menjadi krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga keberlanjutan kinerja perekonomian Bali secara keseluruhan. Ke depan, penguatan pembiayaan lintas sektor, khususnya pada sektor produktif di luar pariwisata, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan daerah sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian Bali secara berkelanjutan.

3.1. KINERJA PERBANKAN

Pada triwulan I 2026, kinerja bank umum di Bali tetap menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun dengan laju yang lebih terbatas. Pertumbuhan aset tercatat sebesar 6,46% (yoy), melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,94%

(yoy). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit yang belum meningkat secara signifikan seiring moderasi aktivitas ekonomi pada periode *low season*. Kondisi ini juga sejalan dengan perlambatan kinerja Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang mencerminkan adanya penyesuaian terhadap prospek ekonomi dan permintaan pembiayaan pada triwulan berjalan.

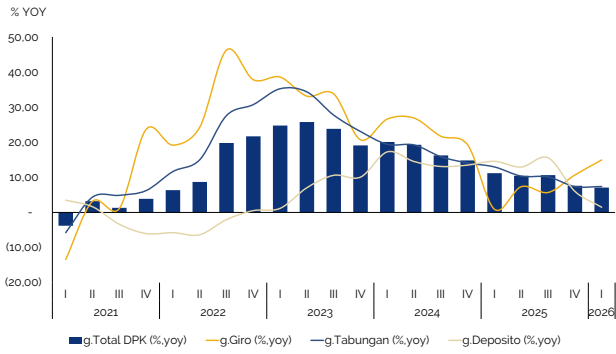


Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

3.1.1. Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 7,08% (yoy), melambat dibandingkan kinerja pertumbuhan DPK triwulan sebelumnya sebesar 7,60% (yoy). Hal ini utamanya dipengaruhi oleh pertumbuhan tabungan, yang mencerminkan penyesuaian preferensi masyarakat terhadap instrumen investasi alternatif serta peningkatan

Grafik 3.2. Perkembangan DPK Perbankan

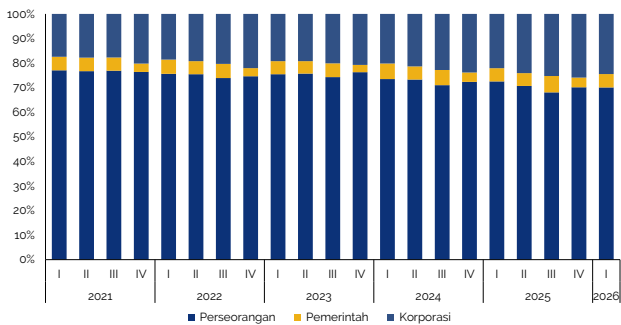


Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

penggunaan dana untuk kebutuhan konsumsi. Sementara itu, pertumbuhan giro yang tetap positif mengindikasikan aktivitas ekonomi dan transaksi usaha yang masih berjalan cukup baik. Selain itu, kinerja deposito yang tetap terjaga mencerminkan likuiditas perbankan yang masih memadai serta preferensi masyarakat untuk menjaga dana pada instrumen yang relatif aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Secara keseluruhan, kondisi DPK di Bali masih berada pada level yang memadai meskipun menunjukkan tren pertumbuhan yang melambat.

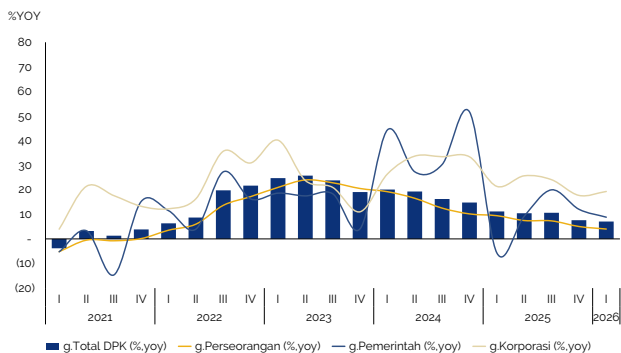
Pada triwulan I 2026, kepemilikan DPK di Bali masih didominasi oleh DPK perseorangan. Pangsa DPK perseorangan tercatat sebesar 60,93% dari total DPK, relatif stabil dibandingkan pangsa pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, pangsa DPK korporasi dan pemerintah masing-masing sebesar 21,28% dan 4,73%. Pertumbuhan DPK perseorangan tercatat sebesar 4,02% (yoy), melambat dibandingkan pangsa triwulan sebelumnya yang mencapai 5,06% (yoy), yang mengindikasikan adanya perlambatan penempatan dana oleh masyarakat. Selain dipengaruhi peningkatan kebutuhan konsumsi, kondisi tersebut juga mencerminkan adanya diversifikasi penempatan dana masyarakat ke instrumen investasi alternatif. Di sisi lain, pertumbuhan DPK pemerintah turut melambat menjadi sebesar 8,84% (yoy). Perlambatan tersebut terindikasi dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat terkait transfer ke daerah serta sentralisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Sementara itu, DPK korporasi menunjukkan pertumbuhan yang semakin kuat, yakni sebesar 19,31% (yoy) pada triwulan I 2026. Peningkatan

Grafik 3.3. Pangsa Kepemilikan DPK



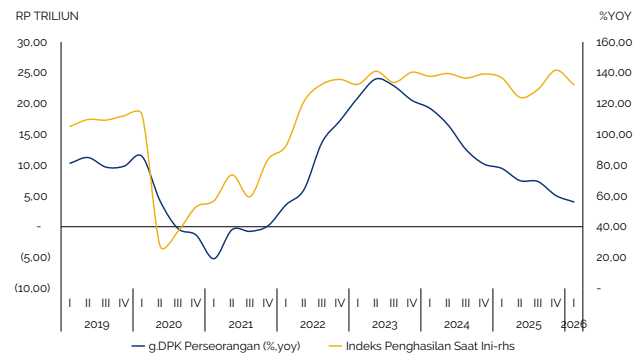
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.4. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Kepemilikan



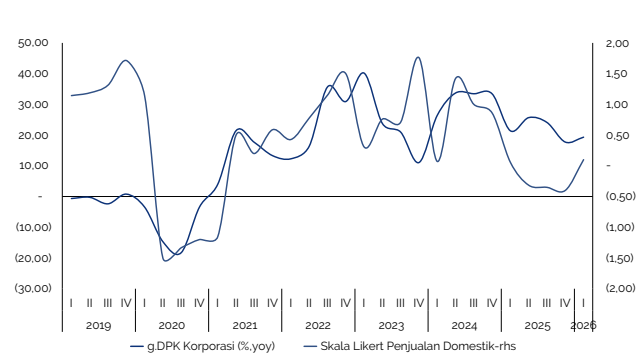
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.5. Perkembangan DPK Perseorangan dan Indeks Penghasilan Saat Ini



Sumber: Laporan Bank Umum BI dan BPS (diolah)

Grafik 3.6. Perkembangan DPK Perseorangan dan Skala Likert Penjualan Domestik



Sumber: Laporan Bank Umum dan Laporan Liaison BI (diolah)

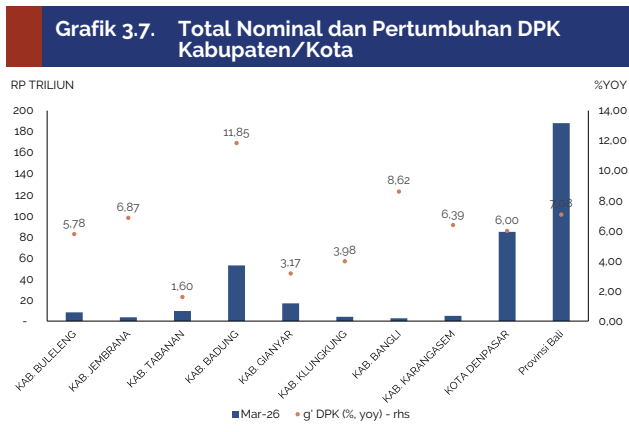
tersebut didorong oleh membaiknya aktivitas usaha dan penjualan domestik, sebagaimana terkonfirmasi melalui hasil liaison dengan pelaku usaha di Bali.

Secara spasial, beberapa Kabupaten dan Kota di Bali mencatat pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata DPK provinsi. Pertumbuhan DPK tertinggi tercatat di Kabupaten Badung sebesar 11,85% (yoy), sedangkan pertumbuhan DPK terendah terjadi di Kabupaten Tabanan sebesar 1,60% (yoy). Tingginya pertumbuhan DPK di Kabupaten Badung didorong oleh aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata yang meningkatkan penghimpunan dana dari pelaku usaha atau rumah tangga. Selain itu konsentrasi rekening operasional perhotelan berbintang turut mendukung pertumbuhan DPK di wilayah tersebut. Proporsi penghimpunan DPK masih terkonsentrasi di wilayah primadona pariwisata, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, yang mencapai 87% dari total DPK. Pertumbuhan penghimpunan DPK di daerah pariwisata tercatat 7,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK di wilayah nonpariwisata (Buleleng,

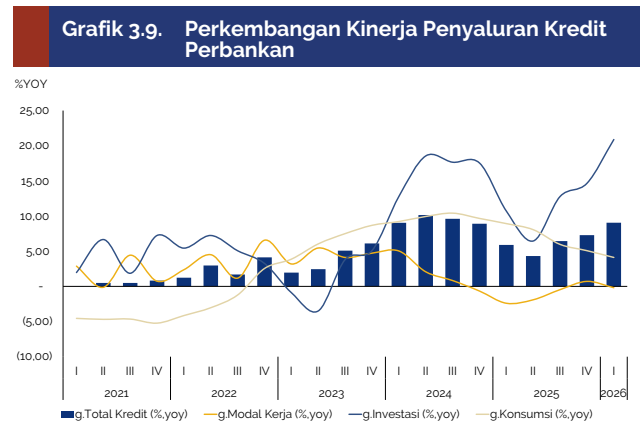
Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem) sebesar 6,07% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang masih terkonsentrasi di kawasan pariwisata tetap menjadi motor utama penghimpunan DPK di Bali.

3.1.2. Penyaluran Kredit

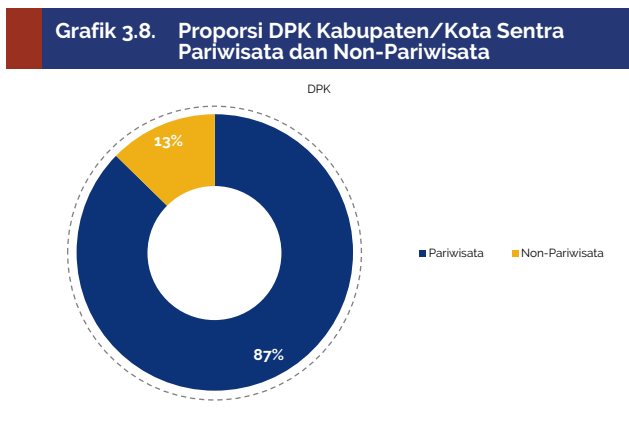
Penyaluran kredit di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 9,05% (yoy), meningkat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 7,28% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh akselerasi kredit investasi yang mencerminkan mulai meningkatnya aktivitas usaha dan ekspansi bisnis, di tengah prospek ekonomi yang tetap terjaga. Kredit modal kerja juga masih tumbuh positif sebesar 0,19% (yoy), meskipun relatif terbatas, sejalan dengan kebutuhan operasional usaha yang masih berlangsung stabil. Sementara itu, kredit investasi tumbuh signifikan mencapai 20,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,66% (yoy), mengindikasikan meningkatnya keyakinan pelaku usaha untuk melakukan pengembangan usaha dan penambahan kapasitas produksi. Pertumbuhan kredit konsumsi kembali melambat menjadi 4,11% (yoy)



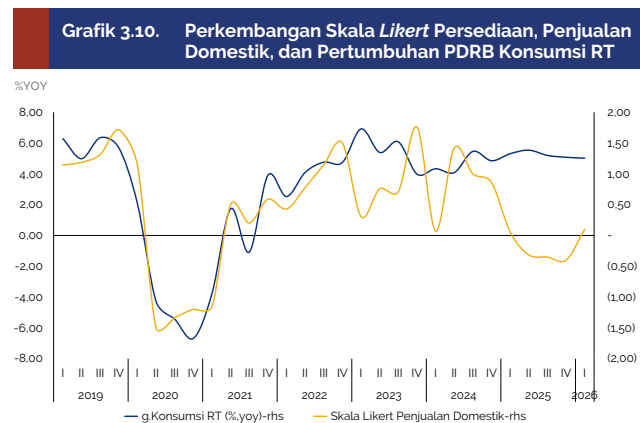
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

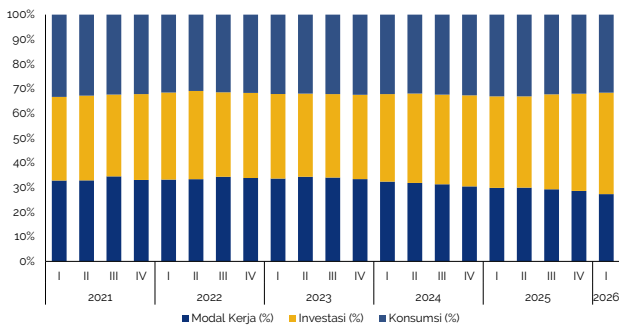


Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)



Sumber: Laporan Liaison, Bank Indonesia dan BPS (diolah)

Grafik 3.11. Pangsa masing-masing kategori kredit di Provinsi Bali



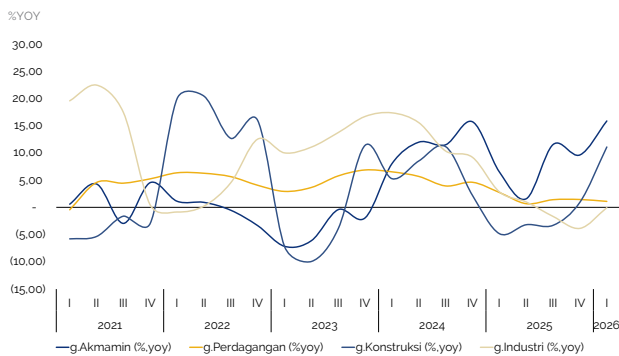
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

dari sebelumnya 5,08% (yoy), mencerminkan pasca normalisasi permintaan setelah periode HBKN Galungan dan Kuningan dan preferensi yang lebih selektif dalam melakukan pengeluaran. Meskipun demikian, dari sisi komposisi, penyaluran kredit di Bali relatif seimbang antara kredit konsumsi, modal kerja, dan investasi, menunjukkan distribusi pembiayaan yang proporsional untuk mendukung aktivitas ekonomi baik pada sektor rumah tangga maupun korporasi.

Berdasarkan lapangan usaha (LU), peningkatan penyaluran kredit di Bali pada triwulan I 2026 terjadi pada sebagian besar sektor utama, terutama LU Akmamin dan LU Konstruksi. Meskipun terdapat perlambatan di beberapa sektor, pertumbuhan kredit tetap didorong oleh LU Akmamin yang tercatat 15,86% (yoy) serta LU Konstruksi yang mengalami perbaikan menjadi 11,08% (yoy) setelah sempat berkontraksi pada tahun 2025. Kinerja kredit Akmamin dan Konstruksi yang relatif tinggi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan berbagai proyek pariwisata dan beberapa infrastruktur, khususnya di wilayah Badung dan Gianyar. Sektor perdagangan tumbuh sebesar 1,09% (yoy). Sementara itu, sektor industri mengalami kontraksi sebesar -0,06% (yoy). Secara keseluruhan, penyaluran kredit di sektor pariwisata tetap berada dalam tren positif dan terus menjadi lokomotif pertumbuhan kredit di Provinsi Bali.

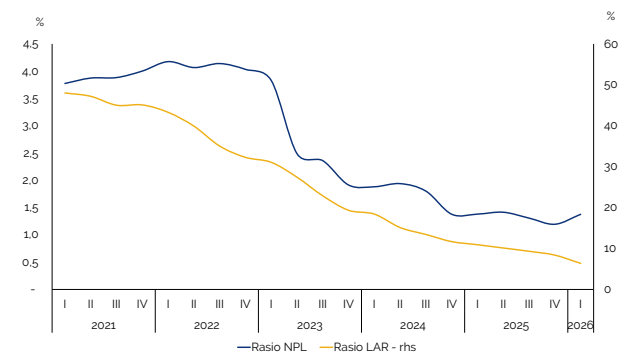
Kualitas penyaluran kredit di Bali hingga triwulan I 2026 tetap terjaga, tecermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang berada di bawah ambang batas 5%. Pada periode laporan, NPL tercatat sebesar 1,38%, sedikit

Grafik 3.12. Perkembangan Kredit Sektoral



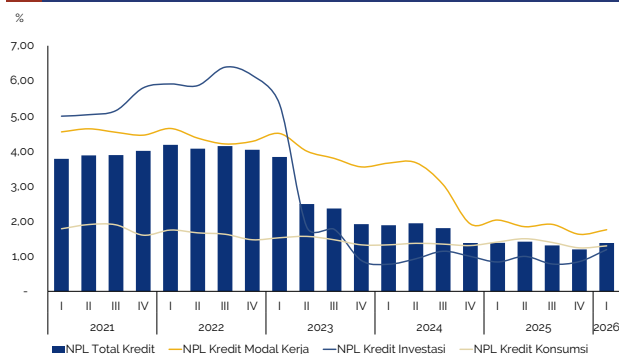
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.14. Perkembangan Perbandingan NPL dan LAR Kredit



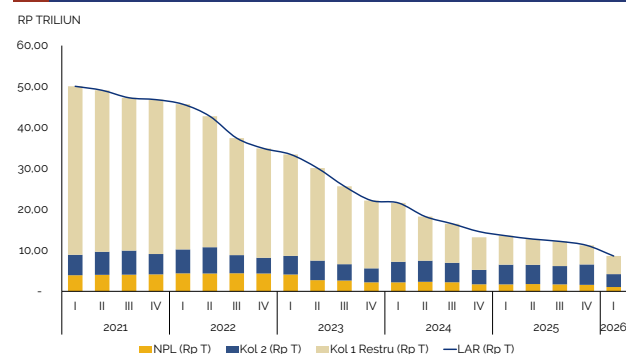
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.13. Perkembangan NPL Kredit



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.15. Perkembangan LAR Kredit



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

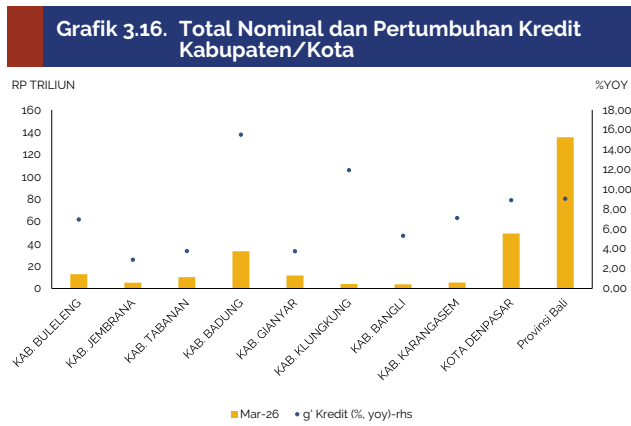
meningkat dibandingkan NPL triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan rasio NPL terutama didorong oleh peningkatan NPL pada kredit investasi dan konsumsi. Meski demikian, rasio Loan at Risk (LAR) menunjukkan perbaikan, turun dari 8,39% menjadi 6,37% pada triwulan I 2026. Tren penurunan LAR ini konsisten sejak akhir 2020 dan diperkirakan berlanjut seiring pemulihan ekonomi Bali, khususnya didorong oleh normalisasi aktivitas pariwisata. Perbaikan berkelanjutan pada LAR memberikan sinyal positif bahwa risiko kredit di Bali terjaga.

Secara spasial, penyaluran kredit seluruh kabupaten dan kota di Bali mengalami pertumbuhan pada triwulan I 2026. Pertumbuhan kredit tertinggi terjadi di Kabupaten Badung sebesar 15,51% (yoy), sementara terendah di Jembrana sebesar 2,90% (yoy). Proporsi penyaluran kredit terkonsentrasi pada daerah sentra pariwisata (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) yakni sebesar 77% dan daerah nonpariwisata sebesar 23%. Di antara wilayah tersebut, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki pangsa terbesar sejalan dengan perannya sebagai pusat

aktivitas ekonomi, perdagangan, jasa, dan pariwisata di Bali. Sementara itu, wilayah nonpariwisata memiliki skala kebutuhan pembiayaan yang relatif lebih rendah sehingga pangsa kredit penyalurannya relatif terbatas. Kondisi tersebut juga tercermin pada pertumbuhan penyaluran kredit di daerah pariwisata tercatat 9,77% (yoy), lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit daerah non-pariwisata tumbuh 6,69% (yoy).

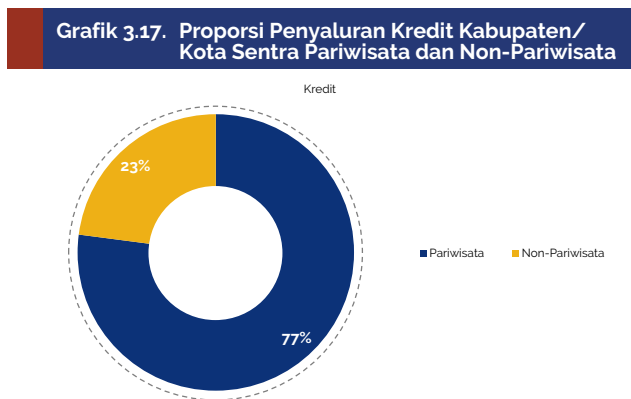
3.1.3. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Tingkat intermediasi perbankan di Bali pada triwulan I 2026 relatif stabil, sehingga masih terdapat ruang optimalisasi penyaluran kredit. Hal ini tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau rasio antara penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank dibandingkan penghimpunan DPK, sebesar 72,05% dan masih berada di bawah rentang yang ditetapkan¹. Rasio tersebut masih berada di bawah kisaran ideal yang menandakan bahwa pertumbuhan penghimpunan DPK yang cukup tinggi belum sepenuhnya diimbangi dengan ekspansi kredit. Dengan kondisi likuiditas yang memadai, perbankan memiliki kapasitas yang cukup untuk meningkatkan pembiayaan kepada sektor riil dan masyarakat. Ke depan, penguatan intermediasi perbankan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan volume kredit, tetapi juga pada perluasan distribusinya secara lebih merata lintas lapangan usaha. Hingga saat ini, penyaluran kredit masih relatif terkonsentrasi pada sektor-sektor yang terkait langsung dengan pariwisata sebagai penopang utama perekonomian Bali. Oleh karena itu, diversifikasi pembiayaan ke sektor produktif lainnya menjadi krusial

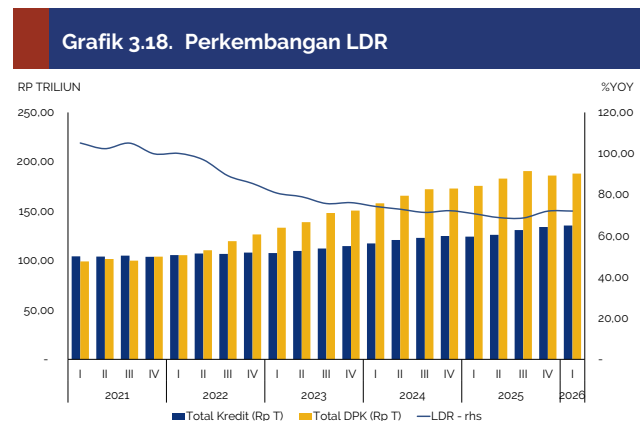


Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

1. Berdasarkan PBI No.17/11/PBI/2015, tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio LDR ditetapkan pada rentang 78%-92%.



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

untuk memperluas basis pertumbuhan, mengurangi ketergantungan pada satu sektor, serta menciptakan sumber-sumber ekonomi baru, sehingga akan memperkuat ketahanan struktural dan meningkatkan daya saing perekonomian Bali secara berkelanjutan.

3.2. KINERJA KEUANGAN KORPORASI

3.2.1. Sumber Kerentanan Korporasi

Kinerja korporasi di Bali masih menghadapi sejumlah kerentanan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun domestik, terutama karena tingginya keterkaitan dengan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Ketergantungan yang besar terhadap aktivitas pariwisata menyebabkan korporasi pada sektor akomodasi, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan menjadi relatif sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi global, mobilitas wisatawan, maupun dinamika daya beli masyarakat. Adapun pada triwulan I 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai sekitar 1,47 juta orang, yang menunjukkan perlambatan sejalan dengan pola musiman pariwisata pada periode *low season* di awal tahun.

Keberlangsungan pertumbuhan wisatawan menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja korporasi. Tidak hanya dari kuantitas jumlah wisatawan yang perlu diperhatikan, melainkan juga kualitas pariwisata menjadi yang dihasilkan. Upaya menjaga daya tarik dan daya saing destinasi wisata perlu terus diperkuat. Ke depan, penguatan konsep *quality tourism* menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi di Bali. Dalam konteks tersebut, isu pengelolaan sampah, kemacetan, serta

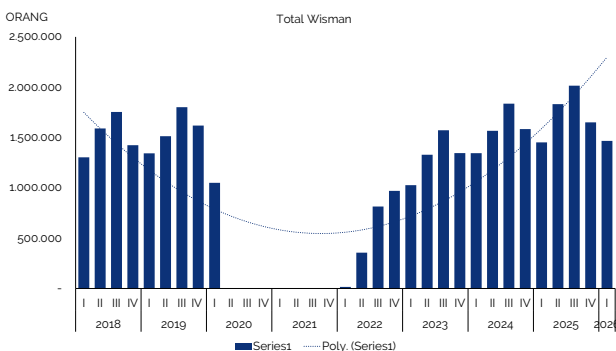
kualitas infrastruktur dan layanan wisata perlu menjadi perhatian bersama guna menjaga daya saing destinasi wisata Bali di tengah persaingan global yang semakin ketat. Adapun fokus pada penguatan melalui *quality tourism* tersebut tidak hanya penting untuk menjaga peran sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi Bali, tetapi juga menjadi instrumen mitigasi risiko guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap berbagai gejolak global maupun domestik, sekaligus mendorong transformasi ekonomi Bali yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

3.2.2. Kondisi Perkembangan Korporasi

Pada triwulan I 2026, kinerja perusahaan di Bali terindikasi melambat. Berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia dengan pelaku usaha, mayoritas perusahaan melaporkan peningkatan kegiatan dunia usaha yang tercermin dalam nilai SBT (Saldo Bersih Tertimbang) sebesar 17,91%, lebih rendah dari SBT triwulan sebelumnya yaitu 35,46%. Perkembangan kredit korporasi di sektor Akmamin juga terpantau melambat. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh moderasi aktivitas ekonomi pada periode *low season* serta melambatnya aktivitas pariwisata pada awal tahun 2026. Namun demikian, perkembangan penjualan domestik dan penjualan ekspor masih menunjukkan perbaikan, yang mengindikasikan bahwa permintaan terhadap produk dan jasa di Bali tetap terjaga.

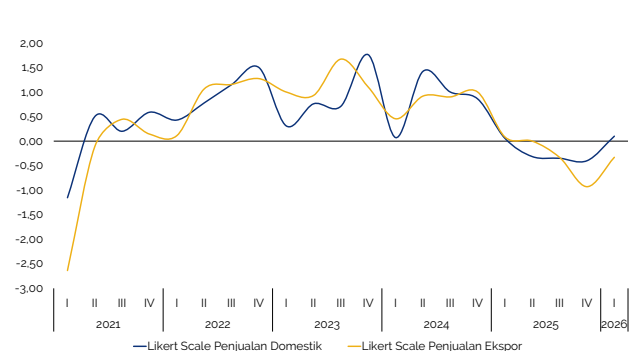
Sementara itu, kondisi rentabilitas, likuiditas, dan akses pembiayaan korporasi di Bali masih didominasi oleh persepsi yang relatif lebih baik. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), pangsa

Grafik 3.19. Perkembangan Wisatawan Mancanegara ke Bali



Sumber: Kemenparekrif (diolah BI)

Grafik 3.20. Perkembangan Skala Likert Penjualan Domestik dan Penjualan Ekspor



Sumber: Bea Cukai (diolah BI)

korporasi yang melaporkan kondisi rentabilitas lebih baik mencapai 59,23% dari total responden. Sementara itu pada aspek likuiditas, mayoritas korporasi di Bali atau sebesar 63,08% responden menyatakan kondisi likuiditas berada pada level yang lebih baik. Hal ini menunjukkan kemampuan korporasi dalam menjaga arus kas dan memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek masih relatif terjaga, didukung oleh aktivitas usaha yang tetap berjalan positif. Lebih lanjut, akses pembiayaan korporasi juga masih terpantau positif, tercermin dari 15,38% responden yang menyatakan kondisi akses kredit lebih

baik. Meskipun demikian, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

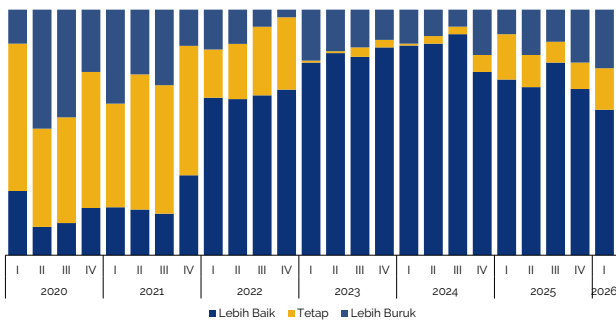
3.2.3. Penyaluran Kredit Korporasi

Penyaluran kredit korporasi di Bali pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh 10,71% (yoy), meningkat dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya sebesar 10,31% (yoy).

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kredit investasi dari 12,35% (yoy) menjadi 14,72% (yoy). Perkembangan ini mengindikasikan bahwa korporasi tetap melakukan ekspansi usaha dengan fokus pada pembiayaan jangka menengah dan panjang. Realisasi kredit investasi tersebut menjadi sinyal positif bagi peningkatan kapasitas produksi dan prospek aktivitas bisnis pada periode mendatang. Sebaliknya, kredit modal kerja menunjukkan perlambatan dari 6,72% (yoy) menjadi 3,39% (yoy).

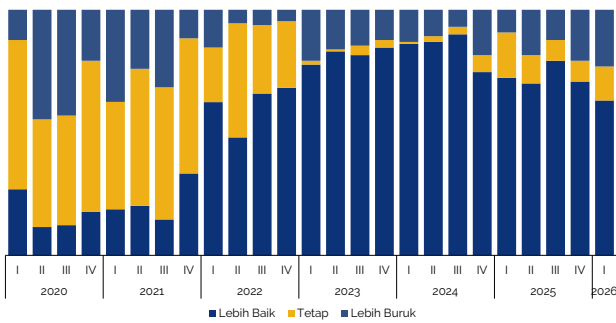
Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan kredit korporasi terutama bersumber dari LU Konstruksi, LU Perdagangan dan LU Industri. Penyaluran kredit di sektor konstruksi, perdagangan, dan industri masing-masing tercatat tumbuh sebesar 11,19% (yoy), 9,97%

Grafik 3.21. Kondisi Rentabilitas Korporasi



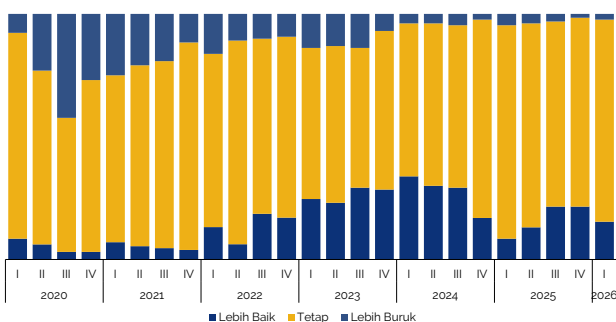
Sumber: Laporan Liaison, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.22. Kondisi Likuiditas Korporasi



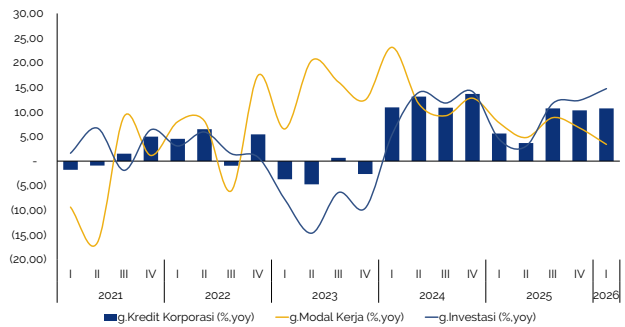
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.23. Kondisi Akses Kredit Korporasi



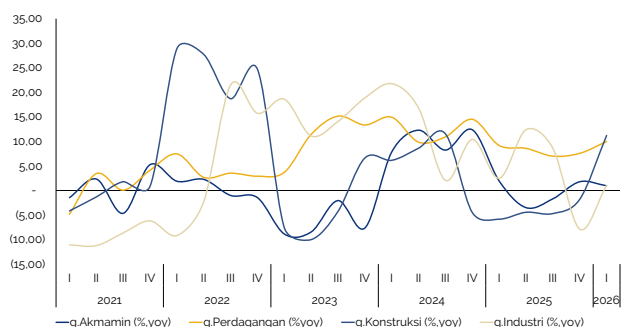
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.24. Perkembangan Kredit Korporasi



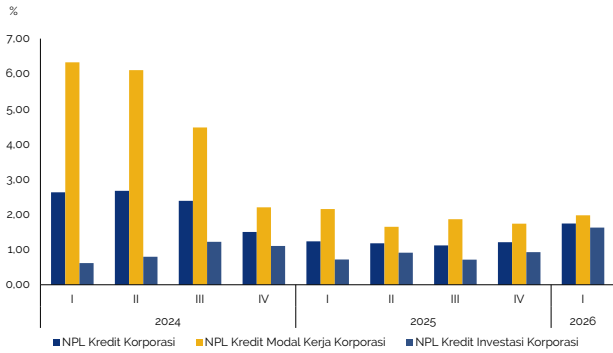
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.25. Perkembangan Kredit Korporasi Sektoral



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.26. Perkembangan NPL Kredit Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

(yoy), dan 1,05% (yoy) meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, penyaluran kredit korporasi tertahan seiring perlambatan pertumbuhan kredit LU Akmamin sebesar 0,96% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan moderasi aktivitas pariwisata pada periode *low season*. Namun demikian, LU Akmamin masih menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi Bali, sehingga prospek penyaluran kredit ke depan tetap terjaga seiring prakiraan peningkatan kunjungan wisatawan dan berlanjutnya aktivitas pariwisata pada periode mendatang.

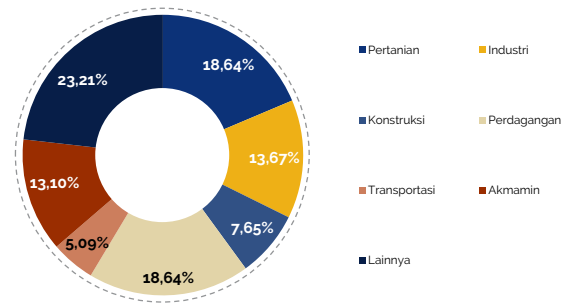
Risiko kredit korporasi di Bali hingga triwulan I 2026 tetap terjaga dan berada di bawah ambang batas 5%. Rasio NPL kredit korporasi tercatat sebesar 1,74%, meningkat dari 1,21% pada triwulan sebelumnya. Kenaikan rasio NPL terutama berasal dari segmen kredit modal kerja, yang meningkat dari 0,71% menjadi 0,93%. Meski demikian, level NPL yang rendah mengindikasikan risiko kredit masih terkendali dan memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap mendorong pembiayaan produktif, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan dan nilai tambah tinggi bagi perekonomian Bali.

3.3. KINERJA KEUANGAN RUMAH TANGGA

3.3.1. Sumber Kerentanan Rumah Tangga

Kinerja sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kerentanan rumah tangga di Bali. Ketergantungan ini tecermin dari besarnya proporsi penduduk yang bekerja pada sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pariwisata, seperti akomodasi dan makan-minum, perdagangan, serta transportasi. Berdasarkan data BPS

Grafik 3.27. Pangsa Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Periode Februari 2025



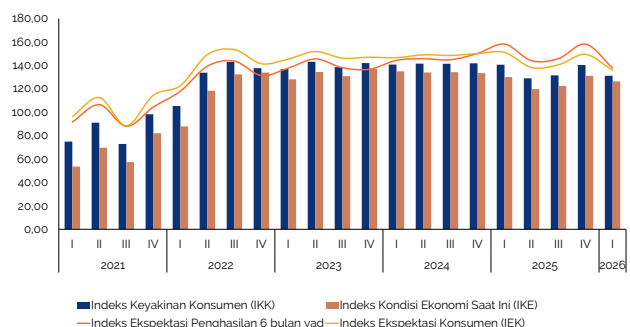
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

November 2025, sekitar 40,46% dari total penduduk bekerja di Bali terserap pada sektor-sektor tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika pariwisata secara signifikan memengaruhi stabilitas pendapatan dan daya tahan ekonomi rumah tangga di Bali.

3.3.2. Perkembangan Tingkat Keyakinan Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2025, optimisme rumah tangga terhadap kondisi ekonomi terus menguat. Hasil Survei Konsumen (SK) menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tetap berada di zona optimis dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan ini mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap kondisi ekonomi terkini maupun prospek perekonomian ke depan, di tengah ketidakpastian global dan domestik. Indeks Ekspektasi Penghasilan enam bulan mendatang juga berada pada level tinggi dan cenderung meningkat, mengindikasikan harapan akan membaiknya pendapatan dan daya beli. Meskipun demikian, sikap kehati-hatian

Grafik 3.28. Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)



Sumber: BPS (diolah BI)

dalam pengeluaran tetap terjaga sebagai respons terhadap dinamika ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Penguatan optimisme tersebut didukung oleh berlanjutnya pemulihan sektor pariwisata, peningkatan inklusi keuangan, serta terjaganya stabilitas harga. Kondisi ini diharapkan semakin memperkuat peran konsumsi rumah tangga sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Bali pada periode mendatang.

3.3.3. Penyaluran Kredit Rumah Tangga

Penyaluran kredit kepada rumah tangga di Bali pada triwulan I 2026 melambat dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit rumah tangga tercatat sebesar 4,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya 5,08% (yoy). Kredit KPR dan KPA tercatat tumbuh melambat 0,66% (yoy) diikuti dengan perlambatan kredit lainnya sebesar 12,90% (yoy). Sementara itu, kredit KKB kembali tekontraksi -6,75% (yoy) setelah triwulan sebelumnya tekontraksi sebesar -3,14% (yoy). Sebaliknya pada kredit multiguna mencatatkan perbaikan pertumbuhan sebesar 5,50% (yoy) lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar

4,69% (yoy).

Bank Indonesia bersama Pemerintah bersinergi melalui berbagai insentif dan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit. Kebijakan tersebut antara lain melanjutkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan cicilan pokok ringan, memperpanjang kebijakan insentif LTV/FTV hingga Desember 2025, menghapus bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Bali, serta memberikan insentif dan himbauan penggunaan kendaraan bermotor listrik. Berbagai langkah ini berperan menahan penurunan pertumbuhan kredit rumah tangga di Bali.

Kualitas penyaluran kredit rumah tangga di Provinsi Bali tetap terjaga.

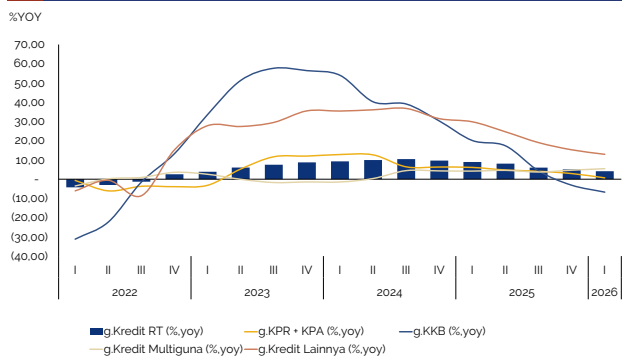
Rasio NPL pada triwulan IV 2025 sebesar 1,31%, lebih rendah dibandingkan rasio triwulan sebelumnya sebesar 1,42% dan berada di bawah *threshold* batas sebesar 5%. Penurunan rasio NPL tersebut terutama berasal dari beberapa jenis kredit, yaitu KPR dan KPA, kredit multiguna, serta KKB. Penurunan NPL juga menjadi sinyal *lending appetite* yang masih cenderung menahan pengajuan dan penyaluran kredit. Meski demikian, hal ini juga berarti kualitas kredit secara keseluruhan tetap sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya bayar rumah tangga relatif masih terjaga, sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi, stabilitas harga, serta dukungan berbagai program kebijakan yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

3.3.3.1. Penyaluran KPR dan KPA

Penyaluran KPR dan KPA pada triwulan I 2026 melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya.

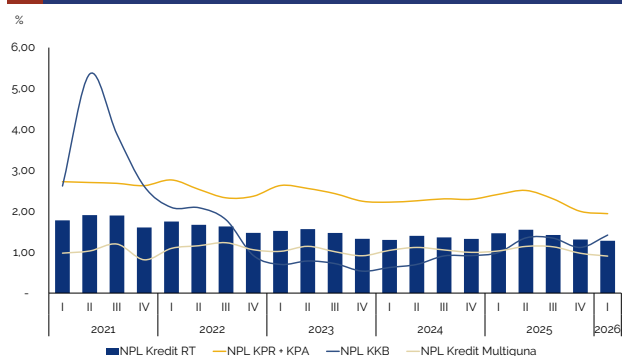
Total kredit KPR dan KPA tercatat tumbuh 0,66% (yoy), melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,90% (yoy). Lebih lanjut, pertumbuhan KPR tercatat sebesar 0,68% (yoy) melambat dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya sebesar 2,88% (yoy). Perlambatan kredit KPR yang melambat disebabkan oleh tekontraksinya jenis kredit KPR < 21 serta perlambatan di KPR 21 s.d. 70, KPR > 70 serta KPR Ruko/Rukan. Namun demikian, rasio NPL KPR tetap rendah dan terjaga pada 1,93% di triwulan I 2026.

Grafik 3.29. Perkembangan Kredit RT



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia (diolah)

Grafik 3.30. Perkembangan NPL Kredit RT



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Tabel 3.1. Perkembangan Kredit KPR+KPA

Jenis Kredit	g.Kredit (%.yoy)									Pangsa TW I 2026 (%)
	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
KPR	12.77	12.66	6.52	6.31	6.09	4.68	4.05	2.88	0.68	
RT. KPR <21	-40.92	-19.87	-19.61	-20.47	69.95	-11.07	-9.89	-8.11	-10.86	3.57
RT. KPR 21 sd 70	-13.39	8.01	6.27	5.72	26.04	4.06	3.44	2.29	0.03	53.45
RT. KPR >70	28.46	23.71	9.21	9.16	8.70	7.73	5.96	3.79	2.07	38.26
KPR Ruko/Rukan	432.87	48.25	28.97	33.83	-73.65	2.71	10.13	15.45	8.55	3.90
KPA	12.70	8.29	1.00	5.40	7.57	13.85	10.64	5.34	-0.95	
RT. KPA <21	-22.86	70.72	29.40	28.95	68.87	-3.64	90.83	73.38	31.79	0.03
RT. KPA 21 sd 70	29.08	15.17	6.51	12.06	6.67	16.55	13.20	5.01	3.79	0.54
RT. KPA >70	-5.74	-5.69	-8.54	-6.23	6.21	10.88	1.04	1.63	-11.56	0.27
KPR+KPA	12.77	12.63	6.47	6.30	6.10	4.75	4.10	2.90	0.66	100.00

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Tabel 3.2. Perkembangan NPL Kredit KPR+KPA

Jenis Kredit	NPL (%)								
	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
KPR	2.21	2.26	2.28	2.26	2.42	2.49	2.29	1.99	1.93
KPA	3.82	2.32	4.91	5.74	3.87	4.06	3.60	2.69	2.98
KPR+KPA	2.22	2.26	2.30	2.29	2.41	2.51	2.30	2.00	1.94

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

3.3.3.2. Penyaluran KKB dan Kredit Multiguna

Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) pada triwulan I 2026 melambat dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya. Pertumbuhan KKB kembali berkontraksi sebesar -6,75% (yoy), dari -3,14% (yoy) pada triwulan sebelumnya, terutama dipicu oleh kontraksi pada kredit kendaraan roda empat seiring dengan dominasi pangsa pada kredit KKB. Untuk mendorong penyaluran KKB, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan

Loan to Value (LTV) hingga 100% hingga Desember 2025, sekaligus mempermudah pembelian kendaraan melalui skema kredit tanpa uang muka (*Down Payment*). Kredit multiguna mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,48% (yoy), meningkat dari 4,69% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Meskipun KKB melambat, kualitas kredit tetap terjaga. Rasio NPL KKB tercatat 1,42%, sedangkan rasio NPL kredit multiguna terjaga pada 0,90%, berada di bawah ambang batas 5%.

Tabel 3.3. Perkembangan Kredit KKB dan Kredit Multiguna

Jenis Kredit	g.Kredit (%.yoy)									Pangsa TW I 2026 (%)
	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
KKB	54.03	40.22	39.07	30.25	20.09	17.33	4.31	-3.14	-6.75	
Mobil	55.87	41.24	39.22	29.59	19.92	17.04	3.74	-3.84	-7.32	94.61
Sepeda Motor	37.36	29.08	33.50	26.62	18.06	24.06	24.00	29.16	24.37	3.72
Truk	-12.61	-27.09	-28.69	19.82	29.26	29.37	31.09	-10.51	-25.99	0.48
Lainnya	20.69	41.27	108.77	123.70	32.99	19.50	-4.33	-15.56	-21.70	1.20
RT Multiguna	-1.46	0.34	4.47	4.32	4.22	4.61	3.74	4.69	5.48	

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Tabel 3.4. Perkembangan NPL Kredit KKB dan Kredit Multiguna

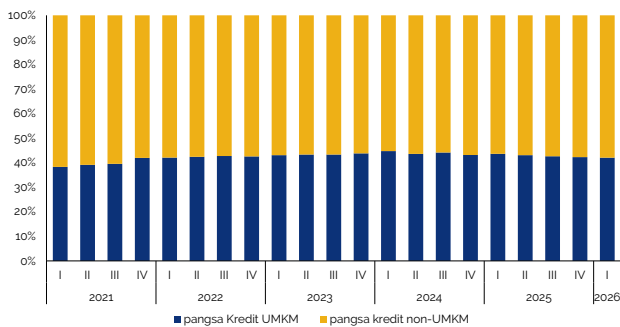
Jenis Kredit	NPL (%)								
	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
KKB	0.63	0.70	0.91	0.92	0.99	1.35	1.34	1.11	1.42
Mobil	0.58	0.66	0.90	0.91	0.97	1.32	1.35	1.12	1.42
Sepeda Motor	1.65	1.86	1.67	1.36	1.25	1.44	1.46	1.15	1.71
Truk	3.31	2.31	0.00	0.00	1.39	1.54	1.33	0.00	0.00
Lainnya	0.96	0.61	0.32	0.59	1.90	2.97	0.70	1.17	0.79
RT Multiguna	1.04	1.11	1.05	0.99	1.03	1.14	1.13	0.97	0.90

Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

3.4. AKSES KEUANGAN DAN UMKM

3.4.1. Asesmen Kredit UMKM

Grifik 3.31. Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit



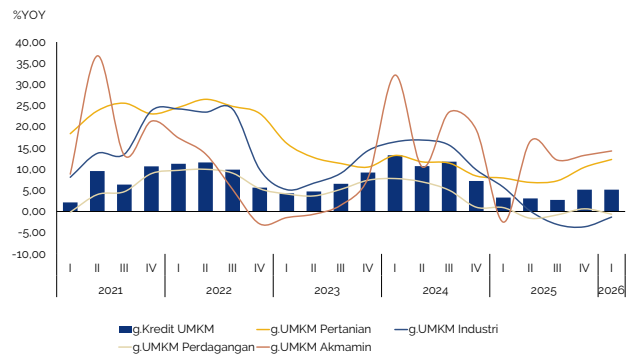
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Akses UMKM terhadap kredit pada triwulan I 2026 tetap tinggi. Pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit tercatat sebesar 42,06%, relatif stabil pada kisaran 42%, dan telah memenuhi ketentuan Rasio Pembayaran Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang diatur oleh Bank Indonesia².

Penyaluran kredit kepada UMKM pada triwulan I 2026 tumbuh positif. Kredit UMKM tumbuh sebesar 5,15% (yoy), stabil dibandingkan capaian pada periode sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong kinerja positif LU Akmamin dan Pertanian, sementara aktivitas sektor Industri dan Perdagangan berkontraksi. Peningkatan kredit UMKM mengindikasikan adanya pemulihan aktivitas produktif, khususnya di sektor-sektor yang mendukung pariwisata Bali, serta didorong oleh momentum HBKN yang secara historis meningkatkan permintaan barang dan jasa.

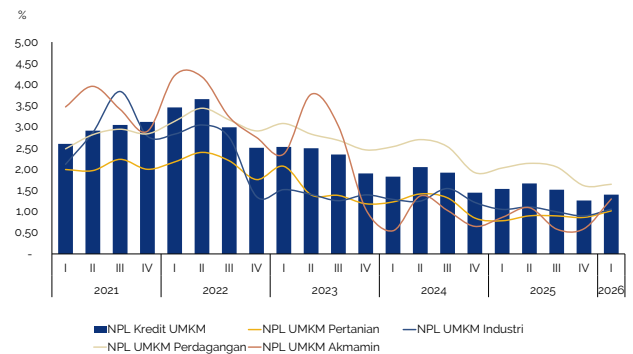
NPL kredit UMKM masih berada di bawah threshold 5%. NPL kredit menurun menjadi sebesar 1,40%, sedikit meningkat dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya sebesar 1,26%. Kenaikan rasio NPL bersumber dari seluruh sektor utama, namun masih terkendali di bawah *threshold*. Dengan profil risiko kredit UMKM relatif terkendali, masih terdapat cukup ruang bagi perbankan untuk lebih mendorong kredit UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan skema penjaminan, serta optimalisasi program pemerintah yang mendukung

Grifik 3.32. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Grifik 3.33. Perkembangan NPL Kredit UMKM Sektoral



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

sektor produktif.

3.4.2. Program Pengembangan Akses Keuangan UMKM dan Ekonomi Syariah

Pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui tiga pilar utama, yaitu Peningkatan Kapasitas, Korporatisasi serta Pembiayaan. Hal ini penting dilakukan dalam mempekuat akses keuangan UMKM. Peningkatan Kapasitas membantu UMKM meningkatkan kompetensi, kualitas produk, serta daya saing. Selanjutnya, melalui Korporatisasi UMKM didorong untuk memiliki kelembagaan dan skala usaha yang lebih kuat. Sementara itu, pilar Pembiayaan diarahkan untuk memfasilitasi UMKM agar lebih mudah memperoleh sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan UMKM berbasis ketiga pilar tersebut diharapkan dapat menunjang perluasan akses keuangan UMKM sekaligus mendukung intermediasi pembiayaan yang lebih inklusif. Dalam implementasinya,

2. Berdasarkan PBI No.24/3/PBI/2022 disampaikan bahwa Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial minimal 30% dari total penyaluran kredit pada posisi akhir bulan Desember.

Bank Indonesia Provinsi Bali memiliki beberapa program strategis melalui tiga pilar utama yaitu:

1) Kapasitas

Peningkatan kapasitas diarahkan baik sisi sumber daya manusia, maupun proses bisnis sehingga memperbesar peluang akses pembiayaan perbankan. Selain itu, peningkatan kapasitas dilakukan untuk memperkuat daya saing, produktivitas, serta keberlanjutan usaha UMKM sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, kompetensi pelaku usaha, pemanfaatan teknologi digital, penguatan akses pasar, serta pendampingan dalam memperoleh akses pembiayaan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (KPwBI Prov. Bali) melakukan implementasi terhadap peningkatan kapasitas melalui beberapa program strategis diantaranya:

- a) Program *Onboarding* UMKM RAHAYU (Rintis, Akselerasi, Hebatkan, Daya Saing UMKM) untuk mendorong digitalisasi UMKM sehingga dapat melakukan promosi maupun penjualan melalui *e-commerce*.
- b) Fasilitasi Bantuan Teknis (Bantek) dalam mendorong peningkatan produksi sehingga usaha yang dimiliki dapat berjalan lebih *sustain*. Penyaluran bantuan sarana dan prasarana bagi UMKM dalam meningkatkan produksi serta produktivitas telah dilakukan, hal ini menjadi salah satu strategi dalam pengendalian komoditas inflasi.
- c) Program *capacity building* UMKM sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para pelaku usaha sehingga dapat menjadi UMKM yang naik kelas dan berdaya saing baik di dalam maupun di luar negeri.
- d) Program pemberdayaan kelompok subsisten sehingga dapat berkembang dan menjadi kelompok yang produktif. Program ini diarahkan untuk memperkuat keterampilan usaha, meningkatkan

literasi dan akses keuangan, mendorong pemanfaatan sumber daya lokal, serta membantu kelompok subsisten agar memiliki pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

- e) Program Inovasi UMKM Hijau yang memiliki tujuan dalam pengembangan UMKM sehingga dapat melakukan praktik bisnis hijau dengan konsep *zero waste management*. Hal ini dilakukan sejalan dengan Program ASTA CITA Pemerintah dalam konsep ekonomi hijau sehingga UMKM dapat menciptakan nilai tambah, dan mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
- f) Promosi perdagangan serta perluasan akses pasar melalui fasilitasi *showcasing* baik didalam maupun luar negeri seperti pada *event* Bali Jagadhita, Karya Kreatif Indonesia (KKI), Festival Ekonomi Syariah (FESyar) dan *International Sharia Economic Festival* (ISEF). Adapun pada tahun 2025, Bank Indonesia Provinsi Bali telah menghasilkan *outcome* penjualan UMKM binaan/mitra Bank Indonesia Bali hingga Rp19,714 miliar. Selanjutnya, untuk UMKM binaan/mitra Bank Indonesia Bali yang telah ekspor hingga tahun 2025 sejumlah lebih dari Rp8,7 miliar.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas UMKM tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga memperluas akses ekonomi bagi masyarakat, menciptakan nilai tambah, dan mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

2) Korporatisasi

Strategi korporatisasi UMKM diarahkan untuk memperbesar skala usaha sekaligus meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan maupun penguatan kelembagaan UMKM, termasuk pengelompokan usaha yang memiliki kesamaan karakteristik baik berdasarkan wilayah maupun jenis produk yang dihasilkan. Melalui korporatisasi, UMKM diharapkan dapat memiliki kinerja usaha yang lebih kuat dan berkelanjutan, sehingga lebih siap dalam mengakses pembiayaan dari Perbankan. Selain itu, strategi ini turut mendorong intermediasi keuangan

yang lebih berkesinambungan, dengan memperhatikan kelayakan usaha serta keberlanjutan akses pembiayaan bagi UMKM.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (KPwBI Prov. Bali) melakukan implementasi strategi korporatisasi antara lain melalui:

- a) Sosialisasi sertifikasi halal kepada pengusaha UMKM sebagai persiapan kepada UMKM yang akan diberikan fasilitasi sertifikasi halal. Sosialisasi halal merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh KPwBI Prov. Bali, dalam enam tahun terakhir, telah difasilitasi 123 UMKM dan 4 Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dalam mendapatkan sertifikat halal. Pada program ini, Bank Indonesia Provinsi Bali bersinergi dengan Kementerian Agama Provinsi Bali dalam pengembangan *Halal Value Chain* (HVC) melalui penguatan sertifikasi halal untuk produk UMKM Bali.
- b) Memberikan fasilitasi kerjasama atau kemitraan antara UMKM dengan lembaga/badan usaha lain melalui kegiatan promosi perdagangan, temu bisnis, serta forum perdagangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat membuka peluang kemitraan, meningkatkan eksposur produk, dan mendorong penetrasi pasar yang lebih luas. Adapun kami telah memberikan dukungan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - *Business matching* antara UMKM potensial ekspor dengan *potential buyer* melalui beberapa *event* internasional seperti Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), Bali Beyond Travel Fair (BBTF), serta Trade Expo Indonesia (TEI).
 - Penjajakan bersama Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali untuk dapat menjadikan desa wisata menjadi bagian dari paket wisata disetiap hotel di Bali untuk peningkatan kualitas berwisata bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara.

3) Pembiayaan

Pengembangan UMKM melalui dorongan pembiayaan dengan Perbankan maupun Lembaga Keuangan Non Bank, memiliki tujuan bagi UMKM untuk memperluas akses UMKM Bali terhadap sumber permodalan yang

berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha, mendorong UMKM naik kelas, membuka peluang kerja, memperkuat pendapatan masyarakat serta turut mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih inklusif dan berdaya saing. Fasilitasi *Business Matching* antara UMKM dengan Perbankan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti Bali Jagadhita, Bali Business Matching (BBM), Festival Kopi & Hijau, Karya Kreatif Indonesia (KKI) maupun *International Sharia Economic Festival* (ISEF). Adapun pada tahun 2025, Bank Indonesia Provinsi Bali telah berhasil mendorong pembiayaan pada UMKM binaan/mitra hingga mencapai Rp50,05 Miliar dan angka ini akan bertambah untuk setiap tahunnya.

Tidak hanya secara konvensional, pengembangan UMKM juga mencakup pembiayaan Ekonomi Syariah. KPwBI Provinsi Bali telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk mendorong potensi peningkatan pembiayaan syariah sebagai berikut:

- a) Memperkuat Ekosistem Halal di Bali melalui **Sosialisasi Sertifikasi Halal** kepada Pelaku UMKM dalam rangka Road to FESyariah (Festival Ekonomi Syariah) 2026 pada Selasa, 12 Mei 2026. Sosialisasi ini merupakan sinergi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Kanwil Kemenag Provinsi Bali, dan LPPOM Bali. Pembukaan tersebut menjadi simbol kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan komitmen dalam memperkuat ekosistem halal bagi di Bali. Penguatan UMKM terus didorong melalui Halal Value Chain (HVC), termasuk fasilitasi sertifikasi halal bagi 123 UMKM sejak 2020 dan rencana sertifikasi 30 UMKM pada 2026. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Denpasar, H. Amron Sudarman, menegaskan sertifikasi halal penting untuk menjamin kualitas produk dan memperluas akses pasar. Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, I Ketut Meniarta, menyebut dari 448.784 UMKM di Bali, baru sekitar 1,5% UMKM Bali tersertifikasi halal sehingga kolaborasi lintas pihak perlu diperkuat.

Dalam kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal, LPPOM Bali menyampaikan materi mengenai proses sertifikasi halal UMKM secara menyeluruh, mulai

dari alur pengajuan hingga penerbitan sertifikat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), termasuk pengenalan aplikasi SIHALAL sebagai portal pengajuan serta pendampingan bagi pelaku UMKM dalam prosesnya. Selain itu, juga ditekankan pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk menjaga keberlanjutan Proses Produk Halal (PPH) dari hulu ke hilir. Materi ini diharapkan dapat mendorong UMKM meningkatkan kualitas produk sesuai standar halal sehingga mampu memperluas akses pasar hingga tingkat global.

Bank Indonesia Provinsi Bali bersama LPPOM Bali terus memperkuat kolaborasi dalam mendampingi UMKM memperoleh sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ekosistem halal yang inklusif, sehingga semakin banyak UMKM Bali mampu menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan memenuhi standar halal untuk bersaing di pasar nasional maupun global.

- b) Mendorong akses pembiayaan UMKM kepada Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Bali, demi mewujudkan *Blueprint* Ekonomi Syariah Indonesia Pilar 2 (dua) yaitu Pembiayaan Syariah yang Optimal. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan nyata Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi syariah melalui penyelenggaraan FESyar (Festival Ekonomi Syariah). FESyar merupakan agenda untuk memperkuat ekosistem halal, digitalisasi, dan inklusi ekonomi regional melalui pameran UMKM, forum bisnis, dan kompetisi. FESyar diselenggarakan melalui kolaborasi antara Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, instansi, serta lembaga.

Dalam konteks pembiayaan UMKM di daerah, KPwBI Provinsi Bali berinisiatif untuk melakukan audiensi dengan lembaga keuangan syariah untuk menggali potensi dukungan yang dapat diberikan oleh KPwBI Provinsi Bali kepada UMKM potensial pembiayaan seperti pemberian bantuan teknis (*bantek*), *capacity building*, sosialisasi

literasi keuangan, dan lainnya.



PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan I 2026, aliran uang kartal perbankan Bali mencatat net inflow Rp1,76 triliun akibat berakhirnya Nataru dan melambatnya ekonomi sehingga kebutuhan uang menurun. Sementara itu, transaksi nontunai terus meningkat, terutama melalui BI-FAST, didukung pertumbuhan ATM/debit, kartu kredit, uang elektronik, dan QRIS. BI Bali pun terus memperkuat sistem pembayaran dan mendorong digitalisasi melalui kerja sama berbagai pihak guna mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Net Inflow

 Tw I 2026 **1,76%**

 Tw IV 2025 **-3,21%**

 Pertumbuhan RRH
 Nominal Transaksi RTGS

 Tw I 2026 **-26,21%**

 Tw IV 2025 **-25,81%**

 Pertumbuhan RRH
 Nominal Transaksi SKNBI

 Tw I 2026 **-9,54%**

 Tw IV 2025 **-7,68%**

 Pertumbuhan Nominal
 Transaksi UE

 Tw I 2026 **39,44%**

 Tw IV 2025 **39,33%**

 Pertumbuhan Nominal
 Transaksi QRIS

 Tw I 2026 **496,25%**

 Tw IV 2025 **367,51%**

Pada triwulan I 2026, aliran uang kartal perbankan di Provinsi Bali mencatat posisi *net inflow* sebesar Rp1,76 triliun. Berakhirnya momentum HBKN Nataru serta liburan awal tahun mendorong *net inflow* pasca tingginya transaksi masyarakat pada momen tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang secara keseluruhan melambat pada triwulan I 2026 juga sejalan dengan tingkat kebutuhan uang masyarakat yang relatif tidak setinggi triwulan sebelumnya. Kondisi ini juga sejalan dengan pola siklikal dimana pada triwulan I, kecenderungan aliran uang kartal perbankan mengalami *outflow*.

Kemudian, *velositas* pada sistem pembayaran nontunai terus mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Pada layanan BI-FAST, pertumbuhan nominal dan volume transaksi terus tumbuh menjadikan BI-Fast sebagai salah satu kanal yang paling diminati dalam transaksi digital. Sementara itu, transaksi pada SKNBI dan BI-RTGS mengalami perbaikan. Peningkatan *velositas* transaksi juga tercermin dari tumbuhnya transaksi ATM/debit, kartu kredit, serta Uang Elektronik (UE), disertai akselerasi penggunaan QRIS yang semakin meluas seiring meningkatnya adopsi digital di masyarakat.

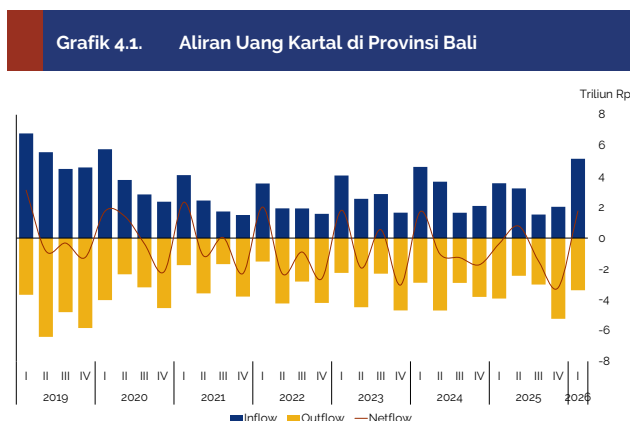
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali secara konsisten memperkuat perannya dalam menjaga keandalan sistem pembayaran, baik berbasis tunai maupun digital, guna menunjang aktivitas perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Dorongan terhadap peningkatan penggunaan transaksi nontunai terus diakselerasi melalui kerja sama erat dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat. Inisiatif ini melibatkan institusi keuangan, kalangan pendidikan, generasi muda, serta masyarakat luas, dengan harapan dapat menciptakan proses transaksi yang lebih praktis dan aman, sekaligus memperluas akses keuangan serta membangun ekosistem pembayaran yang semakin modern dan inklusif di Bali.

4.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DI PROVINSI BALI

Pada triwulan I 2026, aliran uang kartal perbankan di Provinsi Bali mencatat posisi *net inflow* sebesar Rp1,76 triliun. Berakhirnya momentum HBKN Nataru serta liburan awal tahun mendorong *net inflow* pasca tingginya transaksi masyarakat pada momen tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang secara keseluruhan melambat pada triwulan I 2026 juga sejalan dengan tingkat kebutuhan uang masyarakat yang relatif tidak

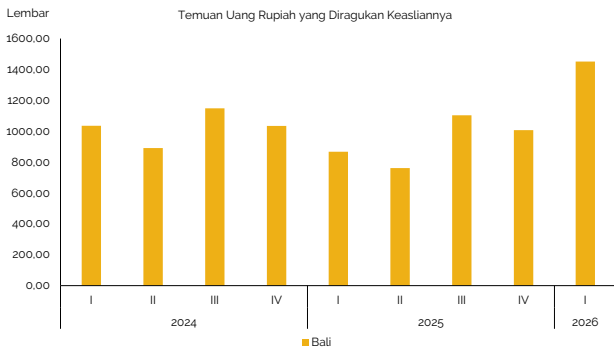
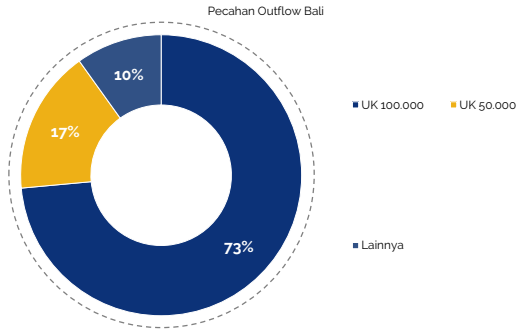
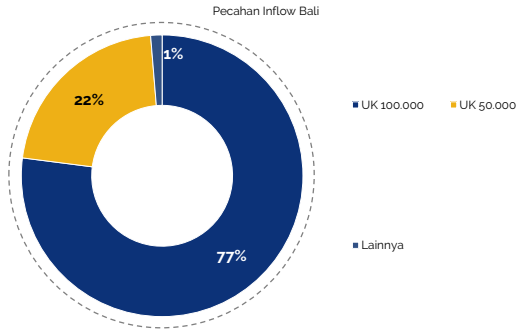
setinggi triwulan sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari sisi aliran uang keluar (*outflow*), pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar Rp3,39 triliun, relatif melandai dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar Rp5,24 triliun. Tren sebaliknya terlihat pada aliran uang masuk (*inflow*) yang naik sebesar Rp 5,14 triliun, lebih tinggi dari nilai *inflow* triwulan sebelumnya yang mencapai Rp 2,02 triliun (Grafik 4.1). Tingkat *inflow* dan *outflow* tersebut merupakan manajemen pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan rupiah untuk mencukupi kebutuhan transaksi masyarakat.

Apabila ditinjau dari pecahan, peredaran uang masuk dan keluar (*inflow* dan *outflow*) masih didominasi oleh Uang Pecahan Besar (UPB), yaitu uang kertas pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Sementara itu, kategori pecahan lainnya seperti uang kertas Rp75.000, serta Uang Pecahan Kecil (UPK) meliputi pecahan Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, termasuk seluruh pecahan uang logam, mempunyai porsi yang relatif kecil. Di sisi lain, Bank Indonesia bersama instansi dan lembaga terkait di daerah terus berkoordinasi dalam memperkuat



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2. Pecahan Inflow & Outflow serta Temuan Uang Yang diragukan Keasliannya di Provinsi Bali



Sumber: Bank Indonesia, diolah

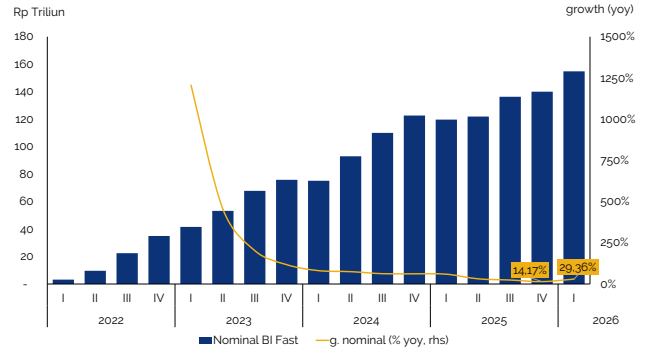
upaya penegakan terhadap peredaran uang palsu. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan terjaganya kualitas dan keandalan penggunaan uang rupiah.

4.2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DI PROVINSI BALI

4.2.1. Sistem Pembayaran Bank Indonesia

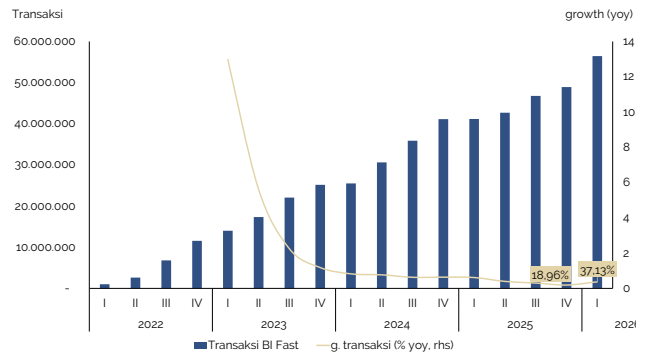
Pada triwulan I 2026, transaksi melalui BI-FAST meningkat baik dari nominal maupun sisi volume. Berdasarkan data BI-FAST di Bali, nilai transaksi menembus Rp155 triliun, tumbuh 29,36% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.3). Sementara itu, volume transaksi mencapai 56juta, tumbuh 37,13% (yoy) atau meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 (Grafik 4.4).

Grafik 4.3. Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST



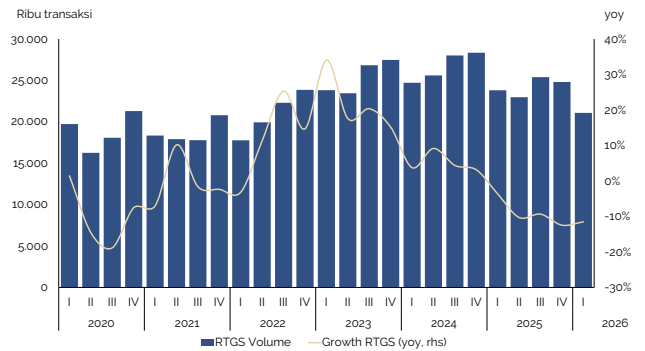
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4. Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST



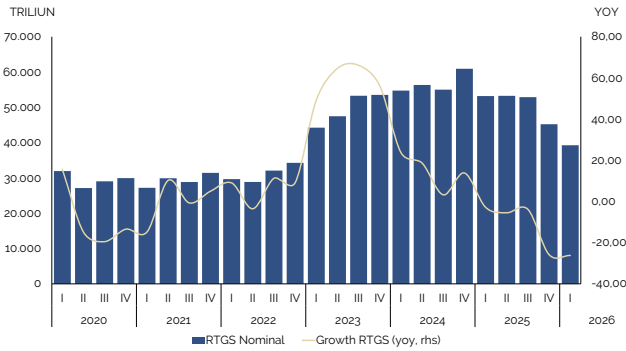
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5. Perkembangan Volume Transaksi RTGS di Bali

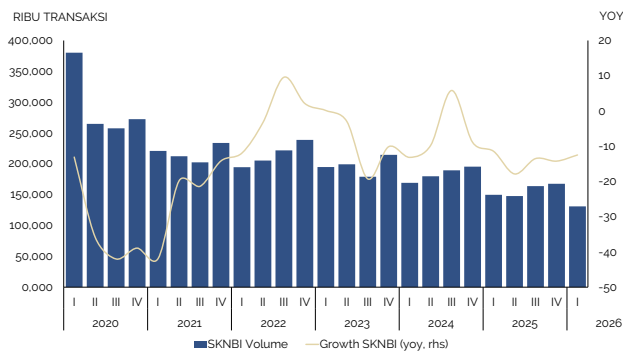


Sumber: Bank Indonesia, diolah

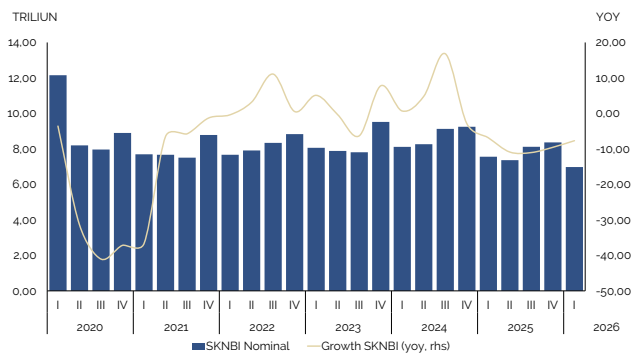
Penggunaan Bank Indonesia *real time gross settlement* (BI-RTGS) di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tercatat mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi volume, transaksi BI-RTGS terkontraksi sebesar -11,50% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang turun -12,45% (yoy) (Grafik 4.5). Dari sisi nominal, transaksi mengalami penurunan sebesar -26,21% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar -25,81% (yoy) (Grafik 4.6).

Grafik 4.6. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS di Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.7. Perkembangan Vol. Transaksi SKNBI Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8. Nilai Nominal Transaksi SKNBI di Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kinerja transaksi nontunai melalui kliring SKNBI di Provinsi Bali membaik pada triwulan I 2026, meskipun masih dalam teritori kontraksi. Di sisi volume, pertumbuhan transaksi SKNBI secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 12,49% (yoy), membaik dibandingkan penurunan pada triwulan IV 2025 sebesar -14,23% (yoy) (Grafik 4.7). Sejalan dengan perbaikan volume, pertumbuhan nominal transaksi SKNBI juga menunjukkan perbaikan, dari kontraksi -9,54% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi kontraksi -7,68% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 4.8).

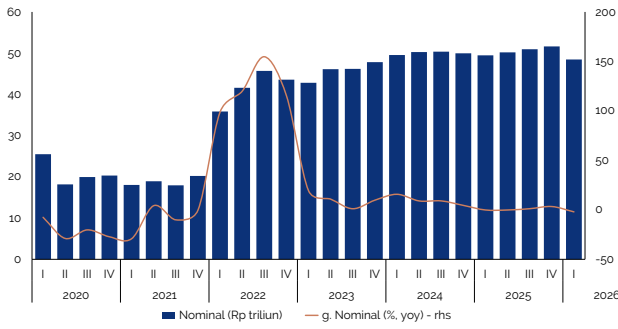
4.2.2. Sistem Pembayaran Retail

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus mengamati perkembangan transaksi dengan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang terdiri dari kartu ATM/debit, kartu kredit, serta penggunaan Uang Elektronik (UE). Pada triwulan I 2026, nominal transaksi kartu ATM/debit mengalami penurunan sedangkan transaksi dengan kartu kredit tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi nominal, transaksi kartu ATM/debit turun sebesar 2,04 (yoy) dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,34% (yoy) (Grafik 4.9). Volume transaksi ATM/debit juga tercatat lebih rendah dengan pertumbuhan -6,23 (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh tipis 0,85% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi kartu kredit tercatat tumbuh tinggi sebesar 21,06% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,24% (yoy) (Grafik 4.10). Adapun volume transaksi kartu kredit pada triwulan I 2026 juga menunjukkan peningkatan, tumbuh 25,98% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 21,97% (yoy).

Berdasarkan jenisnya, volume transaksi ATM/debit pada triwulan I 2026 didominasi oleh penarikan tunai, sementara transaksi kartu kredit terutama digunakan untuk aktivitas belanja. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga masih terjaga selama triwulan I 2026. Pada kartu ATM/debit, penarikan tunai menyumbang 55,67% dari total transaksi, diikuti transaksi belanja sebesar 19,61% (Grafik 4.11). Di sisi lain, penggunaan kartu kredit hampir sepenuhnya diarahkan untuk belanja, dengan pangsa mencapai 99,05% dari total transaksi (Grafik 4.12).

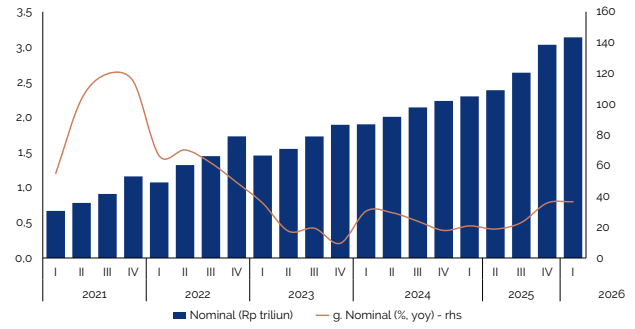
Penggunaan Uang Elektronik (UE) sebagai salah satu instrumen APMK menunjukkan pertumbuhan yang tetap tinggi, sejalan dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Secara nominal, nilai transaksi UE pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp3,14 triliun, tumbuh sebesar 36,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 35,75% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.13). Tingginya pertumbuhan nominal transaksi UE juga ditopang dari sisi volume.

Grafik 4.9. Nilai Nominal Transaksi SKNBI di Bali



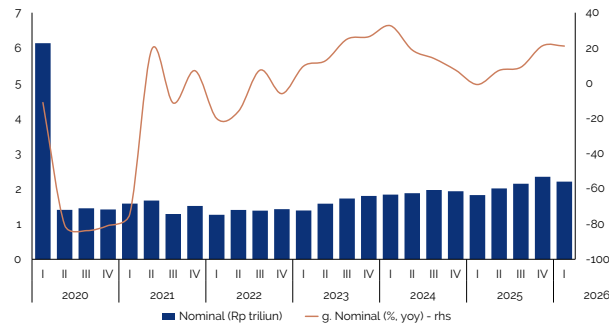
Sumber: BPD Bali, diolah

Grafik 4.13. Perkembangan Nominal Transaksi UE Bali



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Bali



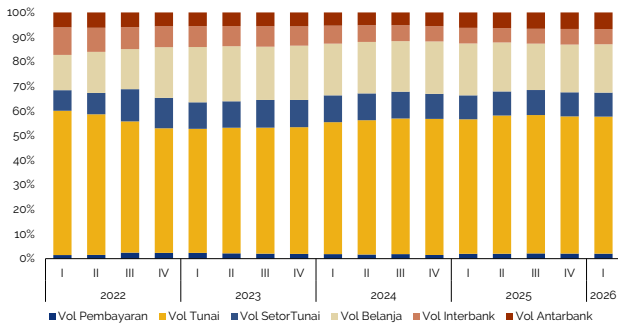
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14. Perkembangan Transaksi UE di Bali



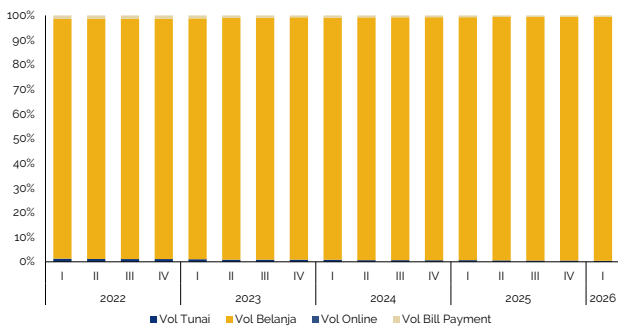
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11. Volume Transaksi Kartu ATM/debit Berdasarkan Jenis Transaksi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12. Volume Transaksi Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi

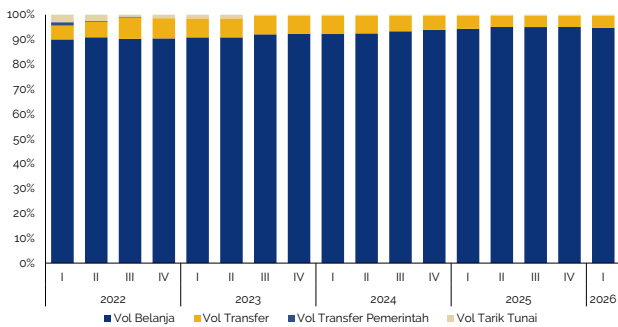


Sumber: Bank Indonesia, diolah

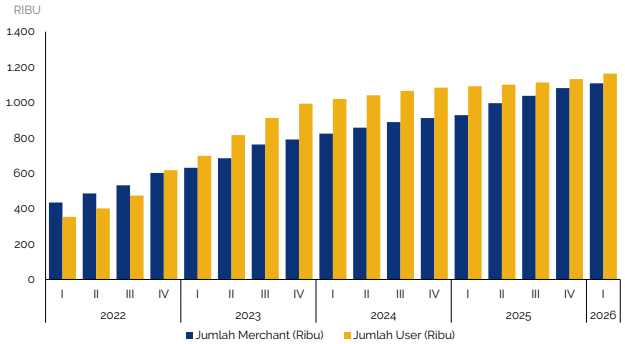
Pada triwulan I 2026, pertumbuhan volume transaksi UE mencapai 39,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 39,33% (yoy) (Grafik 4.14).

Ditinjau dari jenis penggunaannya, volume transaksi Uang Elektronik pada triwulan I 2026 didominasi oleh transaksi untuk belanja. Aktivitas belanja menyumbang 94,67% dari total transaksi, diikuti oleh transaksi transfer sebesar 4,90% dan tarik tunai sebesar 0,43% (Grafik 4.15). Peningkatan penggunaan uang elektronik tersebut juga sejalan dengan meningkatnya agenda penyaluran bansos pemerintah yang direalisasikan pada triwulan I 2026.

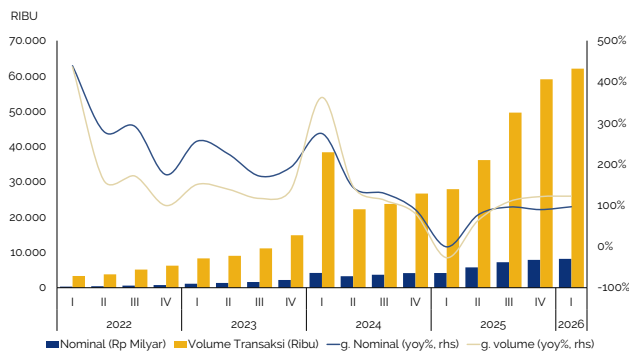
Sementara itu, perkembangan implementasi kanal pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* hingga triwulan I 2026 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan transaksi dari sisi nominal relatif meningkat signifikan dengan nilai sebesar Rp8,16 triliun (meningkat 96,67% yoy) dan lebih tinggi dari posisi triwulan sebelumnya yang mencapai

Grifik 4.15. Volume Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Jenis Transaksi

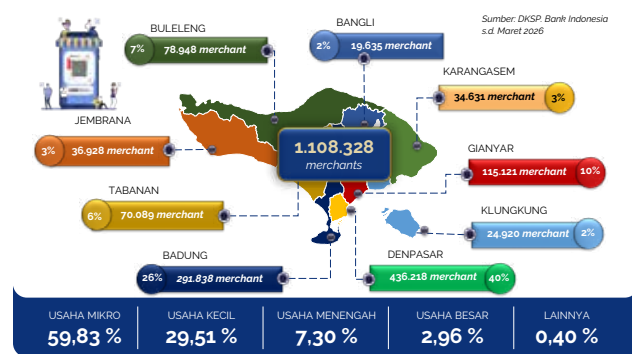
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grifik 4.17. Perkembangan Jumlah Merchant dan Pengguna QRIS di Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grifik 4.16. Perkembangan Transaksi QRIS di Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar 4.1. Merchant QRIS Berdasarkan Kab/Kota di Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

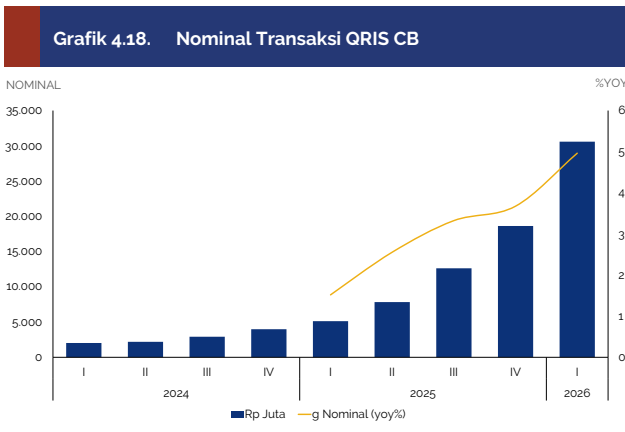
Rp7,87 triliun. Tingginya nominal transaksi QRIS ditopang oleh volume transaksi mencapai 62,06 juta transaksi, tumbuh sebesar 122,32% (yoy). Selain itu, peningkatan juga terlihat dari sisi jumlah pengguna dan merchant QRIS di Provinsi Bali. Jumlah pengguna QRIS tumbuh sebesar 19,36 % (yoy) atau menjadi sebanyak 1.163.109 pengguna per akhir Triwulan I 2026. Pada periode yang sama, jumlah merchant QRIS tercatat sebanyak 1.108.328, didominasi oleh usaha mikro sebesar 58,77% dengan sebaran merchant paling besar di wilayah Kota Denpasar (39,36%), Kabupaten Badung (26,33%), dan Kabupaten Gianyar (10,39%). Sementara itu, 45,11% merchant QRIS lainnya tersebar di Kabupaten Buleleng, Tabanan, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Jembrana.

Transaksi QRIS Cross Border (CB) juga menunjukkan tren yang positif. Inovasi QRIS CB menjadi terobosan penting dalam memfasilitasi transaksi internasional yang lebih mudah dan efisien. Pada Triwulan I 2026, nilai transaksi QRIS CB mencapai Rp30,58 miliar, meningkat 496,25% (yoy). Kenaikan signifikan ini sejalan dengan pertumbuhan volume transaksi yang mencapai 90.009

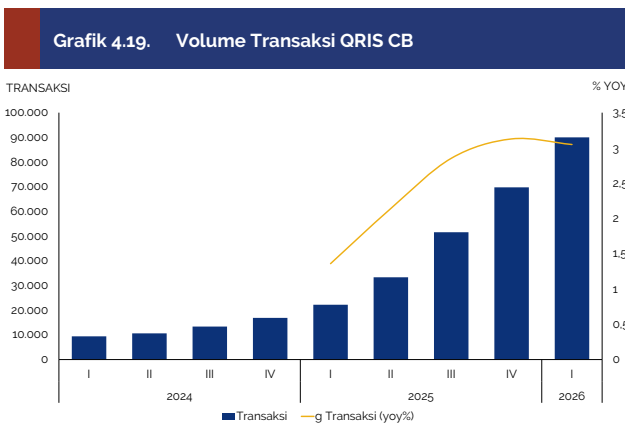
transaksi atau tumbuh 304,88% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan mayoritas transaksi dilakukan oleh pengguna dari Malaysia.

4.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB) DI BALI

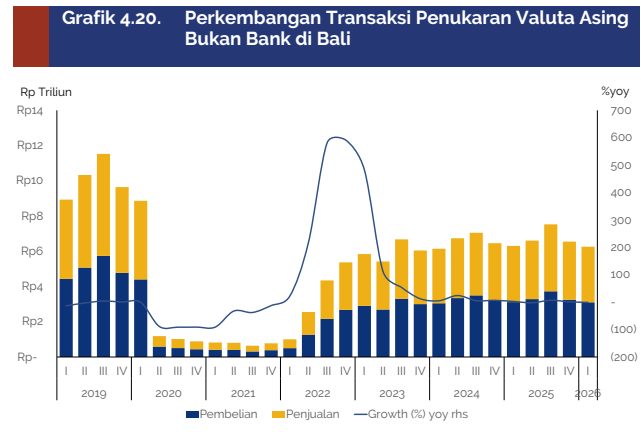
Aktivitas transaksi jual-beli valuta asing (valas) di Provinsi Bali melalui KUPVA pada triwulan I 2026 lebih rendah sejalan pola musiman kunjungan wisatawan mancanegara yang turun pasca Natal dan Tahun Baru serta dampak perang di Timur Tengah. Sepanjang triwulan I 2026 total transaksi KUPVA BB tercatat sebesar Rp6,26 triliun, terdiri dari penjualan valas sebesar Rp3,16 triliun, dan pembelian valas sebesar Rp3,10 triliun. Secara triwulanan, total transaksi pada triwulan I 2026 turun sebesar 4,43% (qtq) sejalan dengan penurunan jumlah wisatawan di Bali sebesar 11,16% (qtq). Secara tahunan, total transaksi jual-beli valas juga berkontraksi sebesar 0,70%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (1,42%; yoy) dan pertumbuhan



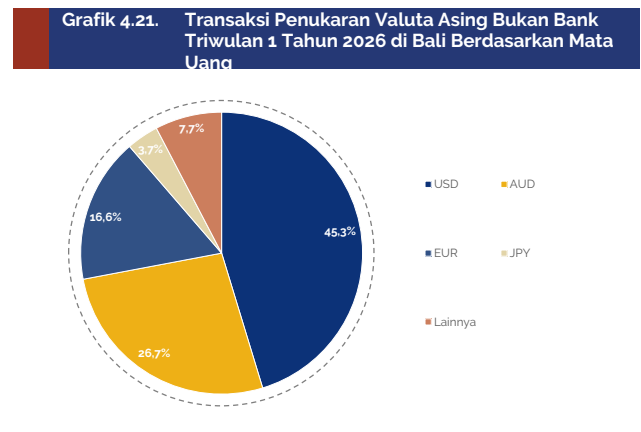
Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

pada periode yang sama tahun sebelumnya (2,55% yoy). Selain faktor musiman, dinamika perang Iran-Israel diperkirakan turut berdampak pada lebih terbatasnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tengah pemulihan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pasca pandemi.

Layanan penukaran valas melalui KUPVA BB di Bali, sebagai salah satu sarana penunjang pariwisata, didukung oleh jumlah jaringan kantor yang besar. Hingga triwulan I 2026, terdapat 140 Kantor Pusat dan 462 Kantor Cabang KUPVA BB di Provinsi Bali yang terutama terkonsentrasi di tiga wilayah tujuan wisata, yaitu Badung, Denpasar, dan Gianyar.

Berdasarkan jenis mata uang, transaksi penukaran valas pada KUPVA BB di Bali tetap didominasi oleh USD. Selama triwulan I tahun 2026 transaksi penukaran USD mencapai 45,3% dari total transaksi, diikuti AUD, EUR, dan JPY masing-masing sebesar 26,7%, 16,6%, dan 3,7%. Adapun 7,7% lainnya merupakan mata uang yang berasal dari berbagai negara, baik Asia, Eropa, Amerika, hingga Afrika. Di luar USD, struktur penukaran berdasarkan jenis

mata uang tersebut juga dapat memberikan gambaran negara asal wisatawan mancanegara yang berkunjung di Provinsi Bali.

4.4. UPAYA DALAM MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

4.4.1. Sistem Pembayaran Tunai

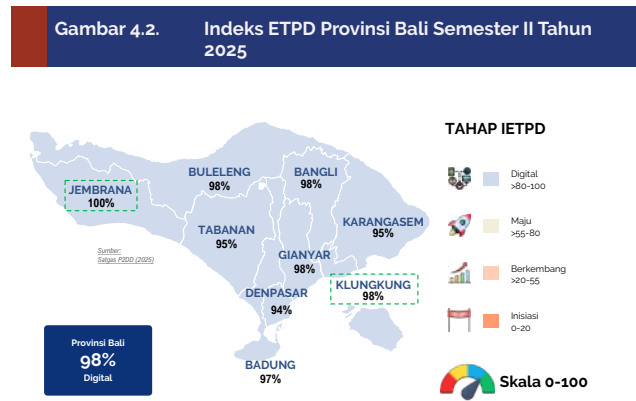
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali terus mendorong ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas di masyarakat sekaligus memperkuat implementasi Gerakan Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah. Inisiatif ini tidak hanya difokuskan pada kelancaran peredaran uang dan stabilitas likuiditas, tetapi juga pada peningkatan kesadaran publik untuk lebih menghargai dan merawat Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dalam pelaksanaannya, BI Bali menyediakan berbagai layanan perbankan seperti setoran dan pembayaran, fasilitas penukaran uang, kas keliling dalam kota dan luar kota serta kegiatan remise yang dilakukan secara rutin. Upaya edukasi kepada masyarakat turut diperkuat melalui kampanye CBP Rupiah, yang menekankan

pentingnya kecintaan, kebanggaan, dan pemahaman terhadap Rupiah, serta dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra di wilayah Bali. Sepanjang triwulan I 2026 dan bulan April s.d. Mei 2026, sejumlah inisiatif konkret telah direalisasikan untuk mendukung tujuan tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan layanan kas keliling bersama dengan 12 Perbankan dalam rangka Serambi 2026 serta berkolaborasi bersama dengan 6 Perbankan di 30 titik penukaran uang di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali pada triwulan I 2026. Sementara itu, KPwBI Provinsi Bali juga melaksanakan 2 kali layanan kas keliling dalam kota di Kabupaten Denpasar dan 1 kali layanan kas keliling luar kota di Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan di Kabupaten Klungkung pada triwulan II 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kebutuhan transaksi tunai masyarakat yang tinggi pada triwulan laporan.
2. Bank Indonesia Bali secara aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi Gerakan Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah untuk menumbuhkan kecintaan dan menjaga Rupiah oleh masyarakat. Sepanjang triwulan I 2026, tercatat sebanyak 34 kali aktifitas edukasi yang berhasil melibatkan total 14.763 peserta dan pada bulan April dan Mei 2026 tercatat sebanyak 30 aktifitas edukasi serta melibatkan total 31.637 peserta. Program-program tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, pencapaian rekor MURI, termasuk kunjungan edukatif yang memberikan pengetahuan praktis mengenai cara mengenali keaslian Rupiah, merawatnya agar tetap layak edar, menggunakan Rupiah secara bijak, serta memahami peran dan nilai Rupiah dalam perekonomian nasional.

4.4.2. Sistem Pembayaran Nontunai

Secara umum, KPwBI Provinsi Bali terus mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Bali, yang meliputi perluasan penggunaan QRIS dan juga elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, KPwBI Provinsi Bali berperan aktif melalui berbagai kegiatan kolaborasi baik dengan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pemerintah Daerah, Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP), dan komunitas dan mitra strategis perluasan QRIS lainnya, kemudian dalam hal elektronifikasi pemerintah daerah KPwBI Provinsi Bali terus berkolaborasi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui TP2DD, akselerasi transformasi digital difokuskan pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang mencakup optimalisasi transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah. Berdasarkan penilaian semester II 2025, indeks ETPD Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang positif, di mana seluruh pemerintah daerah telah berada pada tahap digital dengan nilai IETPD di atas 80% (Gambar 4.2). Sebagai bagian dari TP2DD, KPwBI Provinsi Bali turut melakukan asesmen digitalisasi transaksi pemda serta menjalin koordinasi intensif untuk meningkatkan penggunaan pembayaran nontunai, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran daerah, termasuk implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang diterbitkan oleh BPD Bali.

Pada triwulan I 2026, KPwBI Provinsi Bali telah melaksanakan sejumlah program strategis, antara lain:

1. Kick Off BALIGIVATION 2026

Bali Digital Innovation (Baligivation) merupakan inisiatif strategis Bank Indonesia Provinsi Bali untuk mengakselerasi transformasi digital daerah melalui rangkaian kegiatan perluasan ekosistem pembayaran digital guna mendorong inklusi ekonomi, pada tahun 2026 rangkaian BALIGIVATION dibuka

melalui program Kick Off BALIGIVATION 2026 yang dilaksanakan pada 28 April 2026. Rangkaian *Kick Off* BALIGIVATION terdiri dari acara seremoni *launching* program perluasan digitalisasi dan penguatan sinergi dalam penertiban industri KUPVA BB di Bali serta Seminar Digital dan Sarasehan KUPVA BB. Pada acara seremoni dilakukan *launching* terhadap program Pasar Rakyat Bali Go Digital yang akan memperluas digitalisasi pembayaran khususnya QRIS di 26 Pasar di Bali melalui 13 PSP motor penggerak digitalisasi, selain itu diluncurkan juga program perluasan edukasi QRIS dan Pelindungan Konsumen melalui Banjar Pintar, Roadshow BALIGIVATION, dan berbagai kompetisi digital untuk masyarakat lainnya. Sementara dari sisi Pengawasan Sistem Pembayaran pada kegiatan dimaksud dilakukan juga *Launching* Komitmen Program Sinergi Penertiban *Money Changer* Ilegal di Bali.

2. Sebagai bentuk dukungan terhadap program PIDI (Pusat Inovasi Digital Indonesia) yang merupakan inisiasi Bank Indonesia untuk mengoptimalkan talenta digital di Indonesia untuk dapat berinovasi untuk menyelesaikan berbagai tantangan bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, KPwBI Bali turut mensosialisasikan program dimaksud di Provinsi Bali melalui program *roadshow* sosialisasi PIDI – Digdaya x Hackathon pada 7 Maret 2026 di Universitas Warmadewa. Kegiatan ini bertujuan untuk menjangkau talenta digital potensial di Provinsi Bali ini untuk dapat meningkatkan ide dan inovasi yang dimiliki untuk dapat diimplementasikan melalui program PIDI yang akan turut menjadi wadah pelatihan, coaching, kompetisi, dan juga *bussiness matching* untuk berbagai ide yang ada. Adapun kegiatan ini diikuti oleh sekitar 700 peserta yang hadir secara *offline* dan *online* di wilayah Balinusra.
3. *Advisory* KPwBI Provinsi Bali dalam Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Bali

Sebagai upaya dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah di Bali, KPwBI Provinsi Bali melakukan berbagai kegiatan strategis

yang bersinergi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Level Provinsi dan Kota/Kabupaten melalui berbagai program strategis yang meliputi:

- a. High Level Meeting (HLM) TP2DD Provinsi Bali : HLM TP2DD dilaksanakan pada 10 Februari 2026 yang turut disinergikan dengan HLM TPID Provinsi Bali. Pada kegiatan dimaksud turut dilakukan *launching roadmap* Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Periode 2026-2030 untuk seluruh TP2DD Provinsi dan Kota/Kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi acuan dan kerangka kerja TP2DD dalam mengelektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk periode tersebut.
- b. Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan *Workshop* Pengisian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD): Kegiatan dilaksanakan pada 20 Januari 2026 dengan narasumber dari kementerian Dalam Negeri, DKSP Bank Indonesia, dan BPD Bali dengan peserta seluruh TP2DD Se-Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas penggunaan KKI sebagai opsi pembayaran pemda di seluruh daerah di Bali sebagai untuk mengakselerasi realisasi belanja daerah. Bali menjadi salah satu daerah potensial dalam perluasan KKI dengan adanya dukungan BPD Bali sebagai salah satu *first mover* penerbit KKI *Online Payment*. Adapun Bali merupakan salah satu dari 3 wilayah yang seluruh Pemdanya telah 100% menggunakan KKI. Selain sosialisasi KKI dilakukan juga *workshop* pengisian IETPD Semester II 2025 untuk memastikan pelaporan yang disampaikan Pemda telah tepat dan sesuai.
- c. Capacity Building Championship TP2DD : Sebagai Upaya untuk meningkatkan capaian TP2DD Bali dalam championship TP2DD, KPwBI Provinsi Bali melaksanakan *capacity building* dan pendampingan terhadap pengisian *self assessment*. Narasumber dari kegiatan Capacity Building dimaksud meliputi Kemenko Perekonomian, BPD Bali, dan juga Bank Indonesia dengan topik pembahasan mengenai aspek yang perlu diperhatikan untuk dapat meningkatkan capaian Bali dalam *championship* TP2DD yang meliputi kelengkapan dokumentasi,

DOKUMENTASI KEGIATAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DI PROVINSI BALI


substansi kegiatan, evaluasi pengisian pada tahun sebelumnya, serta aspek potensial yang dapat menjadi kelebihan TP2DD Bali. Kegiatan dilanjutkan dengan one on one meeting dengan setiap TP2DD Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pengisian yang telah disampaikan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.





BOKS 3



POTENSI QRIS CROSS BORDER UNTUK MENINGKATKAN BELANJA WISMAN TIONGKOK



www.bi.go.id



Contact Center
131



Jl. Letda Tantular
No. 4, Denpasar

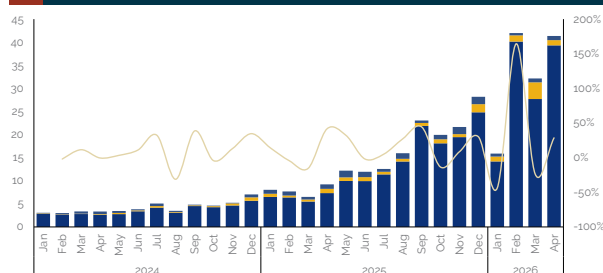


QRIS Cross Border sebagai merupakan bentuk inovasi dan pengembangan sistem pembayaran Indonesia yang menjadi solusi pembayaran digital yang memudahkan wisatawan dan pelaku usaha untuk bertransaksi lintas negara. Hingga saat ini, QRIS Cross Border telah terhubung dengan enam negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan yang terbaru Tiongkok. Peluncuran resmi konektivitas QRIS Indonesia-Tiongkok pada 30 April 2026 dilakukan Jakarta. Saat ini sudah terdapat 24 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dari Indonesia dan 19 PJP dari Tiongkok yang telah terintegrasi dalam skema tersebut, sehingga memungkinkan masyarakat kedua

negara melakukan pembayaran secara langsung melalui pemindaian QR menggunakan aplikasi pembayaran yang biasa digunakan di negara asalnya.

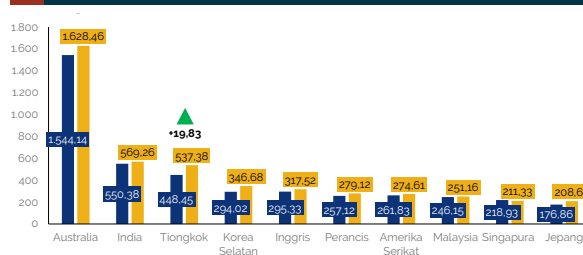
Bagi Provinsi Bali, implementasi QRIS Cross Border Tiongkok merupakan peluang strategis untuk meningkatkan kemudahan transaksi bagi wisatawan asal Tiongkok, mendorong belanja wisatawan, memperkuat daya saing sektor pariwisata, serta mendukung akselerasi digitalisasi ekonomi daerah. Selain itu, pelaku usaha, khususnya UMKM, memperoleh kemudahan dalam menerima pembayaran secara lebih aman, praktis, dan efisien tanpa memerlukan uang tunai maupun penukaran valuta asing secara fisik.

Grafik B3.1. Transaksi QRIS Cross Border Provinsi



Sumber: Bank Indonesia, diolah Perkembangan transaksi QRIS Cross Border Provinsi Bali 2024-2025

Grafik B3.2. Sebaran asal negara Wisman Prov. Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali Kunjungan Wisman berdasarkan kebangsaan 2024-2025

BOKS 3

66

Laporan
Perekonomian
Provinsi Bali

Sebagai ilustrasi, transaksi *inbound* QRIS Cross Border di Bali pada periode 2024–2025 masih didominasi oleh wisatawan asal Malaysia yang mencakup 88% dari total 227.204 transaksi, meskipun Malaysia hanya menempati peringkat kedelapan sebagai negara asal wisatawan mancanegara ke Bali pada periode yang sama. Dengan Tiongkok yang merupakan negara asal wisatawan terbesar ketiga ke Bali dengan total kunjungan mencapai 985.830 wisatawan selama tahun 2024–2025 kini telah terhubung melalui QRIS Cross Border, terdapat potensi peningkatan volume dan nilai transaksi lintas negara yang signifikan di Provinsi Bali seiring semakin luasnya akses pembayaran digital bagi wisatawan Tiongkok.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan potensi peningkatan volume dan nilai transaksi QRIS Cross Border di Provinsi Bali, Bank Indonesia Provinsi Bali akan melakukan perluasan sosialisasi dan peningkatan *awareness* bagi wisatawan asal Tiongkok serta *merchant* QRIS Bali. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memperluas penggunaan QRIS Cross Border meliputi 1) Publikasi materi edukasi QRIS Cross Border di Bandara I Gusti Ngurah Rai; 2) Edukasi kepada Asosiasi Pariwisata di

Provinsi Bali (ASITA, IHGMA, dan HPI); 3) Peluncuran *Starterpack* QRIS di kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai; serta 4) Kolaborasi dengan Tourist Information Center untuk menyertakan informasi penerimaan transaksi QRIS Cross Border pada Peta Provinsi Bali yang dibagikan kepada Wisatawan Mancanegara. Beberapa upaya tersebut akan kembali dilakukan dan diperluas dengan penambahan materi penerimaan transaksi QRIS untuk Tiongkok.

Kehadiran QRIS Cross Border Tiongkok diharapkan dapat mendukung peningkatan sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi antarnegara, khususnya di Provinsi Bali sekaligus memperkuat ekosistem pembayaran digital yang lebih inklusif, efisien, dan terhubung secara global. Selain itu, pengembangan QRIS Cross Border juga sejalan dengan upaya penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal (*Local Currency Transaction/LCT*) untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.

Gambar B3.1. Upaya Perluasan QRIS Cross Border







BAB V

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali berada pada level yang baik, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang solid pada triwulan I 2026. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten terjaga rendah. Selain itu, kesejahteraan masyarakat di Bali lebih baik dibandingkan nasional, tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih rendah dibandingkan nasional meski secara nilai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2025 mencatat kenaikan dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.



Angkatan Kerja
(Juta Orang)

Februari
2026
2,66

November
2025
2,71



Kemiskinan
(%)

September
2025
3,42

Maret
2025
3,72



Pengangguran Terbuka
(%)

Februari
2026
1,59

November
2025
1,45



Gini Ratio

September
2025
0,333

Maret
2025
0,353

Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali berada pada level yang baik, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang solid pada triwulan I 2026. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten terjaga rendah. Tren ini didukung oleh terciptanya lapangan kerja baru di sejumlah lapangan usaha (LU), dengan pertumbuhan penambahan jumlah tenaga kerja terbesar tercatat pada LU Transportasi, Penyediaan Akmamin, Perdagangan, dan Konstruksi.

Lebih lanjut, secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di Bali lebih baik dibandingkan kondisi nasional, tecermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih rendah dibandingkan nasional, meski secara nilai meningkat dibandingkan indeks tahun sebelumnya. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan tidak hanya pada jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada ketimpangan dan intensitas kemiskinan itu sendiri. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada 2025 mencatat kenaikan dan tetap berada di atas rata-rata nasional yang mencerminkan kualitas hidup yang terus membaik.

Dengan perkembangan ini, Bali terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja pada berbagai LU utama, dan stabilitas inflasi yang terjaga.

5.1. KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali terjaga baik.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat relatif stabil pada level yang rendah meski menunjukkan sedikit peningkatan dari 1,58% pada Februari 2025 menjadi 1,59% pada Februari 2026. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja justru mengalami penurunan. Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 2,66 juta orang, turun sekitar 77,85 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Adapun penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian dan Industri Pengolahan. Lebih lanjut, untuk mendukung penyerapan tenaga kerja, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan *website* Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) pada 7 Februari 2024 sebagai sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai investasi, yang dapat mendorong persepsi

positif investor dan memperkuat realisasi investasi pada berbagai sektor unggulan di Bali. Selain itu, pada kegiatan Bali Jagadhita 2025, juga telah diluncurkan Buku Katalog Investasi PIKBS yang memuat mengenai perkembangan perekonomian serta profil investasi potensial. Adapun prinsip pengelolaan PIKBS diharapkan mampu menyinergikan seluruh peran kementerian dan lembaga, melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan proyek investasi di sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan padat karya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali pada Februari 2026 menurun dibandingkan kondisi Februari 2025 pada tingkat pendidikan Diploma ke atas.

Meskipun secara keseluruhan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat, TPT penduduk lulusan Diploma ke atas justru menurun, menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha yang membutuhkan

Tabel 5.1. Tabel Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Bali

KEGIATAN UTAMA	2021		2022		2023		2024		2025			2026
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Agt	Nov	Feb
Penduduk Usia Kerja (15+ thn) (Jt Orang)	3,48	3,51	3,48	3,56	3,53	3,49	3,51	3,52	3,54	3,55	3,56	3,56
Angkatan Kerja (15-65 thn) (Jt Orang)	2,57	2,58	2,68	2,74	2,73	2,69	2,71	2,71	2,74	2,74	2,71	2,66
2,43	2,44	2,55	2,61	2,62	2,62	2,66	2,67	2,69	2,70	2,67	2,62	2,62
139,14	138,67	129,68	131,47	101,82	72,42	50,68	48,68	43,13	40,99	39,25	43,32	43,32
Bukan Angkatan Kerja (Rb Orang)	915,17	928,57	794,90	824,60	805,83	799,97	793,45	805,79	799,04	804,80	843,10	904,14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,71	73,54	77,14	76,86	77,19	77,08	77,37	77,11	77,40	77,31	76,29	74,63
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,42	5,37	4,84	4,80	3,73	2,69	1,87	1,79	1,58	1,49	1,45	1,59

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Tabel 5.2. Penduduk Bali yang Bekerja Menurut LU (Ribu Orang)

Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026
	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Nov	Feb
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	507	546	564	534	599	519	503	496	514	480	515	464	417	497
Industri Pengolahan	396	382	395	394	391	404	422	384	437	386	428	404	410	358
Konstruksi	179	159	155	155	160	176	182	175	184	200	186	206	206	200
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	502	496	535	511	554	553	536	560	520	538	526	562	563	488
Transportasi dan Pergudangan	97	60	88	58	53	86	95	99	111	108	119	121	116	133
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	316	236	220	234	233	315	320	358	380	381	388	392	403	343
Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi	7	14	23	17	18	17	22	13	14	18	13	13	16	6
Jasa Keuangan dan Asuransi	69	62	67	63	72	63	65	56	73	74	73	68	63	70
Jasa Perusahaan	70	43	33	34	40	51	41	46	45	49	48	41	53	65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	122	114	112	137	117	126	101	114	102	115	106	108	112	118
Jasa Pendidikan	107	103	101	109	103	97	119	109	115	116	113	117	105	112
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56	51	59	56	79	60	47	49	51	50	53	53	44	60
Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Utang; Real Estate dan Jasa Lainnya	179	157	166	140	132	141	170	158	116	150	125	152	165	167
Jumlah	2.607	2.423	2.428	2.440	2.553	2.607	2.625	2.618	2.663	2.665	2.694	2.702	2.673	2.617

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Tabel 5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali Menurut Pendidikan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)	2024		2025		2026	
	Februari	Agst	Februari	Agst	Februari	Agst
SMP ke bawah (%)		0,43		0,61		NA
SMA (%)		2,80		1,57		1,69
SMK (%)		3,01		2,57		3,15
Diploma I-III dan D IV-S III (%)		3,06		2,91		2,71
TOTAL		1,87		1,58		1,59

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Tabel 5.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026
	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Nov	Feb
SMP ke bawah (ribu orang)	1.221	1.146	1.082	1.093	1.232	1.155	1.294	1.212	1.156	1.192	1.133	1.132	1.131	1.014
SMA (ribu orang)	597	529	555	534	513	571	486	555	608	604	649	632	591	689
SMK (ribu orang)	351	337	326	360	380	402	378	393	383	395	403	441	443	351
Diploma I / II / III (ribu orang)	128	109	136	122	123	148	123	135	159	138	154	144	136	142
Universitas (ribu orang)	311	302	328	331	305	331	344	323	357	336	355	353	372	421
TOTAL (Ribu Orang)	2.607	2.423	2.427	2.440	2.553	2.607	2.625	2.618	2.663	2.665	2.694	2.702	2.673	2.617

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

kompetensi dan kualifikasi tertentu mengalami peningkatan. Pada Februari 2026, tercatat TPT lulusan SMA sebesar 1,69%, lulusan SMK sebesar 3,15%, lulusan Diploma ke atas sebesar 2,71%. TPT lulusan SMA dan SMK tercatat meningkat dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 1,57% dan 2,57%, sedangkan TPT lulusan Diploma ke atas menurun dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 2,91%. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa kelompok penduduk berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan yang relatif lebih besar dalam memasuki pasar kerja serta mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan kapasitas penyerapan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi tersebut.

Sebagian besar pekerja di Provinsi Bali memiliki tingkat pendidikan SMP ke bawah. Jumlah pekerja lulusan

setingkat SMP ke bawah tercatat mencapai 1,01 juta orang pada periode Februari 2026 atau 38,75% dari total pekerja, lebih rendah dibandingkan periode Februari 2025 yang mencapai 1,13 juta orang atau 42,04%. Sementara itu, pekerja dengan tingkat pendidikan diploma merupakan golongan pekerja dengan jumlah paling kecil, yakni 142 ribu orang dengan pangsa sebesar 5,42%.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, pemerintah melalui Program Magang Nasional¹ berupaya memperkuat keterampilan teknis dan daya saing pekerja khususnya lulusan baru perguruan tinggi (*fresh graduate*) dengan memberikan pengalaman kerja di berbagai perusahaan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali mengimplementasikan berbagai strategi untuk

1. Program Magang Nasional merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diturunkan oleh Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus dalam maksimum 1 tahun terakhir.

meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sejalan dengan visi pemerintahan yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program pemerintah tersebut mencakup Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan pekerja, dengan tujuan mendorong produktivitas dan memajukan tenaga kerja Bali menuju kategori kelas menengah atas. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga memfokuskan upaya pada penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan nilai tambah sektor riil sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan strategi ini, diharapkan struktur ketenagakerjaan di Bali dapat semakin bertransformasi menuju tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, dan berdaya saing.

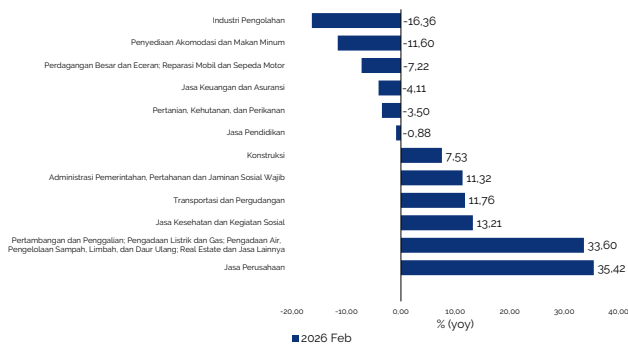
Sejumlah LU menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja. LU dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tertinggi, yaitu LU Jasa Perusahaan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 35,42% (yoy) dan 13,21% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan sejalan dengan berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga triwulan I 2026 menyerap 10.589 relawan se-Bali.

Secara pangsa sektoral, LU Pertanian, Perdagangan, dan Industri menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali pada periode Februari 2026. Penyerapan tenaga kerja LU Pertanian menjadi yang tertinggi, selanjutnya pada LU Perdagangan dan Industri. Tingginya serapan tenaga kerja pada LU tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja pariwisata dan kebutuhan pangan di Provinsi Bali yang mendorong konsumsi komoditas pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil olahan produk lokal.

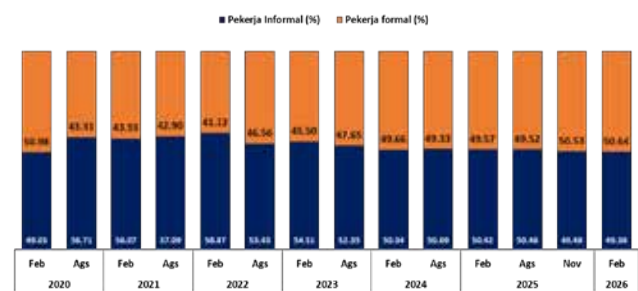
Mayoritas pekerja di Provinsi Bali bekerja pada sektor formal. Pada Februari 2026, proporsi pekerja formal tercatat sebesar 50,64%, sementara pekerja informal sebesar 49,36%. Pangsa pekerja formal menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yang terutama dipengaruhi oleh penurunan jumlah pekerja pada lapangan usaha (LU) pertanian. Sektor pertanian

Grafik 5.1. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama pada Februari 2026



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Grafik 5.2. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Tabel 5.5. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (dalam %)

Status Pekerjaan Utama	2021		2022		2023		2024		2025			2026
	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Nov	Feb
Berusaha sendiri (%)	15,17	16,15	15,46	17,22	15,53	18,27	16,38	18,41	16,96	21,13	20,34	18,32
Berusaha dibantu buruh tidak tetap (%)	20,76	18,29	21,57	15,88	18,58	14,55	14,62	13,19	14,16	11,12	11,17	12,29
Pekerjaan bebas di nonpertanian (%)	3,30	3,97	3,81	4,01	4,49	3,72	5,02	3,75	5,10	5,81	5,92	6,04
Pekerja bebas di pertanian (%)	1,51	1,92	1,29	2,43	1,40	2,46	1,65	2,41	2,80	2,02	1,63	2,54
Pekerja tak dibayar (%)	15,33	16,76	16,74	13,89	14,51	13,35	12,67	12,93	11,40	10,38	10,42	10,17
Pekerja Informal (%)	56,07	57,09	58,87	53,43	54,51	52,35	50,34	50,69	50,42	50,46	49,48	49,36
Berusaha dibantu buruh tetap (%)	3,68	2,96	1,85	2,91	3,07	3,13	3,22	3,22	3,48	3,49	3,69	3,67
Buruh/karyawan (%)	40,25	39,94	39,27	43,65	42,43	44,52	46,44	46,11	46,09	46,03	46,84	46,97
Pekerja formal (%)	43,93	42,90	41,12	46,56	45,50	47,65	49,66	49,33	49,57	49,52	50,53	50,64
TOTAL (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

didominasi oleh pekerja informal dan terdapat indikasi penurunan tenaga kerja karena *shifting* ke pekerja formal atau pensiun tanpa ada pergantian dari tenaga kerja baru. Adapun, tipe tenaga kerja formal didominasi oleh buruh/karyawan sedangkan tenaga kerja informal didominasi oleh kelompok dengan status berusaha sendiri dan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap. Tenaga kerja informal didominasi oleh pelaku usaha pariwisata. Meskipun sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, namun kualitas pekerjaan yang tercipta sebagian besar masih bersifat informal sehingga perlu mendapatkan perhatian pada aspek tingkat perlindungan maupun kepastian pendapatan pekerja.

5.2. KESEJAHTERAAN

5.2.1. Perkembangan Angka Kemiskinan

Kondisi kesejahteraan masyarakat Bali pada September 2025 semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan perbaikan serapan tenaga kerja Bali. Membaiknya kinerja kesejahteraan masyarakat Bali pada September 2025 terkonfirmasi dari persentase penduduk miskin yang tercatat sebesar 3,42%, atau sejumlah 160,09 ribu orang, menurun dibandingkan jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2025 yang tercatat sebesar 3,72% atau sejumlah 173,24 ribu orang.

Berdasarkan daerah tinggal, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan tercatat mengalami penurunan. Pada periode pelaporan September 2025, persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sebesar 3,06%, lebih rendah dibandingkan periode Maret 2025 yang tercatat sebesar 3,27%. Lebih lanjut, pada wilayah perdesaan jumlah penduduk miskin untuk periode September 2025 tercatat sebesar 4,44% dari total penduduk, atau lebih rendah dibandingkan periode Maret 2025 yang tercatat sebesar 4,97%. Menurunnya tingkat kemiskinan di Bali didukung oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang solid, pengeluaran rumah tangga meningkat menunjukkan daya beli masyarakat yang membaik dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang meningkat, termasuk lapangan usaha jenis penyediaan akomodasi, makan dan minum yang menyerap banyak tenaga kerja di Provinsi

Bali sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan.

Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan juga didorong oleh stimulus program pengentasan kemiskinan melalui tiga program yang terarah secara langsung kepada penduduk miskin yaitu: 1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha. Adapun program bantuan Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk menekan kemiskinan adalah melalui pemanfaatan Bansos PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI JKN). Provinsi Bali juga akan menjadi *pilot project* Bansos berbasis *Digital Public Infrastructure* yang akan diluncurkan oleh pemerintah pusat pada tahun ini. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Bali juga bersinergi dengan desa adat untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, dengan pendekatan berbasis adat, data tepat sasaran, dan bantuan lintas sektor.

5.2.2. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index- P1*)² Provinsi Bali tercatat sebesar 0,58 pada September 2025, lebih tinggi dari Maret 2025 sebesar 0,56. Indeks P1 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk di bawah garis kemiskinan (pengeluaran Rp642.986 per kapita per bulan). Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (*P2*)³ meningkat pada September 2025 yaitu 0,13. Di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan Penduduk Bali masih perlu mendapat perhatian, ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam kelompok miskin semakin besar, ada sebagian yang masih dekat dengan garis kemiskinan, namun masih terdapat beberapa yang jauh tertinggal. Hal ini didorong oleh kombinasi inflasi pangan, pemulihan ekonomi yang belum merata, dan terjadi kerentanan sosial ekonomi tertentu. Peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut relatif sejalan dengan perkembangan inflasi tahunan yang mengalami peningkatan menjadi 2,51% (yoy) pada September 2025,

2. Indeks P1 merupakan Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan atau jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

3. Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 5.6. Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bali 2021 – 2025

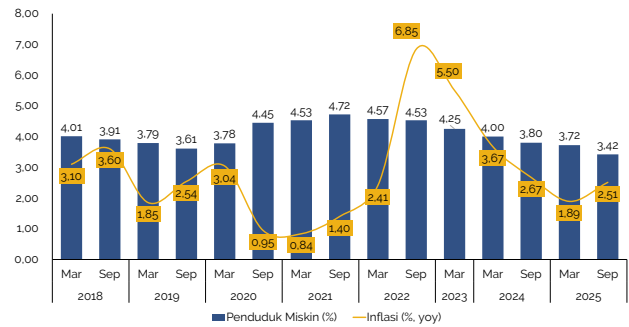
Keterangan	2021		2022		2023	2024		2025	
	Maret	September	Maret	September	Maret	Maret	September	Maret	September
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	201.97	211.46	205.68	205.36	193.78	184.43	176.21	173.24	160.09
Persentase Penduduk Miskin (%)	4.53	4.72	4.57	4.53	4.25	4.00	3.80	3.72	3.42
- Kota	4.12	4.33	4.23	4.12	3.77	3.55	3.32	3.27	3.06
- Desa	5.52	5.68	5.39	5.58	5.50	5.20	5.11	4.97	4.44
Garis Kemiskinan (Rp)	452.221	461.532	485.022	515.037	529.643	568.510	580.306	607.847	642.986
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.68	0.76	0.63	0.56	0.55	0.49	0.44	0.56	0.58
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.15	0.17	0.13	0.10	0.10	0.09	0.07	0.11	0.13

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

dari 1,89% (yoy) pada Maret 2025. Kenaikan inflasi tahunan tersebut mengindikasikan peningkatan harga barang dan jasa secara umum terhadap periode yang sama tahun sebelumnya, di mana dengan pengeluaran yang lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya, dapat diperoleh barang dan jasa dengan nilai yang sama. Meski demikian, baik Indeks P1 maupun P2 Provinsi Bali masih lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional. Pada September 2025, Indeks P1 nasional tercatat sebesar 1,29 dan Indeks P2 nasional tercatat sebesar 0,30.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, indeks P1 dan P2 pada September 2025 di perkotaan tercatat lebih rendah dibandingkan wilayah perdesaan. Nilai indeks P1 di perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,473, sedangkan di daerah perdesaan tercatat sebesar 0,881. Demikian juga dengan indeks P2 di periode yang sama, daerah perkotaan mencatat indeks P2 sebesar 0,105, lebih rendah dibandingkan dengan indeks P2 di daerah perdesaan sebesar 0,218. Kondisi ini mengindikasikan

Grafik 5.3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Penduduk di Provinsi Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Provinsi Bali di wilayah perdesaan lebih jauh dengan garis kemiskinan dibandingkan penduduk miskin di daerah perkotaan. Indeks P1 dan P2 di perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan pada periode September 2025 dibandingkan periode Maret 2025. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan sehingga indeks kedalaman garis kemiskinannya menjadi semakin tinggi, serta semakin

Tabel 5.7. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Periode	Kota	Desa	Kota+Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2021	0.653	0.753	0.682
September 2021	0.710	0.878	0.759
Maret 2022	0.618	0.641	0.625
September 2022	0.446	0.858	0.563
Maret 2023	0.480	0.740	0.553
Maret 2024	0.428	0.689	0.499
September 2024	0.399	0.547	0.439
Maret 2025	0.564	0.551	0.560
September 2025	0.473	0.881	0.579
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2021	0.154	0.156	0.154
September 2021	0.148	0.226	0.171
Maret 2022	0.137	0.109	0.129
September 2022	0.075	0.170	0.102
Maret 2023	0.086	0.142	0.102
Maret 2024	0.074	0.135	0.090
September 2024	0.057	0.085	0.065
Maret 2025	0.128	0.086	0.117
September 2025	0.105	0.218	0.134

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

tinggi ketimpangan pengeluaran di antara kelompok miskin tersebut.

5.2.3. Ketimpangan Pendapatan Penduduk

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Bali pada September 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan periode Maret 2025. Hal ini tecermin dari indeks rasio gini yang tercatat sebesar 0,333 pada September 2025, yang lebih rendah jika dibandingkan dengan periode Maret 2025 sebesar 0,353. Indeks rasio gini Provinsi Bali pada Maret 2025 berada di bawah nasional yang tercatat sebesar 0,363. Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah Balinusra, rasio gini Bali lebih rendah dari NTB, namun lebih tinggi dibandingkan NTT yang tercatat sebesar 0,322. Indeks rasio gini yang rendah menunjukkan kesenjangan ekonomi antarpenduduk yang rendah di Provinsi Bali.

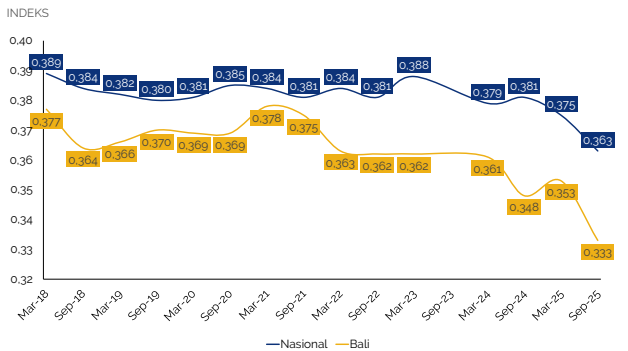
Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks rasio gini di daerah perkotaan pada September 2025 sebesar 0,338, lebih rendah jika dibandingkan periode sebelumnya, yakni di angka 0,352. Sementara di daerah perdesaan,

indeks rasio gini pada September 2025 tercatat sebesar 0,269, menurun dibandingkan periode Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,277. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pendapatan di Provinsi Bali pada Maret 2025 untuk kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 19,31%. Kondisi ini menunjukkan pendapatan penduduk di Provinsi Bali pada September 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 19,16% dan daerah perdesaan tercatat sebesar 21,54%. Hal ini menunjukkan, wilayah perkotaan maupun perdesaan tergolong dalam kategori ketimpangan rendah

5.2.4. Perkembangan Nilai Tukar Petani

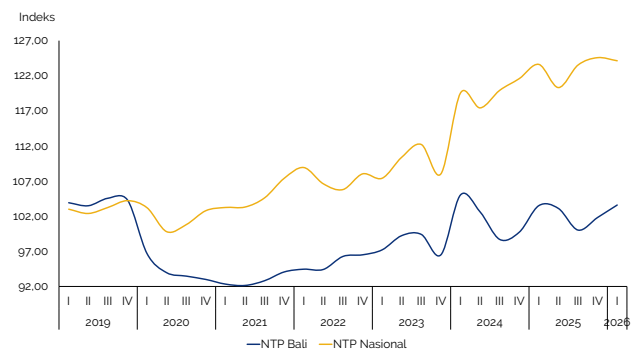
Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Bali pada triwulan I 2026 meningkat dibandingkan kondisi pada triwulan sebelumnya. Sepanjang triwulan I 2026, rata-rata indeks NTP Provinsi Bali tercatat sebesar 103,59, meningkat dibandingkan rata-rata NTP periode triwulan IV 2025 sebesar 101,82. Indeks NTP Bali pada triwulan I 2026 yang berada di atas 100, mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu, nilai tukar produk yang

Grafik 5.4. Perkembangan Rasio Gini Bali dan Nasional



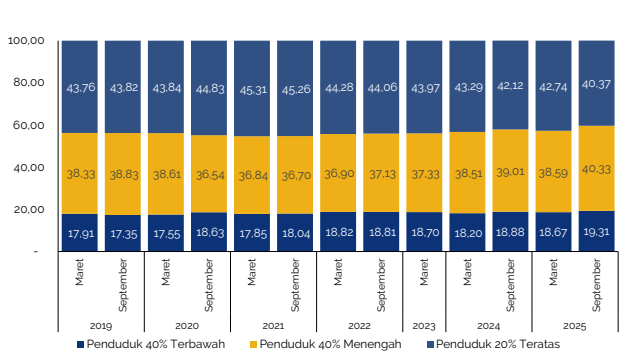
Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Grafik 5.6. Perkembangan NTP Bali dan Nasional



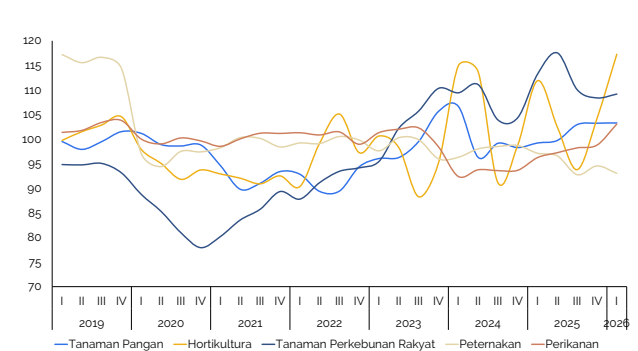
Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Grafik 5.5. Distribusi Pendapatan per Kapita Penduduk



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Grafik 5.7. Perkembangan NTP Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

dihasilkan petani sudah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga petani baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun sisi pembiayaan produksi pertanian.

Peningkatan NTP Bali pada triwulan I 2026 dikontribusi oleh meningkatnya NTP di empat subsektor, yakni subsektor hortikultura, perikanan, perkebunan rakyat, dan tanaman pangan. Peningkatan terbesar terjadi pada subsektor hortikultura sebesar 13,07 basis poin (bps) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, peningkatan NTP Bali tertahan oleh penurunan nilai tukar pada subsektor peternakan.

Pada triwulan I 2026, indeks yang diterima petani (IT) lebih tinggi dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani (IB) atau berada dalam kondisi surplus.

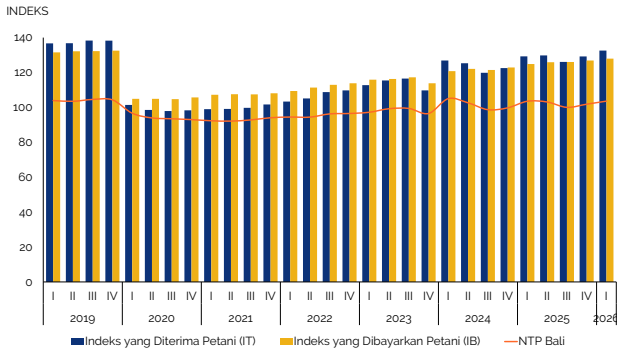
Pada triwulan I 2026, IT sebesar 132,55, meningkat 2,57 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, IB tercatat sebesar 127,94 meningkat 2,48 persen (yoy) dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan petani tercatat lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani.

5.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

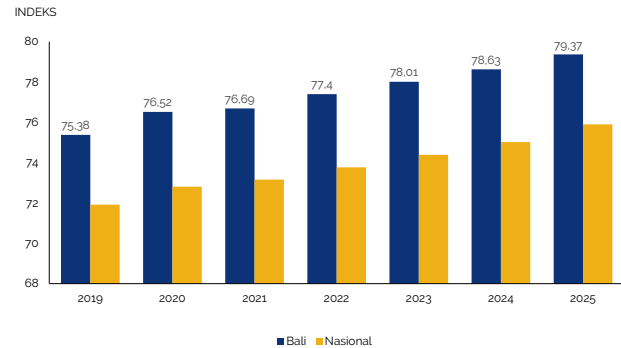
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 semakin meningkat dan masih di atas nasional. IPM Bali tahun 2025 tercatat sebesar 79,37, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2024 sebesar 78,63. Peningkatan IPM Bali pada tahun 2025 didukung oleh peningkatan pada komponen pembentuk IPM, yakni Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,48 persen (yoy), 0,07 persen (yoy), dan 2,20 persen (yoy). Sejalan dengan itu, indikator pengeluaran per kapita tercatat meningkat 3,10 persen (yoy). Peningkatan IPM mengindikasikan perekonomian Bali semakin inklusif dan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk.

Grafik 5.8. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)

Grafik 5.9. Perbandingan IPM Bali dengan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah BI)





BAB VI

PROSPEK PEREKONOMIAN

Perekonomian Bali pada tahun 2026 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,4-5,9% (yoy) di tengah gejolak geopolitik global dan lebih tinggi dibandingkan proyeksi PDB nasional 4,9-5,7% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh menguatnya kinerja LU Pertanian, Konstruksi, Perdagangan, serta tetap solidnya kinerja LU Akomodasi, Makan dan Minum dan LU Transportasi dan Pergudangan.

Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%.



Pertumbuhan Global Yoy

3,1%

2026



Pertumbuhan Nasional Yoy

4,9%-5,7%

2026



Pertumbuhan Bali Yoy

5,4%-5,9%

2026



Inflasi Bali Yoy

2,5%±1%

2026

GAMBARAN UMUM

Perekonomian Bali pada tahun 2026 diproyeksikan tetap tumbuh kuat dalam rentang 5,4–5,9% (yoy) di tengah gejolak geopolitik global. Prakiraan pertumbuhan ekonomi Bali tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi PDB nasional yang sebesar 4,9–5,7% (yoy). Pertumbuhan Bali pada 2026 ini didorong oleh menguatnya kinerja LU Pertanian, Konstruksi, Perdagangan, serta tetap solidnya kinerja LU Akomodasi, Makan dan Minum dan LU Transportasi dan Pergudangan. LU Pertanian diprakirakan tumbuh menguat utamanya sejalan dengan berlanjutnya program swasembada pangan dan semakin meluasnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih lanjut, Kinerja LU Konstruksi diprakirakan menguat seiring dengan tetap tingginya proyek konstruksi terkait sektor pariwisata, berlanjutnya proyek strategis multitalah, dan dimulainya konstruksi Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PSN PPN) Pengambangan. Kinerja LU terkait pariwisata diprakirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan kendati sedikit termoderasi akibat gejolak geopolitik global.

Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%, di tengah Konflik Timur Tengah yang menyebabkan gejolak harga minyak dunia, termasuk avtur global. Sinergi antara Pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha ke depannya terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama. Dengan kinerja sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya tahan, serta inflasi yang tetap terkendali, ekonomi Bali mampu berdaya tahan di tengah gejolak global.

6.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA DAN NASIONAL

6.1.1. PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA 2026

Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diproyeksikan melambat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan proyeksi *World Economic Outlook* (WEO) yang dipublikasikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada April 2026, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diprakirakan sebesar 3,1% (yoy), revisi bawah dibandingkan proyeksi sebelumnya pada bulan Januari 2026 sebesar 3,3% (yoy), dan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 sebesar 3,4% (yoy). Melambatnya ekonomi global disebabkan oleh meningkatnya **gejolak global akibat perang di Timur Tengah, dimana** penutupan Selat Hormuz mengakibatkan melonjak tingginya harga minyak dunia. Harga komoditas dunia melonjak, seperti minyak yang diprakirakan akan meningkat hingga 21,4% (yoy) pada 2026. Harga pangan juga turut meningkat seiring kenaikan harga energi dan harga pupuk.

Pertumbuhan ekonomi negara maju, seperti Amerika Serikat turut mengalami revisi bawah akibat konflik Timur Tengah sebesar 0,1% dibandingkan proyeksi Bulan Januari 2026 yakni dengan laju pertumbuhan 2,3% (yoy)

pada 2026. Ekonomi Amerika Serikat pada 2026 mayoritas didorong oleh kebijakan fiskal dan efek lanjutan dari turunnya suku bunga acuan yang dilakukan oleh The Fed pada 2025 lalu.

Pertumbuhan ekonomi Kawasan Eropa diprakirakan mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 1,1% (yoy) pada 2026. Adapun proyeksi pertumbuhan ekonomi Kawasan Eropa mengalami revisi bawah sebesar 0,2% dibandingkan proyeksi Bulan Januari 2026. Revisi bawah seiring dengan dampak berkepanjangan dari kenaikan harga energi yang terus-menerus terjadi sejak invasi Rusia ke Ukraina yang menyeret sektor manufaktur, serta tekanan tambahan berasal dari apresiasi Euro relatif terhadap mata uang negara-negara pengekspor produk serupa.

Sementara itu, ekonomi negara berkembang, termasuk Tiongkok yang merupakan salah satu kantong wisman utama Bali diprakirakan mengalami perlambatan dan mengalami revisi bawah sebesar 0,1% akibat adanya perang. Meskipun demikian, penurunan tarif efektif AS terhadap barang-barang Tiongkok menjadi salah satu faktor pendorong. Pertumbuhan ekonomi negara kantong wisman utama Bali lainnya yakni India pada 2026 diprakirakan sebesar 6,5% (yoy), revisi atas sebesar 0,1% dibandingkan proyeksi pada Bulan Januari 2026,

Tabel 6.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Country/Region (%YOY)	2025	Proyeksi April 2026		Delta Perubahan dari Proyeksi Januari 2026
		2026	2027	2026
World Output	3.4	3.1	3.2	-0.2
Advanced Economies	1.9	1.8	1.7	0.0
United States	2.1	2.3	2.1	-0.1
Euro Area	1.4	1.1	1.2	-0.2
Japan	1.2	0.7	0.6	0.0
Australia**	2.0	2.0	1.7	-0.1
Korea**	1.0	1.9	2.1	0.0
United Kingdom**	1.3	0.8	1.3	-0.5
Emerging Market and Developing Economies	4.4	3.9	4.2	-0.3
Emerging and Developing Asia	5.5	4.9	4.8	-0.1
China**	5.0	4.4	4.0	-0.1
India**	7.6	6.5	6.5	0.1
Emerging and Developing Europe	2.0	2.0	2.1	-0.3
Russia	1.0	1.1	1.1	0.3
ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand)	4.5	4.1	4.4	-0.1
World Trade Volume (goods and services)	5.1	2.8	3.8	0.2
Commodity Prices (US dollars)				
Oil	-14.4	21.4	-7.6	29.9
Nonfuel	9.6	21.7	1.9	14.2

Keterangan: ** 5 Besar Kantong Wisman Utama Bali

Sumber: IMF - World Economic Outlook April 2026

Gambar 6.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan I 2026



Sumber: BPS, diolah

serta jauh diatas prakiraan pertumbuhan ekonomi global yang tumbuh di kisaran 3% (yoy). Kuatnya kinerja ekonomi India sejalan dengan penurunan tarif dagang AS dari 50% menjadi 10% yang berpotensi mendorong kinerja ekspor India. Sejalan dengan India, Australia dan Korea juga diprakirakan tumbuh lebih tinggi pada 2026, sementara ekonomi Inggris diprakirakan sedikit termoderasi imbas dari konflik dan juga berakhirnya kebijakan moneter yang ekspansif.

6.1.2. PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2026

Ekonomi nasional di tahun 2026 diprakirakan tumbuh lebih tinggi ditopang oleh optimalisasi belanja pemerintah yang bersinergi dengan bauran Kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari 5,39% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026, ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong kenaikan mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan dampak positif berbagai stimulus Pemerintah. Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi didorong belanja program prioritas Pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR). Investasi khususnya investasi bangunan meningkat dipengaruhi oleh Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Sementara itu, ekspor turun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik ditopang oleh optimalisasi belanja Pemerintah yang bersinergi dengan bauran kebijakan Bank Indonesia termasuk pelonggaran kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif. **Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 diprakirakan berada dalam kisaran 4,9–5,7%.**

Dari sisi inflasi, perkembangan terkini menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen terjaga dalam sasaran dan ke depan perlu terus dikendalikan dari dampak memburuknya gejala global tetap berada

dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2026. Inflasi IHK April 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,48% (yoy). Inflasi inti turun menjadi 2,44% (yoy) didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) menurun menjadi 1,53% (yoy) seiring berakhirnya *base effect* dari kebijakan diskon tarif listrik pada 2025 serta minimnya perubahan harga yang diatur Pemerintah. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) juga turun menjadi 3,37% (yoy) dipengaruhi oleh berlangsungnya panen raya di daerah sentra produksi dan terjaganya pasokan pangan di berbagai daerah. Ke depan, lonjakan harga minyak dan kenaikan harga komoditas lainnya akibat gejolak global dapat berdampak pada kenaikan harga-harga dan tekanan inflasi di dalam negeri. Di samping kenaikan harga-harga impor (*imported inflation*), tekanan inflasi dapat berasal dari kenaikan harga-harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*), termasuk kenaikan harga energi non-subsidi. Karenanya, di samping stabilisasi nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter guna menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2026. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

6.2. PRAKIRAAN DAN RISIKO PERTUMBUHAN EKONOMI BALI 2026

6.2.1. PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali pada 2026 diprakirakan tetap kuat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dan berada di atas proyeksi PDB Nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali diprakirakan tetap tinggi dan berada pada kisaran 5,4– 5,9% (yoy). Perkonomian Bali diproyeksikan di atas proyeksi PDB Nasional sebesar 4,9 – 5,7% (yoy). Pertumbuhan yang tinggi terutama ditopang oleh meningkatkan kinerja LU Pertanian, LU Konstruksi, LU Perdagangan. LU Pertanian diprakirakan meningkat didukung cuaca yang lebih kondusif dan berlanjutnya program swasembada pangan, serta meningkatnya

kinerja subsektor peternakan terutama dalam rangka pemenuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). LU Konstruksi didorong oleh proyek strategis multitalun, seperti pembangunan berbagai klinik kesehatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, pengembangan fasilitas di KEK Kura-Kura, dimulainya proyek PSN PPN Pengambengan, tingginya proyek konstruksi pariwisata, serta pembangunan infrastruktur prioritas Pemprov Bali. LU Perdagangan diproyeksikan meningkat seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat yang didukung berbagai stimulus pemerintah, serta meluasnya program prioritas pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kinerja LU terkait pariwisata yakni Akomodasi, Makan, dan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan tetap menjadi motor pertumbuhan didukung oleh kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara meskipun pertumbuhannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena tertahan oleh tingginya harga tiket dan perubahan minat berwisata akibat konflik Timur Tengah.

SISI PENGELUARAN

Konsumsi Rumah Tangga diprakirakan tetap tinggi pada 2026. Kinerja konsumsi RT tetap kuat meskipun sedikit termoderasi dibandingkan tahun sebelumnya. Termoderasinya kinerja konsumsi RT diakibatkan oleh perkembangan ekspektasi konsumsi Masyarakat yang dalam tren menurun sejalan dengan ketidakpastian geopolitik global meskipun indeks keyakinan konsumen masih tinggi (>100). Lebih lanjut, realisasi konsumsi juga tertahan oleh konsumsi pada HBKN Galungan-Kuningan yang lebih rendah dari tahun 2025 dikarenakan frekuensinya hanya satu kali pada tahun 2026.

Konsumsi Pemerintah pada 2026 diprakirakan meningkat. Peningkatan konsumsi pemerintah didorong oleh pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah seperti MBG, KDKMP, dan sekolah rakyat serta pengangkatan pegawai P3K seiring penambahan Dapur SPPG. Pagu belanja APBN dan APBD 2026 diprakirakan meningkat, kenaikannya berpotensi tertahan oleh penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Optimalisasi pengumpulan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) juga diprakirakan mendorong kinerja konsumsi

pemerintah pada 2026.

Investasi pada 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi.

Prakiraan kinerja investasi yang menguat didukung oleh tetap kuatnya investasi terutama di sektor tersier terkait dengan pariwisata, berlanjutnya proyek-proyek strategis multitalah, serta penambahan proyek strategis baru pada 2026 diantaranya PSN PPN Pengambengan dan Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik, serta proyek infrastruktur pemerintah seperti pembangunan sejumlah ruas jalan. Target realisasi PMDN dan PMA Bali pada 2026 mencapai 47,93 triliun rupiah, meningkat 11,93% dibanding realisasi 2025 sebesar 42,82 triliun rupiah. Perkembangan terkini menunjukkan realisasi PMA dan PMDN sampai dengan triwulan I 2026 sebesar 13,31 triliun rupiah (27,77% dari target 2026). Namun demikian, gejala geopolitik global berpotensi menahan kinerja investasi lebih tinggi seiring appetite investor untuk berjaga-jaga. Penguatan investasi sektor primer dan sektor sekunder, termasuk hilirisasi perlu terus didorong guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, mengingat investasi saat ini didominasi sektor tersier.

Ekspor luar negeri Bali pada 2026 diproyeksikan tetap tumbuh meski melambat.

Ekspor Bali yang didominasi ekspor jasa terkait aktivitas pariwisata turut terdampak akibat Perang di Timur Tengah yang berpotensi menahan kunjungan wisatawan, sehingga menyebabkan pertumbuhan kunjungan wisatawan yang tidak setinggi periode sebelumnya di tengah kunjungan wisatawan yang masih terpusat di daerah Bali Selatan.

LAPANGAN USAHA

Sumber Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 diperkirakan masih didominasi oleh kinerja LU terkait pariwisata, yaitu LU Akmamin, Perdagangan, dan Transportasi.

LU Akmamin diproyeksikan tetap tumbuh kuat meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini utamanya akibat Konflik Timur Tengah yang mengakibatkan kenaikan harga avtur serta konektivitas jalur penerbangan di Timur Tengah sempat terganggu, serta *outlook* ekonomi salah satu negara wisman utama yakni Tiongkok masih belum kuat. Kendati demikian faktor pendorong terdapat pada *outlook* ekonomi

Australia dan India yang masih kuat yang diperkirakan mendorong kedatangan wisman dari kedua negara tersebut ke Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga terus meningkatkan program promosi pariwisata diantaranya melalui penyelenggaraan setidaknya 56 agenda dalam *Bali Calendar of Events* yang dirilis oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, mencakup festival seni budaya, olahraga, kuliner, dan MICE. Terbaru, event promosi Bali Beyond and Travel Fair juga mampu mencatatkan kinerja yang tinggi. LU Perdagangan diperkirakan meningkat seiring perluasan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP. Hingga Maret 2026, realisasi dapur SPPG telah mencapai 62% yang mendukung perluasan program MBG ke seluruh wilayah Bali. Perbaikan kinerja pertanian khususnya padi juga turut mendukung kinerja Perdagangan. Meskipun melambat, kinerja LU Transportasi diperkirakan akan tetap solid. Hingga triwulan I 2026 terdapat sekitar 5,32 juta penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, tumbuh 2,48% (yoy).

LU Pertanian pada 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan pertumbuhan pada LU Pertanian didukung membaiknya kondisi cuaca pada keseluruhan tahun 2026 dibanding tahun 2025 yang sempat terdampak La Nina lemah pada awal tahun. Peningkatan kinerja juga didorong oleh fokus program swasembada pangan melalui perluasan lahan tanam, kebijakan kemudahan perolehan pupuk subsidi, dan penggunaan bibit unggul, serta berbagai program yang mendukung peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan. Kinerja subsektor peternakan turut meningkat untuk mendukung perluasan program MBG. Selain itu, produktivitas pertanian berpotensi terdorong dengan beroperasinya *Rice Milling Unit* (RMU) di Provinsi Bali dan rencana Pembangunan RMU modern di Tabanan yang diharapkan mampu menyerap dan mendorong produksi pertanian.

Sementara itu, LU Konstruksi pada 2026 diperkirakan menguat dibandingkan 2025.

Pertumbuhan didorong oleh masih tingginya proyek konstruksi swasta seperti hotel, perkantoran, perumahan, dan villa. Berlanjutnya proyek strategis multitalah, termasuk pengembangan

KEK Sanur, dan KEK Kura-Kura, serta penambahan proyek strategis seperti PSN PPN Pengambengan dan proyek pengolahan sampah menjadi energi, turut menopang ekspansi sektor konstruksi.

6.2.2. RISIKO PERTUMBUHAN EKONOMI

Prospek ekonomi global pada 2026 diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan pada 2025 sejalan dengan berlangsungnya konflik Timur Tengah.

Penutupan Selat Hormuz mengakibatkan melonjaknya harga minyak dunia. Terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara juga mendorong kenaikan pada harga komoditas dunia lainnya, termasuk harga pangan. Hal ini berdampak pada kenaikan inflasi global, dimana IMF memprakirakan inflasi global berada pada kisaran 4,4% (yoy) pada 2026, lebih tinggi dibanding inflasi global 2025 yang sebesar 4,1% (yoy).

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak hanya berisiko mengganggu rantai pasok, tetapi juga dapat memengaruhi arus wisatawan, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu *hub* penerbangan bagi wisatawan Eropa menuju Bali. Sejumlah rute penerbangan internasional dari dan menuju Bali terpaksa ditutup akibat kenaikan harga avtur yang meningkatkan biaya produksi. Meningkatnya ketidakpastian, juga berpotensi menyebabkan pergeseran preferensi bagi wisman untuk berlibur ke destinasi yang lebih dekat, yang tidak perlu menggunakan transportasi udara. Selain itu, perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai salah satu negara utama asal wisatawan mancanegara berpotensi menahan kinerja pariwisata Bali. Dari sisi domestik, relatif tingginya harga tiket penerbangan ke Bali berisiko menahan pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi RT berpotensi tertahan oleh meningkatnya sikap kehati-hatian (*precautionary motive*) masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Gangguan rantai pasok global berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor yang pada akhirnya dapat menekan daya beli dan menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, prospek ekonomi Australia sebagai negara dengan kunjungan tertinggi ke Bali yang tetap stabil dan jarak yang tidak terlalu jauh ke Bali dibandingkan destinasi lain seperti Thailand,

diprakirakan sebagai faktor pendorong kunjungan wisman ke Bali. *Outlook* ekonomi India juga diprakirakan tetap kuat turut mendorong kunjungan wisman ke Bali. Dalam menghadapi prospek ekonomi yang belum kuat, diperlukan penguatan kolaborasi dan sinergi antara Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kerangka tersebut, **Bank Indonesia merekomendasikan 4 strategi utama untuk menjaga daya tahan ekonomi Bali yakni 4 *Strategic Pillars*** diantaranya:

- menjaga kinerja *backbone* ekonomi Bali yakni Sektor Pariwisata
- mendorong kinerja *new hero* ekonomi Bali untuk menciptakan *multiplier* yakni investasi
- memperkuat sektor pertanian untuk diversifikasi sumber pertumbuhan (*source of growth*)
- mendorong UMKM dan digitalisasi sebagai penyangga dan katalisator ekonomi

6.2.3. PRAKIRAAN INFLASI

Inflasi Provinsi Bali pada 2026 diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1% dan lebih rendah dibandingkan 2025. Dari sisi inflasi inti, tekanan inflasi diprakirakan menurun seiring berkurangnya frekuensi HBKN Galungan-Kuningan yang mana tahun 2026 hanya dilakukan sekali sehingga permintaan yang lebih moderat terhadap komoditas canangsari, kue basah, dan makanan jadi lainnya. Selain itu tekanan harga emas global juga diprakirakan lebih landai dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok global dan mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas seperti biji kopi, biji kakao, minyak kelapa sawit (bahan baku minyak goreng dan produk turunan sabun), serta plastik yang berpotensi meningkatkan *cost of production* dari sisi kemasan produk. Sementara itu, inflasi *volatile food* diprakirakan lebih moderat seiring normalisasi cuaca pasca La Nina lemah pada tahun sebelumnya dan gagal panen sejumlah komoditas hortikultura pada akhir tahun 2025. Meski demikian, peningkatan permintaan pangan dan pantauan BMKG yang menunjukkan kemungkinan El Nino moderat hingga awal tahun 2027, tetap perlu diantisipasi. Dari sisi inflasi *Administered Price*, konflik

di Timur Tengah yang menyebabkan kenaikan harga minyak global menyebabkan kenaikan sejumlah BBM Non Subsidi dan peningkatan fuel surcharge menjadi sumber utama tekanan inflasi *Administered Price*. Selain itu, kenaikan sejumlah tarif daerah seperti parkir di Kabupaten Badung pada Januari 2026 dan kenaikan tarif PDAM di Buleleng pada Februari 2026 diperkirakan menambah tekanan inflasi.

Dinamika global juga turut memengaruhi prospek inflasi Provinsi Bali. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) IMF April 2026, inflasi global diproyeksikan sebesar 4,4% (yoy) pada tahun 2026, lebih tinggi dari prakiraan inflasi 2025 sebesar 4,1% (yoy) dan angka ini direvisi atas sebesar 0,6 poin presentase dari *update* WEO pada Januari 2026. Sejalan dengan eskalasi geopolitik global, proses disinflasi global diperkirakan tertahan pada tahun 2026 sebelum kembali berlanjut pada tahun 2027. Tekanan inflasi global terutama bersumber dari kenaikan harga komoditas pangan dan energi akibat dampak disrupsi rantai pasok pada periode konflik global. Di negara maju, inflasi diperkirakan masih relatif persisten, termasuk di Amerika Serikat seiring dampak kenaikan tarif dan tekanan harga barang, sementara inflasi Australia diproyeksikan tetap berada di atas kisaran target dalam jangka waktu yang lebih panjang. Di Jepang, inflasi diperkirakan mulai termoderasi pada 2026 dan bergerak mendekati target pada 2027, sejalan dengan meredanya tekanan harga pangan dan komoditas. Sementara itu, inflasi Tiongkok diproyeksikan meningkat secara bertahap dari level yang rendah, sedangkan inflasi India diperkirakan kembali mendekati target setelah penurunan signifikan pada 2025 yang didorong oleh rendahnya harga pangan. Divergensi arah dan kecepatan penurunan inflasi antarnegara tersebut berpotensi memperlebar perbedaan *stance* kebijakan moneter antara Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan negara lainnya, sehingga meningkatkan ketidakpastian bagi negara berkembang dan memicu fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar tersebut dapat mendorong risiko *imported inflation* di dalam negeri, terutama pada komoditas pangan yang masih bergantung pada impor seperti bawang putih, produk berbahan tepung terigu, minyak goreng, dan kopi bubuk. Selain pangan, pergerakan harga emas sebagai aset

safe haven global yang berpotensi kembali menguat di tengah ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan menjadi faktor eksternal lain yang turut memengaruhi dinamika inflasi di Provinsi Bali.

Dalam rangka menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, TPID Provinsi Bali bersama TPID kota/kabupaten di Bali terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif). Beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Intensifikasi operasi pasar murah dan pemantauan harga secara berkala menjelang HBKN. Pelaksanaan operasi pasar murah merupakan tindak lanjut/hasil *advisory* pada *High Level Meeting* HLM TPID dan Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Balinusra; (2) Pengawasan lapangan penyaluran beras SPHP dan koordinasi dengan Bulog dalam mendorong pemanfaatan kios sebagai agen penyalur SPHP di Bali, serta pembukaan posko sembako; (3) Upaya memastikan ketersediaan pasokan melalui penandatanganan Kerjasama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) dimana salah satu fokus program prioritas adalah penguatan perdagangan dan ekspor antar provinsi; *linkage* antara Perumda dengan SPPG dan Perhotelan, penyaluran vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) untuk ternak; program asuransi usaha tani; bantuan alsintan; perbaikan irigasi; pengembangan bibit unggul serta pertanian organik; (4) Pengendalian ekspektasi inflasi diantaranya melalui Pelaksanaan HLM TPID-TP2DD Provinsi Bali yang berfokus pada perumusan strategi pengendalian inflasi 2026 dan HBKN Nyepi-Ramadan-Idulfitri pada tanggal 10 Februari 2026 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, perluasan informasi harga pangan di pasar tradisional melalui *running text* dan media sosial, pengaktifan gerai inflasi yang dikelola Perumda agar menjadi referensi harga pasar, serta diseminasi rutin upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi; serta (5) Penguatan data neraca pangan daerah, serta mendorong integrasi data nasional dan daerah. Melalui langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia optimis inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 terjaga pada sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy).



Administered Price (AP)

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

Akselerasi

Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/Kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Cash Inflows

Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.

Cash Outflows

Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.

Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ekspor

Keseluruhan barang dan atau jasa yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Faktor Fundamental

Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran-lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.

Faktor Non Fundamental

Faktor nonfundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (*volatile foods*), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (*administered price*).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank konvensional.

Impor

Seluruh barang dan atau jasa yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Administered Price (AP)

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

Akselerasi

Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/Kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Cash Inflows

Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.

Cash Outflows

Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.

Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ekspor

Keseluruhan barang dan atau jasa yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Faktor Fundamental

Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran-lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.

Faktor Non Fundamental

Faktor nonfundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (*volatile foods*), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (*administered price*).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank konvensional.

Impor

Seluruh barang dan atau jasa yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Imported inflation

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi inti

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental (merupakan Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *administered prices* dan *volatile food*).

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Kliring

Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kontraksi

Pertumbuhan yang negatif.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kualitas kredit

Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang

TIM PENYUSUN

Pengarah

Achris Sarwani

Penanggung Jawab

Ronald D. Parluhutan

Koordinator Penyusun

Muhamad Shiroth

Yusuf Wicaksono H.

Editor

Hero Wonida

Tim Penulis

Imma Nurma Sari

Suhardina Dwi Putrisari

Ayu Putu Arantza Bonita

Hafizhah Farah Azhar

Ikhlasul Amal Rianto

M. Rifhal Julian

Nadia Fawziya Zulfah

Desainer

A.A. Gede Agung Maha Jaya

Supporting

A.A. Ayu Mas Radha Rani Dewi

Luh Putu Citra Kusuma

Kontributor

Divisi Implementasi KEKDA

Divisi Implementasi SP, Pengawasan SP-PUR, & Pelindungan Konsumen

Produksi dan Distribusi

Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah dan Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Grup Perumusan dan Implementasi KEKDA (Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah)

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988

Email : kpw Bali-kpkwp@bi.go.id

Website : www.bi.go.id

dihimpun pada suatu waktu tertentu.

Melambat

Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.

mtm (month to month)

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Net Cashflows

Selisih bersih antara jumlah *cash inflows* dan *cash outflows* pada periode yang sama yang terdiri dari: *net cash outflows* bila *cash outflows* lebih tinggi dibandingkan dengan *cash inflows*, dan *net inflows* bila terjadi sebaliknya.

Non Performing Loan (NPL)

Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto merupakan Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. Terdiri atas PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Perusahaan

Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.

qtq (quarter to quarter)

Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Saldo Bersih

Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".

Sektor Ekonomi Dominan

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS)

Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulanan.

Survei Konsumen (SK)

Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.

yoy (year on year)

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Download e-book



Google

LPP BI PROVINSI BALI

Ebook dapat diunduh melalui menu pencarian google atau pindai QR code atau tautan berikut.

bit.ly/LPP-BALI

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI

Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar - 90235

Telp : 62 - 361 - 248982, Fax : 61 - 361 - 34993 - 222988

Website : <https://www.bi.go.id>

